



L A P O R A N BADAN PANGAN NASIONAL PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

**BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, OKTOBER
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan yang hasilnya akan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi tambahan anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 Badan Pangan Nasional sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-14 Nomor: **SP DIPA- 125.01.1.690590/2024** tanggal 6 September 2024, alokasi anggaran menjadi sebesar **Rp. 25.222.891.455.000**. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Agustus Tahun 2024 untuk mendorong penggunaan anggaran seefisien dan seefektif mungkin.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, data dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan instrument *best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional periode bulan September Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan September Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 7 Oktober 2024
Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	3
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	13
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	13
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	23
3.3 Kegiatan Kepala Badan Nasional	130
BAB IV PENUTUP	145
4.1 Kesimpulan	145
4.2 Permasalahan	146
4.3 Rekomendasi	147
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Revisi ke-14 Badan Pangan Nasional Tahun 2024.....	4
Tabel 2.	Pagu Blokir sampai bulan September sesuai DIPA Revisi 14 Badan Pangan Nasional Tahun 2024	5
Tabel 3.	Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Sesuai DIPA Revisi ke-14 dan Revisi Blokir AA Tahun 2024.....	5
Tabel 4.	Target Fisik dan Keuangan Bulan September sesuai DIPA Revisi 14 Badan Pangan Nasional Tahun 2024.....	6
Tabel 5.	Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan September Tahun 2024	13
Tabel 6.	Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan September Tahun 2024 Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional.....	14
Tabel 7.	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Posisi sampai bulan September Tahun 2024.....	22
Tabel 8.	Realisasi Keuangan Bulan September Tahun 2024 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran III DIPA Revisi ke-14 Badan Pangan Nasional TA 2024...	148
Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen posisi Bulan September Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI Kemenkeu.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, amanat ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022. Sebagaimana pasal 5 pada perbadan tersebut, Kepala Badan perlu melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik, Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I (UKE-1) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; 3) pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan dinamika perencanaan, kegiatan tersebut dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan 55 (lima puluh lima) Rincian Output (RO) berdasarkan DIPA revisi 6 Nomor: SP DIPA- 125.01.1.690590/2024 Tanggal 6 September 2024 untuk Badan Pangan Nasional (125.01) melalui alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 25.222.891.455.000,- (Dua Puluh Lima Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Sejak akhir Tahun 2023 Kepala Badan Pangan Nasional telah mengusulkan penambahan alokasi anggaran melalui surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 222/PANGAN/K/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Usulan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Diikuti surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 03/PR.02.01/K/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permohonan Pengelolaan Ratas untuk mendorong menjadi salah satu agenda dalam Ratas. Secara simultan koodinasi telah dilakukan antara Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran BUN, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Badan Pangan Nasional tanggal 17

Januari 2023, serta koordinasi tiga pihak antara Badan Pangan Nasional, Kemenkeu dan Bappenas pada tanggal 27 Januari 2023 yang membahas KRO/RO Usulan ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Kepala Badan menyampaikan langsung usulan ABT pada Rapat Internal bersama Bapak Presiden RI pada tanggal 31 Januari 2023. Sesuai surat Sekretaris Kabinet nomor: B.124/Seskab/Ekon/2/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan mengusulkan kembali ABT melalui surat Nomor 38/PR.02.01/K/2/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023 Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan surat Usulan ABT TA 2024 nomor 53/PR.02.01/K/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Usulan ABT Badan Pangan Nasional TA. 2023 dengan usulan ABT Tahap I tahun 2023 sebesar Rp.365.668.618.000 pada DIPA revisi ke-3 tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya usulan ABT Tahap I Februari-Maret 6.018.689.276.000 yang terbit pada DIPA revisi ke-5 Tahun 2024 yang dilengkapi dengan data dukung berupa TOR, RAB dan data dukung lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi dan penelaahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, disetujui ABT Badan Pangan Nasional sebesar Rp.6.384.357.894.000 melalui surat Nomor S-1/AG/AG.5/2023 tentang Permintaan dokumen usul penerbitan SP-SABA sesuai izin Menteri Keuangan atas Usulan Tambahan Badan Pangan Nasional untuk Penguatan Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional. Menteri Keuangan mengeluarkan surat Nomor S-83/MK.2/2023 tanggal 1 April 2023, tentang Penetapan SP-SABA 999.08 sebagai dasar pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya ke BA Badan Pangan Nasional (BA 125). Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-221/AG/AG.3/2023 tanggal 18 April 2023, hal Pengesahan Revisi Anggaran (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 melalui DIPA Revisi ke-05 Nomor: SP. DIPA-125.01.1.690590/2024 per tanggal 18 April 2024. Berdasarkan surat usulan Kepala Badan Pangan nasional Nomor 96/PR.02.01/K/3/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahap II Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024. Usulan ABT Badan pangan Nasional sebesar Rp.9.050.825.059.913 melalui DIPA revisi ke-08 SP. DIPA-125.01.1.690590/2023 per tanggal 30 Mei 2024. Berkaitan dengan penambahan alokasi anggaran Tahun 2024, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan oleh masing-masing unit kerja eselon II dan unit kerja eselon I secara berjenjang terkait penggunaan dan realisasi anggaran

lingkup Badan Pangan Nasional sampai bulan September Tahun 2024. Sesuai target pada bulan September sebesar 0,15% atau sebesar Rp. 37.834.337.183,-. dari total anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 25.222.891.455.000,-. (Dua Puluh Lima Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Penetapan target berdasarkan lembar ke-III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2024 Revisi ke-14 tanggal 6 September Tahun 2024.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan output kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan September Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan September Tahun 2024. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan September Tahun 2024 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Badan Pangan Nasional Tahun 2024 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan September Tahun 2024.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan September Tahun 2024.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari kinerja outcome di level Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama Tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan alokasi ABT Tahun 2024, telah terbit Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA- 125.01.1.690590/2024, Revisi ke-14 Tanggal 6 September 2024. Rencana kinerja output pada bulan September Tahun 2024 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai halaman III DIPA Revisi ke-14 Tahun 2024. Sebagaimana lembar ke-III DIPA Revisi ke-14 pada bulan September ditargetkan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.376.749.000,- atau 0,15% dari total pagu sebesar Rp. 25.222.891.455.000,- sesuai DIPA revisi ke-14 dengan rincian sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1
Alokasi Anggaran Sesuai DIPA Revisi ke-14
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Anggaran	Pagu DIPA Revisi-14	Total
HA. 6875 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.006.798.781.000	25.006.798.781.000
HA.6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	52.765.620.000
HA.6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	50.356.836.000
WA.6874 Dukungan Manajemen	112.970.218.000	112.970.218.000
JUMLAH	25.222.891.455.000	25.222.891.455.000

Alokasi anggaran sampai dengan periode laporan September terdapat alokasi anggaran yang masih di blokir sebesar Rp.22.431.086.000,- dengan rincian per kegiatan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Pagu Blokir Sampai Bulan September Sesuai DIPA Revisi Ke-14
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU BLOKIR (Rp)
JUMLAH SELURUHNYA		22.131.086.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	19.544.148.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.292.278.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5.177.606.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.074.264.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.586.938.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.586.938.000

Alokasi anggaran Badan Pangan Nasional sesuai pagu DIPA Revisi ke-14 dan pagu revisi blokir sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Sesuai DIPA Revisi ke-14
dan Revisi Blokir AA Tahun 2024

URAIAN		PAGU	
		DIPA	REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		25.222.891.455.000	25.200.760.369.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.109.921.237.000	25.090.377.089.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.006.798.781.000	24.998.506.503.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	47.588.014.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	44.282.572.000
WA	Program Dukungan Manajemen	112.970.218.000	109.583.280.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.970.218.000	109.583.280.000

Laporan Badan Pangan Nasional Periode Bulan September Tahun 2024 khusus akan melaporkan pencapaian kinerja Satker Pusat (690590) Badan Pangan Nasional dengan target pada periode bulan September sebagaimana Tabel 4 berikut

Tabel 4.
Target Fisik dan Keuangan Bulan September sesuai DIPA Revisi 14
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		25.200.760.369.000		37.801.140.554	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.109.921.237.000		37.664.881.856	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.006.798.781.000		37.510.198.172	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.080.798.000		6.121.197	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	1 rekomendasi kebijakan	1.450.077	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	12 rekomendasi kebijakan	1.678.620	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.995.000.000	5 rekomendasi kebijakan	2.992.500	1
AEA	Koordinasi	18.657.126.000		27.985.689	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	1 Kegiatan	610.275	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	7.267.323.000	1 Kegiatan	10.900.985	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek,	10.982.953.000	1 Kegiatan	16.474.430	1

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
	Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan				
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000		4.352.063	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	6 NSPK	749.063	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	9 NSPK	1.953.000	2
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	11 NSPK	1.650.000	0
BEC	Bantuan Produk	24.935.632.477.000		37.403.448.716	
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	24.935.632.477.000	55.250.624 Paket	37.403.448.716	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000		2.250.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	125 kelompok	2.250.000	10
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	25.577.005.000		38.365.508	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	9.074.585.000	3 Data	13.611.878	1
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	14.920.340.000	9 Data	22.380.510	1
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	1 Data	2.373.120	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000		27.675.000	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	13 Unit	24.675.000	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	5 Unit	3.000.000	0
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan	52.765.620.000		79.148.430	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
	Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	11.350.000.000		17.025.000	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	4.123.000.000	1 rekomendasi	6.184.500	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	7.227.000.000	12 rekomendasi kebijakan	10.840.500	1
AEA	Koordinasi	19.295.020.000		28.942.530	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.700.000.000	1 Kegiatan	8.550.000	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	13.595.020.000	1 Kegiatan	20.392.530	1
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	978.450.000		1.467.675	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4 NSPK	600.000	1
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	578.450.000	5 NSPK	867.675	1
QEA	Bantuan Masyarakat	18.611.550.000		27.917.325	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	14.525.000.000	180.000 orang	21.787.500	1
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	1 orang	6.129.825	1
QMA	Data dan Informasi Publik	2.530.600.000		3.795.900	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.275.000.000	1 Data	1.912.500	1
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	1 Data	1.883.400	1
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000		75.535.254	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.498.400.000		3.747.600	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	300.000.000	3 rekomendasi kebijakan	450.000	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.198.400.000	8 rekomendasi kebijakan	3.297.600	1
AEA	Koordinasi	24.506.811.000		36.760.217	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	8.702.742.000	11 Kegiatan	13.054.113	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	11.271.222.000	8 Kegiatan	16.906.833	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.532.847.000	1 Kegiatan	6.799.271	1
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2.250.000.000		3.375.000	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	650.000.000	4 NSPK	975.000	1
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	7 NSPK	2.100.000	1
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	2 NSPK	300.000	1
PCA	Perizinan Produk	1.712.000.000		2.568.000	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.712.000.000	400 Produk	2.568.000	
PEH	Promosi	5.044.000.000		7.566.000	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	5.044.000.000	1 Kegiatan	7.566.000	1
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.270.000.000		3.405.000	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.270.000.000	10 kelompok Masyarakat	3.405.000	1
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000		3.409.238	
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	1 Laporan	3.409.238	1
QMA	Data dan Informasi Publik	1.460.000.000		2.190.000	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.460.000.000	1 Data	2.190.000	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.342.800.000		12.514.200	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	8.342.800.000	8 Unit	12.514.200	1

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	112.970.218.000		169.455.327	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.970.218.000		169.455.327	
AEC	Kerjasama	2.900.000.000		4.350.000	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.900.000.000	1 Dokumen	4.350.000	1
BMA	Data dan Informasi	5.248.080.000		7.872.120	
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	5.248.080.000	1 Layanan	7.872.120	1
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	83.805.778.000		125.708.667	
EBA.956	Layanan BMN	720.000.000	1 Layanan	1.080.000	1
EBA.957	Layanan Hukum	1.700.000.000	1 Layanan	2.550.000	1
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.500.000.000	1 Layanan	5.250.000	1
EBA.959	Layanan Protokoler	975.000.000	1 Layanan	1.462.500	1
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	1 Layanan	1.425.000	1
EBA.962	Layanan Umum	11.755.630.000	1 Layanan	17.633.445	1
EBA.994	Layanan Perkantoran	64.155.148.000	1 Layanan	96.232.722	1
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.926.400.000		2.889.600	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.926.400.000	34 Unit	2.889.600	2
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.600.000.000		5.400.000	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.600.000.000	342 orang	5.400.000	342
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.489.960.000		23.234.940	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.923.960.000	15 Dokumen	8.885.940	1
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	6 Dokumen	1.500.000	1

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REVISI 14		TARGET SEPTEMBER (0,15%)	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	1 Dokumen	2.943.000	1
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.604.000.000	12 Laporan	9.906.000	1

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 55 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.722.461.932.000,-. Alokasi anggaran tambahan melalui DIPA Revisi ke-14 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2024 tanggal 6 September 2024, total alokasi anggaran di Badan Pangan Nasional menjadi Rp. 25.222.891.455.000,- untuk pelaksanaan 55 output/RO lingkup Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan output/rincian output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan September Tahun 2024 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan per belanja dan realisasi fisik bulan September tahun 2024 per output lingkup Badan Pangan Nasional disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6 berikut:

Tabel 5
Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan September Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	48.599.711.000	38.830.921.709	79,90%
2.	Belanja Barang	36.485.545.241.000	6.551.212.665.333	17,96%
3.	Belanja Modal	31.927.049.000	18.524.629.845	58,02%
TOTAL		36.566.072.001.000	6.608.568.216.887	18,07%

Tabel 6
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan September Tahun 2024
Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional

URAIAN		TARGET SEPTEMBER		REALISASI SEPTEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		37.801.140.554		34.552.726.101	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	37.664.881.856		25.849.781.318	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	37.510.198.172		11.870.532.112	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.121.197		214.144.322	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.450.077	1 rekomen dasi kebijakan	70.888.089	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.678.620	1 rekomen dasi kebijakan	65.251.770	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	2.992.500	1 rekomen dasi kebijakan	78.004.463	1
AEA	Koordinasi	27.985.689		721.715.992	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	610.275	1 Kegiatan	27.081.500	1
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	10.900.985	1 Kegiatan	127.843.080	1
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	16.474.430	1 Kegiatan	566.791.412	1
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4.352.063		63.055.360	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	749.063	1 NSPK	14.052.440	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.953.000	1 NSPK	4.529.000	1
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.650.000	1 NSPK	44.473.920	0
BEC	Bantuan Produk	37.403.448.716		0	0
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	37.403.448.716	55.000 Paket	0	0

URAIAN		TARGET SEPTEMBER		REALISASI SEPTEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.250.000		24.544.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	2.250.000	10 Kelompok	24.544.000	0
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	38.365.508		1.784.072.438	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	13.611.878	1 Data	710.285.159	0
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	22.380.510	1Data	1.061.673.279	0
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	2.373.120	1 Data	12.114.000	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	27.675.000		9.063.000.000	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	24.675.000	1 Unit	9.063.000.000	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000	1 Unit	0	0
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	79.148.430		4.047.409.529	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	17.025.000		802.550.022	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	6.184.500	1 rekomen dasi	276.773.050	1
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	10.840.500	1 rekomen dasi kebijakan	525.776.972	1
AEA	Koordinasi	28.942.530		1.922.721.844	0
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	8.550.000	1 Kegiatan	410.707.845	36
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	20.392.530	0 Kegiatan	1.512.013.999	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.467.675		1.922.721.844	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	600.000	1 NSPK	410.707.845	0
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	867.675	0	1.512.013.999	0

URAIAN		TARGET SEPTEMBER		REALISASI SEPTEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QEA	Bantuan Masyarakat	27.917.325		1.280.270.273	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	21.787.500	0	33.764.273	0
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	6.129.825	0	1.246.506.000	0
QMA	Data dan Informasi Publik	3.795.900		27.664.540	0
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.912.500	1 Data	16.414.540	0
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.883.400	1 Data	11.250.000	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	75.535.254		9.931.839.677	0
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.747.600		144.902.839	0
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	450.000	0 kebijakan	69.720.000	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	3.297.600	0	75.182.839	0
AEA	Koordinasi	36.760.217		2.935.426.098	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	13.054.113	0	507.863.505	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	16.906.833	0	1.753.259.800	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	6.799.271	0	674.302.793	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	3.375.000		189.122.688	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	975.000	0	34.575.000	0

URAIAN		TARGET SEPTEMBER		REALISASI SEPTEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	2.100.000	1 NSPK	154.547.688	0
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000	0	0	0
PCA	Perizinan Produk	2.568.000		77.890.740	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.568.000	20 Produk	77.890.740	
PEH	Promosi	7.566.000		507.685.120	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	7.566.000	1 Kegiatan	507.685.120	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.405.000		12.188.047	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	3.405.000	0	12.188.047	0
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3.409.238		76.124.145	0
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	3.409.238	0	76.124.145	0
QMA	Data dan Informasi Publik	2.190.000	0	0	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	2.190.000	0	0	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.514.200		5.988.500.000	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	12.514.200	0	5.988.500.000	
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	169.455.327		8.702.944.783	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	169.455.327		8.702.944.783	
AEC	Kerjasama	4.350.000		59.079.283	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	4.350.000	1 Dokumen	59.079.283	0
BMA	Data dan Informasi	7.872.120		287.342.955	1
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	7.872.120	1 Layanan	287.342.955	

URAIAN		TARGET SEPTEMBER		REALISASI SEPTEMBER	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	125.708.667		6.099.960.425	
EBA.956	Layanan BMN	1.080.000	1 Layanan	23.104.500	
EBA.957	Layanan Hukum	2.550.000	1 Layanan	104.277.000	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5.250.000	1 Layanan	366.756.093	
EBA.959	Layanan Protokoler	1.462.500	1 Layanan	121.078.552	
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.425.000	1 Layanan	99.292.294	
EBA.962	Layanan Umum	17.633.445	1 Layanan	852.809.384	
EBA.994	Layanan Perkantoran	96.232.722	1 Layanan	4.532.642.602	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.889.600		41.800.000	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.889.600	34 unit	41.800.000	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5.400.000		434.438.841	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	5.400.000	342 orang	434.438.841	0
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	23.234.940		1.780.323.279	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.885.940	1 Dokumen	776.913.762	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.500.000	1 Dokumen	122.231.122	0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.943.000	1 Dokumen	24.919.200	1
EBD.965	Layanan Audit Internal	9.906.000	1 Laporan	856.259.195	1

Sebagaimana tabel 6 di atas, RO yang ter-realisis pada bulan September Tahun 2024 yaitu:

- a) **Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 11.870.532.112, dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:
 - a) **Direktorat Ketersediaan Pangan**, RO yang terealisasi : 1) ABR Rekom Kebijakan Ketersediaan Pangan : Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah, Pengawasan implementasi regulasi harga pangan HPP,

HET, HAP dan kebijakan lainnya 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan : Koordinasi, bimtek, pelaporan ketersediaan pangan, 3) AFA Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan : Penyusunan Nspk Survei Stok Akhir Tahun, dan 4) QMA Data dan Informasi Ketersediaan Pangan : Penguatan Data dan Informasi Ketersediaan Pangan.

b) **Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**, RO yang terealisasi antara lain : 1) ABR Rekom Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan : Pengawasan implementasi regulasi harga pangan HPP, HET, HAP dan kebijakan lainnya, 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan : Koordinasi pemantapan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan 3) AFA Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan: NSPK Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan, QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, dan QMA Data dan Informasi Publik, Panel Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Panel Harga Pangan.

c) **Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan**, RO yang terealisasi antara lain: 1) ABR Rekom Kebijakan Distribusi dan Pangan : Penguatan Cadangan Pangan dan Penguatan Distribusi Pangan, 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan : Review Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan Pemerintah, Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, dan QMA Data dan Informasi Publik.

b. **Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi**. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Pada periode bulan September Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp 4.047.409.529.- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

a) **Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan** RO yang terealisasi: 1) ABR Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan : Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Kesiapsiagaan Krisis Pangan Pusat, 2) AFA Koordinasi Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan, Penyusunan RUU Kewaspadaan Pangan dan Gizi, 3) QEA Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan

berupa Intervensi pengendalian kerawanan pangan, dan 4) QMA Data dan Informasi Publik Pengendalian Kerawanan Pangan .

- b) **Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi**, RO yang terealisasi antara lain: 1) ABR Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi berupa Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, 2) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi berupa Koordinasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan Kedeputan Kerawanan Pangan dan Gizi: Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi; Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Gerakan Selamatkan Pangan, 3) QEA Bantuan Masyarakat berupa Intervensi/Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat (SP SABA).

- c. **Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pada periode bulan September Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp. 9.931.839.677.- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

- a) **Direktorat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**, RO yang terealisasi: 1) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Koordinasi kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan keamanan pangan, 2) PEH Konsumsi Pangan B2SA berupa Promosi B2SA, 3) QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat berupa Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan.
- b) **Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**, RO yang terealisasi: 1) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan Mutu Pangan berupa Koordinasi, Kerjasama, Advokasi, Bimtek, Sosialisasi, dan KIE di Bidang Standar Keamanan dan Mutu Pangan Pusat, Koordinasi Kedeputan Di Bidang Perumusan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan.
- c) **Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**, RO yang terealisasi antara lain: 1) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan

dan Mutu Pangan berupa Sosialisasi dan Diseminasi Keamanan Pangan; Pemeliharaan Sistem Database Keamanan dan Mutu Pangan; Koordinasi , 2) AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan 3) PCA Sertifikasi Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan berupa Sertifikasi Dan Registrasi Keamanan Pangan Segar, dan 4) QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk berupa Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan.

d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan September Tahun 2024 telah ter-realisis anggaran sebesar Rp. 8.702.944.783,- dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a) **Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas**, RO yang terealisasi: 1) AEC Kerjasama Bidang Pangan, 2) EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat, 3) EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan 4) EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
- b) **Pusat Data dan Informasi**, RO yang terealisasi: 1) BMA Data dan Informasi Publik.
- c) **Biro Keuangan Pengadaan dan Umum** RO yang terealisasi antara lain: 1) EBA956 Layanan BMN, 2) EBA959 Layanan Protokoler, 3) EBA962 Layanan Umum berupa Layanan Rumah Tangga Pimpinan, Layanan Dukungan Kesekretariatan, Layanan Tata Usaha Pimpinan, Layanan Persuratan dan Kearsipan, EBB951 Layanan Sarana Internal berupa : dan 5) EBD955 Layanan Manajemen Keuangan berupa : Layanan Perbendaharaan, Layanan Akuntansi dan Verifikasi, Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan. 6) EBD956 Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- d) **Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum**, RO yang terealisasi: 1) EBA957 Layanan Hukum, 2) EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dan 3) EBC954 Layanan Manajemen SDM.
- e) **Inspektorat** RO yang terealisasi: 1) EBD965 Layanan Audit Internal berupa : Audit pada Satker lingkup Badan Pangan Nasional, Kegiatan Pengawasan

Lainnya (mandatory/prioritas pimpinan/strategis), Penyusunan NSPK Audit Internal

Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sampai bulan September mencapai Rp 34.552.726.101,- atau 0,09% dari alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2024 sebesar Rp. 25.222.891.455.000,-. Jika dibandingkan dengan target bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 37.801.140.554,- realisasi sebesar 91,41% atau setara Rp. 34.552.726.101,-. Rincian per kegiatan sebagaimana Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional
Posisi sampai bulan September Tahun 2024

URAIAN		PAGU		REALISASI		
		DIPA	REVISI	SP2D	% DIPA	% REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		25.222.891.455.000	25.200.760.369.000	6.608.568.216.887	26,20%	26,22 %
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.109.921.237.000	25.090.377.089.000	6.531.001.908.462	26,01%	26,03%
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.006.798.781.000	24.998.506.503.000	6.466.203.862.061	25,86%	25,87%
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	47.588.014.000	33.138.714.733	62,80%	69,64%
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	44.282.572.000	31.659.331.668	62,87%	71,49%
WA	Program Dukungan Manajemen	112.970.218.000	109.583.280.000	77.566.308.425	68,66%	70,78%
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.970.218.000	109.583.280.000	77.566.308.425	68,66%	70,78%

Jika dibandingkan antara target anggaran bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 37.801.140.554,- realisasi anggaran sebesar 91,41 % atau setara Rp. 34.552.726.101,-. Rincian per kegiatan sebagaimana Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Realisasi Keuangan Bulan September Tahun 2024 Per Kegiatan
Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pangan Nasional	37.801.140.554	34.552.726.101	91,41
6875. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	37.510.198.172	11.870.532.112	31,65
6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	79.148.430	4.047.409.529	5113,70
6877. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	75.535.254	9.931.839.677	13148,61
WA6874. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	169.455.327	8.702.944.783	5135,83

Dari Tabel 8 di atas, realisasi keuangan tertinggi pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan capaian 13148,61%. Hal ini disebabkan karena realisasi pembayaran belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, sedangkan pada kegiatan lainnya secara realisasi keuangan sudah berjalan terutama untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan September Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 4, kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 11.870.532.112,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut

1.1. Direktorat Ketersediaan Pangan

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Ketersediaan Pangan adalah:

1. Rapat Pembahasan Penghitungan Alokasi Impor Daging Kerbau 20.000 ton melalui mekanisme penunjukan pelaku usaha lainnya dengan strategi nasional KPK.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 di RR. Dit. Ketersediaan Pangan, Bapanas. Tujuan rapat ini untuk membahas penghitungan alokasi impor dengan Stranas KPK dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan. Rapat dipimpin oleh perwakilan Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Perwakilan Stranas Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK. Hasil pertemuan rapat sebagai berikut:

- a. Hasil Rakortas tanggal 28 Maret 2024, terdapat alokasi impor daging kerbau dari India sebesar 20.000 Ton melalui mekanisme penunjukan Pelaku Usaha Lainnya.
- b. Hasil Rakornis tanggal 19 Agustus 2024, Bapanas diamanatkan untuk melakukan penghitungan terhadap alokasi impor tersebut. Hasil penghitungan alokasi impor akan disampaikan pada Rakornis Kemenko Bidang Perekonomian.
- c. Proses penghitungan dengan mempertimbangkan Indikator Persyaratan Teknis yang meliputi titik distribusi, kapasitas gudang berpendingin, kapasitas kendaraan berpendingin, jumlah dan status dokter hewan, risk management, serta realisasi 2024 cut off 23 Agustus 2024.
- d. Stranas KPK mengapresiasi penghitungan yang dilakukan oleh Bapanas karena dinilai sudah transparan dan akuntabel. Namun disarankan proses penghitungan bisa dilakukan menggunakan sistem aplikasi untuk menambah nilai akuntabilitas.

2. Pertemuan Koordinasi Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan ini bertujuan untuk bersinergi dan menyamakan persepsi terkait penyusunan proyeksi neraca pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, serta tata cara pelaporan output proyeksi neraca pangan pada aplikasi. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah,

serta dihadiri oleh petugas penyusun proyeksi neraca pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa narasumber yang berasal dari BULOG Divisi Regional Kalimantan Tengah, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat serta Perwakilan dari Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional. Turut mengundang pula perwakilan BI Kalimantan Tengah sebagai moderator. Hasil rapat diperoleh rumusan sebagai berikut:

1. Penyusunan proyeksi neraca pangan menjadi kewajiban untuk organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinta di bidang pangan baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pangan sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22/2023 tentang tata cara penyusunan proyeksi neraca pangan.
2. Tim Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional menjelaskan cara penyusunan proyeksi neraca pangan dan cara penginputan data proyeksi neraca pangan ke dalam aplikasi yang terbaru untuk semua komoditas.
3. Dukungan dari Kepala Dinas Pangan, Gubernur, Walikota dan Satgas Pangan juga dibutuhkan dalam mempermudah enumerator Provinsi dan Kabupaten/Kota mendapatkan data baik itu lintas Dinas maupun untuk mendapatkan data dari pihak distributor, asosiasi dan tempat lain yang dapat mendukung untuk mendapatkan data.
4. Rencana Tindak Lanjut: Provinsi Kalimantan Tengah dan kab/kota akan mulai melakukan penginputan data pada aplikasi proyeksi neraca pangan serta perlu peran Bapanas dalam menjembatani antara Enumerator Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Pangan, Gubernur.

3. Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2024

Pertemuan dilaksanakan secara online melalui aplikasi *zoom meeting* pada tanggal 5 September 2024. Pertemuan ini bertujuan sebagai tindak lanjut pasca peluncuran aplikasi baru Proyeksi Neraca Pangan, serta untuk menyamakan persepsi terkait penyusunan proyeksi neraca pangan dan tata cara penginputan pada aplikasi. Pertemuan dipimpin oleh Koordinator Neraca Pangan dan dihadiri oleh Tim Neraca Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas secara offline, serta dihadiri secara online oleh perwakilan dinas ketahanan pangan Provinsi dan

Kab/Kota dari wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Poin-poin utama yang diperoleh dalam hasil Bimtek adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian tata cara penggunaan aplikasi proyeksi neraca pangan, meliputi penyampaian fitur-fitur panel antar muka/beranda, infografis, dan peta, serta penyampaian menu-menu pada aplikasi, dan tata cara penginputan proyeksi neraca pangan pada aplikasi.
2. Petugas penanggung jawab neraca pangan wajib melakukan input di aplikasi maksimal pada tanggal 10 untuk update realisasi bulan sebelumnya.
3. Dokumen yang diupload saat input di aplikasi, meliputi: Surat pengesahan disertai lampiran laporan update realisasi proyeksi neraca pangan yang telah ditanda tangan oleh Kepala Dinas dan - Template excel laporan yang telah disediakan dalam aplikasi dan diisi sesuai ketentuan.
4. Pengisian template excel laporan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Penulisan isi laporan menggunakan format angka dan tidak mengandung formula/rumus serta notes. Tidak mengubah atau menghapus penulisan header kolom. Pengisian data hanya pada kolom/komponen yang diminta karena sebagian komponen telah otomatis terhitung dalam system.
5. Rencana Tindak Lanjut: Petugas Kab/Kota mulai melakukan penginputan update realisasi neraca pangan Bulan Agustus 2024 di aplikasi Proyeksi Neraca Pangan yang baru dan melaporkan pada tim pusat apabila menemukan kendala atau perbedaan hasil antara perhitungan manual dan hasil pada aplikasi

4. Rapat pembahasan Komitmen dan Kriteria Pemasukan Daging Kerbau Melalui Mekanisme Penunjukkan Pelaku Usaha Lainnya

Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 di Badan Pangan Nasional, dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati komitmen dan kriteria penugasan pemasukan daging kerbau dalam hal tertentu dengan 19 pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan teknis dan K/L terkait. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Assisten Deputi Pengembangan Agribisnis dan Peternakan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Perwakilan Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan LNSW dan

Perwakilan dari 19 Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan teknis. Poin dalam hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha yang layak mendapatkan penunjukan pemasukan daging kerbau dalam hal tertentu adalah pelaku usaha yang layak persyaratan teknis sesuai Permentan No.17 Tahun 2022, serta memenuhi kriteria dan indikator berupa: (1) Kesanggupan dan Komitmen; dan (2) Penilaian Kemampuan Perusahaan.
- b. Kriteria dan indikator tersebut akan digunakan dalam penghitungan alokasi volume yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, serta disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis di Kemenko Bidang Perekonomian.
- c. Pelaku Usaha yang akan diikutsertakan dalam penghitungan hanya yang mengirimkan Surat Pernyataan sampai batas waktu yang ditentukan.
- d. Rencana Tindak Lanjut:
 1. Pelaku Usaha yang menyanggupi komitmen yang dipersyaratkan akan mengirimkan Surat Pernyataan ke Bapanas melalui email sesuai batas waktu yang ditetapkan.
 2. Badan Pangan Nasional melakukan penghitungan alokasi ke masing-masing Pelaku Usaha yang mengirimkan Surat Pernyataan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

5. Pemantauan Lapangan ke Importir Daging Lembu PT. Anzindo Gratia International

Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 berlokasi di Jakarta Barat. Pemantauan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait proses dan realisasi impor, stok dan distribusi daging lembu regular. Pemantauan dilaksanakan oleh perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional dengan Direktur dan staf dari PT. Anzindo Gratia International dengan diawali diskusi terkait proses bisnis impor daging lembu dan dilanjutkan dengan pemantauan ke Gudang penyimpanan daging lembu. Hasil pertemuan pemantauan ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Anzindo Gratia International dominan mengimpor bagian daging secondary cut seperti bagian paha depan, paha belakang dan iga lembu yang diimpor dari Australia, New Zealand, Spanyol dan US.
2. PT. Anzindo Gratia International pada tahun 2023 mendapatkan alokasi impor sebesar 14.515 ton dan realisasi sebesar 87.195 ton (49,57%), sementara tahun

2024 mendapatkan alokasi impor sebesar 5.962,8 ton dan sampai bulan Agustus sudah terealisasi sebesar 2.699 (45,26%). Saat ini stok yang ada di Gudang penyimpanan yaitu 328,76 ton.

3. Sistem pendistribusian PT. Anzindo Gratia International dengan metode FIFO (first in, first out) dan Sebagian besar didistribusikan ke distributor di daerah Jabodetabek.
4. Untuk tahun 2025, PT. Anzindo Gratia International mengajukan alokasi sebesar 10.000 ton dan harapannya dapat disetujui.
5. Rencana Tindak Lanjut: PT. Anzindo Gratia International akan segera merealisasikan sisa alokasi impor tahun 2024 dan hasil pemantauan akan dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan alokasi impor daging lembu.

6. Pemantauan Lapangan ke Importir Daging Lembu PT. Dua Putra Perkasa Pertama

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 6 September di Bekasi. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait proses dan realisasi impor, stok dan distribusi daging lembu regular di importir. Point-point hasil pertemuan sebagai berikut:

1. PT. Dua pUtra Perkasa Pertama (PT. DPP) merupakan pelaku usaha yang melakukan impor daging lembu kebutuhan konsumsi regular dari negara asal Australia dan New Zealand dengan estimasi waktu pengiriman 10-20 hari dari Australia dan 1-2,5 bulan dari wilayah Eropa.
2. Pada tahun 2024 Perizinan Impor (PI) PT DPP sebesar 12.680 ton dan Direktorat Ketersediaan Pangan 13 hingga 6 September 2024 realisasi sebesar 9.730,66 ton dan didistribusikan ke daerah Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jambi, dan DI Yogyakarta.
3. Kendala yang dihadapi PT DPP dalam impor daging lembu, yaitu Izin impor (PI) terbit terlambat, pengelompokan daging berdasarkan kode HS terlalu banyak, rantai izin yang terlalu Panjang, formulasi alokasi impor tahun 2024 awal tidak sesuai kebutuhan, ada ketidaksesuaian klasifikasi kode HS di bea

cukai dengan Kementan dan Kemendag, Penerapan sistem border di Pelabuhan import terkait sertifikat halal oleh BPJPH yang akan diberlakukan tanggal 17 Oktober 2024, sedangkan lembaga/Instansi pendukung belum siap.

4. Kendala distribusi, yaitu aturan di daerah tujuan yang tidak menerima daging impor, adanya pengulangan pemeriksaan oleh karantina domestik, registrasi produk hewan yang mensyaratkan COA dari luar negeri.
5. Estimasi proyeksi kebutuhan daging lembu konsumsi reguler PT DPP tahun 2025 akan meningkat sebesar 30% dengan perkiraan kebutuhan sebesar 20.000 ton.
6. Saran dan masukan agar proses perizinan dipersingkat sehingga PI dapat keluar di bulan Desember, kode HS diglobalkan menjadi 2 (daging dan jeroan), sinkonisasi data antar lembaga/instansi pemerintah, dan membatalkan rencana sistem border impor daging.
7. Rencana tindak lanjut: Merealisasikan sisa impor di tahun 2024. Hasil pemantauan akan dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan alokasi impor daging lembu selanjutnya.

7. Pemantauan Lapangan ke Importir Daging Lembu PT. Permata Cemerlang Abadi (PT.PCA)

Pemantauan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 di Kota Tangerang. Tujuan pemantauan ini untuk memperoleh data dan informasi terkait realisasi impor, stok, dan distribusi daging lembu di importir. Hasil pemantauan adalah sebagai berikut:

1. PT. PCA merupakan perusahaan importir daging lembu sejak tahun 2017 yang memiliki gudang penyimpanan di daerah Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai, Blok E No.8, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang Indonesia. Memiliki dua gudang pendingin yaitu gudang chiller dengan suhu -5 derajat celcius dengan kapasitas 50-100 Ton dan gudang freezer dengan suhu -25 derajat celcius dengan kapasitas 300 Ton.
2. PT. PCA mengimpor daging lembu melalui supplier langsung dan juga trader dari beberapa negara yaitu Australia, New Zealand, dan USA. Pengiriman daging lembu dari negara asal bergantung pada jadwal produksi atau pemotongan pada negara asal yang dapat memakan waktu hingga 3 – 4 bulan.

Tempat pemasukan impor daging lembu PT. PCA melalui udara terdapat di Bandara Soekarno Hatta, dan melalui jalur laut terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok.

3. PT. PCA mendistribusikan daging langsung ke distributor besar tanpa melakukan perubahan ukuran ke daging yang lebih kecil. Wilayah distribusi daging PT. PCA terdapat di Jabodetabek dan Sumatera.
4. PT PCA pada tahun 2023 mendapatkan izin terbit sebesar 13.300 Ton sebesar 9.186 Ton. Izin terbit untuk 2024 sebesar 10.807 Ton dan realisasinya sebesar 6.597 Ton. Sisa Stock digudang (per tanggal 6 September 2024) sebesar 64.571 kg.
5. Untuk rencana kebutuhan impor daging lembu pada tahun 2025, PT. PCA menargetkan alokasi impor 30% lebih banyak dari realisasi tahun sebelumnya.
6. PT. PCA mengharapkan untuk alokasi impor tahun berikutnya tidak dibatasi per kode HS kecuali untuk kode HS jeroan. Apabila kuota impor untuk daging tidak dibatasi per kode HS daging maka PT. PCA dapat lebih leluasa untuk merealisasikan impor sesuai dengan ketersediaan bagian-bagian daging di supplier dan kondisi permintaan pasar.
7. Rencana Tindak Lanjut: PT. PCA akan segera merealisasikan sisa alokasi impor tahun 2024.2. Hasil pemantauan akan dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan alokasi impor daging lembu selanjutnya

8. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Pertemuan penyusunan laporan NBM dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024 di Hotel Aston Simatupang. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun dan mengkonfirmasi data-data dari K/L terkait untuk penyusunan laporan NBM Tahun 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, serta dihadiri oleh FAO Indonesia, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kelautan BPS, Direktorat Analis dan Pengembang Statistik BPS, Direktorat Statistik Industri BPS, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata BPS, Direktorat Statistik Distribusi BPS, Direktorat Impor dan Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Pusdatin Kementan, Direktorat Budidaya Sereal dan Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman

Pangan Kementan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, dan Direktorat Penganebagaran Konsumsi Pangan Bapanas, serta tim pokja Neraca Pangan Dit.Ketersediaan Pangan Bapanas. Rumusan yang diperoleh dalam pertemuan penyusunan NBM adalah:

- a. Update data tahun 2022I, 2023, dan 2024 dari masing-masing K/L: 2) Rencana pembuatan NBM bulanan yang disesuaikan komoditas nya dengan proyeksi; 3) Direktorat Ketersediaan Pangan 17 NBM Prediksi (Proyeksi data produksi, ekspor dan impor, angka jumlah wisatawan)
- b. Perwakilan Direktorat Ekspor Kemendag mengkonfirmasi bahwa data 2022 dan 2023 tidak jauh berbeda, sedangkan untuk data realiasi ekspor tahun 2024 masih dalam tahap verifikasi dan koreksi karena terdapat peningkatan angka realisasi ekspor yang sangat signifikan di bulan Juni, sehingga perlu konfirmasi kembali dengan inatrade.
- c. BPS Statistik Industri mengkonfirmasi bahwa untuk data IBS, pada tahun 2023, 2024, dan 2025, BPS Statistik Industri akan melakukan sampel dan tahun 2026 akan dilakukan sensus. Angka tetap IBS tahun 2022 akan keluar di awal Desember 2024. Data IMK tahun 2023 akan rilis di akhir September 2024. Untuk data tahun 2024 berupa data proyeksi yang akan dibahas terlebih dahulu dengan internal (IMK dan IBS).
- d. Terdapat beberapa komoditas yang tidak tercover datanya pada data Susenas, khususnya untuk jenis-jenis komoditas pada buah-buahan dan sayuran. Sehingga jika ingin menyarankan untuk dimasukkan ke dalam survei Susenas dapat bersurat langsung ke BPS.
- e. Rencana Tindak Lanjut: Direktorat Ketersediaan Pangan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) agar dapat menyediakan dukungan data konsumsi AKABI untuk kepentingan penyusunan NBM. KKP akan mengecek kembali data real.

9. Pemantauan Ketersediaan Stok Telur Ayam

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Ruang Rapat Nusantara Direktorat Ketersediaan Pangan. Tujuan rapat ini untuk mengetahui ketersediaan stok telur di setiap daerah sentra produksi. Rapat dipimpin oleh

Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Perwakilan dari asosiasi dan pelaku usaha komoditas telur. Hasil pertemuan pemantauan adalah sebagai berikut:

- A. KUPS Kendal memiliki jumlah anggota 1768 peternak yang terdiri dari 11 kabupaten, dengan jumlah populasi 13.700 dan rata rata produksi telur sebesar 750 ton/hari.
- B. PPN Lampung memiliki 1.500 peternak yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, dengan jumlah populasi 14 juta, dan produksi telur yang dihasilkan sebanyak 450-500 ton per hari per provinsi sehingga produksinya menjadi surplus 80-100 ton. Untuk wilayah provinsi Lampung daaerahnya menjadi penyangga stok di Kota Jakarta, selain menjadi penyangga Jakarta dijadikan juga untuk pemasaran ke wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
- C. Koperasi Putera memiliki anggota 600 peternak dengan hasil produksi telur di distribusikan sebesar 60% untuk Jakarta dan 40% sisanya ke daerah lainnya di wilayah Indonesia
- D. PPRN Blitar memiliki 586 peternak dengan jumlah populasi sebanyak 4 juta, dan hasil produksi telur sebanyak 205 ton/hari. Untuk UMKM sebanyak 500-20.000 ekor. kebutuhan Nasional 30% di suplai dari wilayah Blitar. Selain itu 5 ton produksi telur lainnya dikirim ke wilayah Jawa Barat
- E. Koperasi Berkah Telur Blitar memiliki anggota 120 tersebar di beberapa wilayah, produksi telur yang dihasilkan sebanyak 38 ton/hari
- F. Saran dari asosiasi dan para pelaku usaha terhadap BAPANAS antara lain sebagai berikut: BAPANAS diharapkan dapat memfasilitasi dalam proses pendistribusian antar wilayah dan pulau. Terutama untuk wilayah yang mengalami oversupply. Terkait pendataan mengenai stok untuk selanjutnya bisa bekerjasama dengan BPS dan PKH agar telur dan daging ayam dapat dimasukkan dalam sensus pertanian atau peternakan supaya dapat ditentukan kebutuhan dan cadangan jagung pemerintah
- G. Rencana Tindak Lanjut : Akan dilakukan kunjungan sentra produksi telur ke Blitar dan Kendal serta melakukan sosialisasi tentang tata cara pengisian aplikasi pergudangan.

10. Rapat Koordinasi Pemantauan Ketersediaan Stok Bawang Merah

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 melalui Zoom Meeting di ruangan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan pelaporan informasi terkait ketersediaan stok bawang merah dari Champion Bawang Merah serta dalam rangka memperkenalkan Sistem Aplikasi Pelaporan Pemantauan Ketersediaan Stok Pangan. Rapat dibuka oleh Ketua Tim Pokja Pengawas Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh Champion bawang merah dari Kabupaten Garut, Kabupaten Kendal, Kabupaten Solok, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Brebes. Hasil Rakor adalah; Sampai saat ini bawan

- a) Berdasarkan informasi dari Champion, kondisi ketersediaan bawang merah saat ini masih mencukupi kebutuhan nasional hingga akhir tahun 2025. Data ketersediaan bawang merah yang tercatat di ABMI sebesar 1.890.000 Ton dan sudah terserap sebesar 1.450.000 ton. Terdapat kenaikan produksi nasional sekitar 20% akibat bantuan yang didapatkan dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian untuk menambah cadangan pangan pemerintah.
- b) Champion Kabupaten Garut menyampaikan bahwa saat ini membina 15 kelompok tani. Kondisi ketersediaan bawang merah saat ini difokuskan untuk bibit di musim hujan. Champion Garut mendistribusikan bawang merah ke wilayah Jawa Barat, PIKJ, dan khusus Temanggung untuk persiapan bibit.
- c) Champion Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa terdapat penurunan produksi dikarenakan akhir Juni – September merupakan masa tanam di wilayah tersebut
- d) Champion Kabupaten Solok sudah menyusun rencana tanam dan produksi sepanjang tahun 2024. Produksi bawang merah di Solok per September 16.167 ton. Pola tanam bawang merah di Solok berbeda dengan wilayah lain, yaitu tanam dan panen setiap hari sehingga ketersediaan bawang merah dalam kondisi surplus dan dapat mendistribusikan bawang merah ke wilayah Sumatera dan sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Solok merasakan dampak adanya penurunan harga bawang merah di tingkat petani akibat panen raya di Pulau Jawa
- e) Champion Kabupaten Enrekang menyampaikan saat ini masih dalam pengelolaan lahan untuk tanam bawang merah diakibatkan serangan hama

penyakit. Biasanya Enrekang memasuki musim tanam pada bulan September – April, namun untuk tahun ini baru akan mulai tanam di Oktober dan rencana panen di Desember. Champion Enrekang membina 31 kelompok mitra dengan produktivitas 13 – 15 Ton per ha, rata-rata luas panen 20-30 ha atau produksi sekitar 8.060 Ton konde basah. Bawang merah di didistribusikan ke Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Champion Enrekang mengharapkan adanya bantuan fasilitas gudang dari pemerintah untuk mengelola stok hasil panen bawang merah

- f) Rencana Tindak Lanjut: Champion bawang merah diharapkan mengirimkan pelaporan ketersediaan stok setiap bulan.

11. Rapat Koordinasi Ketersediaan Bawang Merah dan Cabai

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 di ruang rapat Badan Pangan Nasional. Pertemuan bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait dengan ketersediaan bawang merah dan cabai bersama dengan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) dan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI). Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan, dihadiri oleh Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian dan Tim Kerja Pengawasan Ketersediaan Pangan. Hasil pertemuan sebagai berikut:

- a) Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) menyampaikan bahwa harga cabai terus melandai turun kondisi ini karena produksi selalu ada namun tidak diikuti daya beli masyarakat. Dengan adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) kelebihan produksi ini dapat tersalurkan ke daerah yg membutuhkan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang baik untuk meningkatkan distribusi cabai antar daerah mengingat cabai merupakan komoditas yang mudah rusak dan sulit untuk disimpan. Disaat musim kemarau perlu adanya bantuan untuk petani cabai seperti drip irigasi, hal ini dapat membantu petani untuk terus melakukan pertanaman ketika kekeringan
- b) Direktorat Sayuran dan Tanaman obat menyampaikan bahwa Champion Cabai atau Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) binaan Kementerian Pertanian beranggotakan 20 anggota champion yang tersebar di Solok, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Sumedang, Banjarnegara, Kebumen,

Wonosobo, Magelang, Semarang, Temanggung, Kulon Progo, Sleman, Malang, Banyuwangi, Lombok Timur, dan Enrekang. Pengembangan kawasan cabai untuk para champion cabai sebagai penyanggah stok dengan luasan 2.800 Ha, bantuan greenhouse sederhana untuk champion cabai dengan luas 1.000 m², dan alokasi sumur dangkal untuk wilayah Jawa Timur (wilayah sentra cabai) yang mengalami kekeringan. Bantuan untuk para champion cabai meliputi pupuk NPK, mulsa, dan handpsayer.

- c) Komitmen champion cabai ketika harga mengalami kenaikan adalah sebesar 3.900 ton. Berdasarkan angka konversi dengan Kawasan cabai luasan tanam 2.800 Ha dan rata-rata produktivitas nasional 8 ton/ha, maka produksi cabai yang dihasilkan Direktorat Ketersediaan Pangan 23 sebesar 22.000 ton. Pengawasan terkait dengan komitmen stok dari Champion cabai melalui pelaporan secara berkala.
- d) Terdapat 10 kabupaten dengan luas panen terbesar pada bulan September 2024 berdasarkan luas tanam Juli yaitu Kab. Nganjuk, Kab. Bima, Kab. Brebes, Kab. Solok, Kab. Probolinggo, Kab. Bantul, Kab. Enrekang, Kab. Malang, Kab. Dompu, dan Kab. Majalengka dengan total perkiraan luas panen sebesar 9.121 ha
- e) Usulan dari ABMI mengharapkan realisasi kerjasama dengan BUMN karena sampai saat ini belum ada realisasi terkait dengan penyerapan bawang merah

12. Pelatihan Forecasting Proyeksi Neraca Pangan

Pertemuan dilaksanakan di RR. Gedung Serbaguna BSIP pada Kamis, 12 September 2024. Pertemuan ini bertujuan memberikan pelatihan dasar terkait cara melakukan pelatihan forecasting/peramalan data untuk mendukung penyusunan proyeksi neraca pangan dan menganalisis keterkaitan dengan harga pangan. Pertemuan dipimpin oleh Koordinator Neraca Pangan dan dihadiri oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Rasidin Karo Karo S, S.P., M.Si, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional. Hasil pelatihan sebagai berikut:

- a) Forecasting data dapat dilakukan menggunakan prosedur ARIMA atau VARMAX. ARIMA dapat digunakan untuk forecast data dengan satu variabel, sedangkan VARMAX untuk forecast data dengan variabel lebih dari satu

- b) Prosedur ARIMA dilakukan dengan cara: 1) Identifying yaitu mengidentifikasi pola data apakah data sudah stasioner atau belum, apabila data belum stasioner bisa dilakukan diferensiasi. 2) Fitting yaitu estimasi model yang sesuai dengan data (dalam hal ini melihat p atau derajat autoregressive dan q yaitu derajat moving average; 3) Checking yaitu memeriksa gambar dan kriteria statistika dari data yang dihasilkan ($Pr < \tau = < 0,05$), dan membandingkan skor AIC SBC dengan memilih model dengan skor AIC SBC terkecil; 4) Setelah didapatkan model ARIMA yang sesuai kriteria statistika, maka dapat dilakukan running untuk mendapatkan forecast data
- c) Prosedur VARMAX dilakukan dengan cara menetapkan DFTEST untuk melihat apakah data tersebut sudah stasioner, apabila belum stasioner maka perlu dideferensiasikan dengan DIFY, kemudian memeriksa gambar dan kriteria statistika dari data yang dihasilkan ($Pr < \tau = < 0,05$). Setelah didapatkan model VARMAX yang sesuai kriteria statistika, maka dapat dilakukan running untuk mendapatkan forecast data
- d) Hasil data forecast lebih baik tidak melebihi 5 data kedepan, karena semakin banyak data yang dihasilkan maka akan menjadi kurang akurat
- e) Evaluasi pada kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yaitu butuh waktu lama pada proses penginstalan aplikasi dan butuh pemahaman konsep awal sebelum memilih metode yang sesuai dengan data-data yang ingin diproyeksikan serta dianalisis, sehingga pada waktu pelatihan output yang dihasilkan hanya sampai pada latihan pengolahan data sederhana dengan 1 variabel
- f) Tindak Lanjut: Agar kegiatan forecast lebih tepat sasaran dan analisis hasil forecast lebih akurat maka dibutuhkan pelatihan lebih lanjut yang sebelumnya harus diidentifikasi data-data yang akan diforecast dan merumuskan indikator-indikator yang ingin dianalisis.

13. Rapat Koordinasi Pembahasan RKAKL dan TOR Tahun 2025 dan Revisi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 di Gedung A BB Biogen, Kota Bogor. Tujuan rapat ini untuk membahas KAK/TOR kegiatan Tahun 2025 dan penyusunan RAB anggaran 2025 serta revisi anggaran 2024 dari dana

dekonsentrasi. Rapat dihadiri oleh Ketua Tim Pokja, Tim Keuangan di lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan. Hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

- a) Direktorat Ketersediaan Pangan akan melakukan penarikan dana dekonsentrasi terhadap daerah yang tidak dapat merealisasikan dana dekonnya atau yang serapan terhadap dana dekonnya rendah dan akan ditarik ke pusat.
- b) Dana dekon yang berpotensi untuk ditarik ke pusat sebesar 490 juta yang di dapat dari 5 Daerah, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Penarikan dana dekonsentrasi terkait dengan belum adanya realisasi anggaran sampai dengan bulan september dan juga alasan teknis pencairan.
- c) Telah dilakukan penyusunan KAK/TOR untuk RO Rekomendasi kebijakan, koordinasi/sosialisasi/monev, dan NSPK
- d) Rencana Tindak Lanjut: Penyusunan RAB anggaran tahun 2025 utk RO koordinasi, NSPK dan data dan informasi dan akan dilakukan revisi anggaran 2024 dan penyusunan untuk alokasi anggarannya

14. Rapat Evaluasi Ketersediaan Stok Akhir Tahun 2024

Rapat dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 di Kantor Badan Pangan Nasional secara luring dan daring. Tujuan rapat ini untuk memperoleh informasi rencana realisasi impor daging lembu sampai tahun 2024 serta kendala yang dialami dalam proses realisasi serta distribusi. Rapat dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Direktur SPHP dan Perwakilan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Perwakilan PT. Berdikari, Perwakilan PT. PPI, dan Perwakilan Pelaku Usaha Daging Lembu. Hasil pertemuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan proyeksi neraca pangan tanggal 23 Agustus 2024, kebutuhan daging lembu tahun 2024 sebesar 774.410 Ton.
- b) Stok akhir tahun 2024 diupayakan mencapai 180.082 Ton untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3 bulan awal tahun 2025 serta HBKN yang diperkirakan jatuh pada bulan Februari - Maret.
- c) Harga daging lembu di Indonesia stabil, pada tanggal 13 September 2024 berada di angka Rp 134.440,-/Kg dan di bawah HAP daging lembu Rp 140.000,-/Kg. Harga tertinggi Rp 174.830,-/Kg di provinsi Papua Pegunungan dan harga terendah Rp 114.080,-/Kg di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- d) Penetapan NK daging lembu tahun 2024 sebesar 367.186 Ton, Persetujuan Impor (PI) yang sudah terbit sebesar 329.968 Ton, dan realisasinya sebesar 118.350 Ton atau sekitar 36% dari Persetujuan Impor (PI) yang sudah terbit.
- e) Penetapan NK daging lembu regular tahun 2024 sebesar 220.689 Ton, Persetujuan Impor (PI) yang sudah terbit sebesar 203.480 Ton, dan realisasinya sebesar 101.758 Ton atau sekitar 50,01% dari Persetujuan Impor (PI) yang sudah terbit.
- f) Berdasarkan data SINAS NK per tanggal 13 September 2024, terdapat 26 Perusahaan yang realisasinya sudah mencapai lebih dari 50% dan 35 Perusahaan yang realisasinya dibawah 50%.
- g) Nasional menghimbau kepada Pelaku Usaha agar dapat segera merealisasikan alokasi impor yang diberikan sampai bulan Desember sehingga stok akhir tahun 2024 dapat tercapai sesuai proyeksi neraca pangan.
- h) Direktur SPHP menyampaikan bahwa kendala yang dialami oleh Pelaku Usaha perlu dikoordinasikan dengan K/L terkait agar bisa diselesaikan. Selain itu berhubungan dengan program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih tahun 2024, Bapanas perlu mempertimbangkan buffer stok untuk mitigasi kebutuhan daging lembu.

15. FGD Ketersediaan Gula Nasional

Pertemuan dilaksanakan di Badan Pangan Nasional pada tanggal 20 September 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk mengantisipasi ketersediaan gula nasional sampai akhir tahun 2024 dan menjelang HBKN di awal tahun 2025. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Dr. Ir. Purwono, MS sebagai tenaga ahli, Ketua APTRI, Perwakilan AGI, Perwakilan GAPGINDO, Direktur IMHLP Kemenperin, Perwakilan Direktorat Bapokting Kemendag, Perwakilan Direktorat SPHP Bapanas, Perwakilan PT. GMM, Perwakilan PT. PSMI, Perwakilan PT. LPI, Perwakilan PT. PAG, Perwakilan ID Food, Perwakilan PT. SMS, Perwakilan PT. PNS, Perwakilan PT. IGN, Perwakilan PT. SGC, Perwakilan PT. KTM dan Perwakilan PT. RMI.

Saat ini terdapat sekitar 127.316 Ton izin impor GKM 2024 setara 120.950 Ton GKP yang diprediksi tidak dapat terealisasi tahun ini, dengan rincian izin impor masing-masing perusahaan sebagai berikut: PT. Pratama Nusantara Sakti = 35.000 Ton GKM Direktorat Ketersediaan Pangan 29 PT. Laju Perdana Indah PT. Gendhis Multi Manis = 20.000 Ton GKM = 6.000 Ton GKM PT. Rajawali Nusantara Indonesia

= 32.000 Ton GKM PT. Sinergi Gula Nusantara = 34.316 Ton GKM. Dengan kondisi izin impor gula 2024 yang diprediksi tidak dapat terealisasi sebesar 127.316 Ton GKM setara 120.950 Ton GKP, maka stok akhir tahun 2024 yang awalnya diproyeksikan sebesar 1,3 Juta Ton akan turun menjadi 1,2 Juta Ton. Diharapkan tidak ada shifting dari impor GKM menjadi GKP, karena saat ini harga lelang petani sedang bagus dan apabila dilakukan impor GKP akan berpengaruh pada psikologis petani untuk menanam tebu yang berdampak pada produksi gula tebu. Rencana Tindak lanjut: Hasil FGD ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan evaluasi neraca komoditas gula triwulan III tahun 2024.

16. Updating Proyeksi Neraca Pangan

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Hotel Aston Simatupang Convention Center. Tujuan pertemuan untuk menyusun updating Proyeksi Neraca Pangan tingkat nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunannya diperlukan kolaborasi yang baik dengan semua pihak terkait dan menyepakati proyeksi neraca pangan sebagai pijakan awal untuk menetapkan kebijakan ketersediaan pangan. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Ekspor Kemendag, Direktorat Serelia Kementan, Direktorat STO Ditjen Horti Kementan, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan Ditjenbun Kementan, Direktur Pakan Ditjen PKH Kementan, Direktorat STPHP BPS, Direktorat Statistik Distribusi BPS, Supply chain dan pelayanan publik Perum BULOG, Direktorat Kesmavet PKH Kementan, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin, serta observer dari perwakilan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, perwakilan Asdep Pangan Kemenko Ekon, Asdep Pengembangan Direktorat Ketersediaan Pangan 30 Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Ekon, perwakilan Penelitian dan Penelitian Ekonomika dan Bisnis UGM, Dinas Pangan Wilayah Prov. Jawa Barat, Banten dan Sumsel serta Lingkup fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan.

Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan September 2024, secara keseluruhan diperkirakan neraca/stok sampai dengan bulan September 2024 aman. Namun demikian untuk komoditas bawang putih, stok di bulan september hanya cukup untuk memenuhi 3 hari kedepan dan komoditas daging sapi/kerbau hanya cukup memenuhi 10 hari kedepan, sehingga diperlukan percepatan realisasi impor.

Rencana Tindak Lanjut : membuat rencana realisasi impor setiap bulannya sebagai komitmen pelaku usaha untuk dapat merealisasikan impor. Bapanas akan mengirimkan hasil updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan September 2024

17. Penyusunan Laporan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan September 2024

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 25 September di Ruang Rapat Gedung A BB Biogen, Kota Bogor. Tujuan pertemuan menyusun laporan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan September 2024 dan surat hasil update proyeksi neraca pangan bulan September yang akan disampaikan untuk Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan BPS. Pertemuan dipimpin oleh Koordinator Kelompok Neraca Pangan dan dihadiri oleh Koordinator Kelompok Ekspor Impor serta Kelompok Neraca Pangan. Hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

- a) Penyelesaian penyusunan laporan updating proyeksi neraca pangan bulan September, meliputi: penyusunan risalah rapat, penyusunan materi bahan tayang terkait update proyeksi neraca pangan, serta dan surat hasil update proyeksi neraca pangan bulan September yang akan disampaikan untuk Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan BPS
- b) Penginputan hasil update proyeksi neraca pangan bulan September 2024 kedalam aplikasi Proyeksi Neraca Pangan. Melakukan rekap presensi pengisian aplikasi proyeksi neraca pangan tingkat Provinsi dan Kab/Kota sampai dengan data realisasi Agustus
- c) Rencana Tindak Lanjut: menyiapkan surat terkait hasil update Proyeksi Neraca Pangan Bulan September 2024 yang telah dibuat, kemudian akan disampaikan kepada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebelum disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional.

18. Rapat Koordinasi Ketersediaan Telur Ayam dan Jagung di Peternak Mandiri Kabupaten Blitar

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 26 sd 27 September 2024, bertempat di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar.

Pertemuan bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi ketersediaan stok telur ayam dan jagung di pelaku usaha serta informasi terkini di kabupaten Blitar. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Blitar, Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Blitar, Koperasi Putera Blitar, UD Wahyu Sanjoyo; Koperasi PPN Blitar, Koperasi Srikandi; Koperasi PPRN Blitar, dan Rumah Kebersamaan Peternak Layer Direktorat Ketersediaan Pangan 32 Mandiri BKT NT.

Kabupaten Blitar merupakan sentra produksi telur ayam yg memberikan kontribusi nasional sebesar 60%. Walaupun ketersediaan telur ayam tersedia cukup banyak, namun angka PoU Kabupaten Blitar masih tinggi sebesar 10,96 (standar <5) yang mengindikasikan bahwa konsumsi protein penduduk masih kurang. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah dan koordinasi antar stakeholder untuk memperbaiki masalah data tersebut. Koperasi Peternak Blitar, menyampaikan bahwa produksi telur meningkat ketika menggunakan jagung asal dari Bima karena memiliki kualitas jagung yg baik dgn kadar air 13-15% dibandingkan dengan jagung lokal dengan Asosiasi PPRN Kab. Blitar, menyampaikan bahwa saat ini anggotanya kurang lebih ada 100 orang dalam satu hari mampu kirim telur kurang lebih 1.000 ton dengan area pengiriman ke wilayah Jakarta mencapai 60%, sementara ke area Jawa tengah 40%, dan lainnya ke luar pulau sebanyak 10-20%. Asosiasi ini memiliki armada pengiriman ke wilayah Jawa Timur, meliputi Banyuwangi, Tuban, dan Madura minimal 150 armada per hari, dengan kapasitas setiap armada adalah 2 ton dengan omset sekitar 25 juta per hari. Terkait jagung, peternak menengah bisa menyediakan cadangan jagung untuk sendiri selama 3-4 bulan KA 16-17%. Produksi telur dengan pakan jagung lokal biasanya hanya mampu 80-86% sedangkan dengan pakan jagung dari Bima bisa mencapai 98%. Perbandingan jagung lokal dengan Bima, katena kebiasaan panen di Bima adalah 170-200 hst sedangkan di Blitar jagung umur 90 hst sudah dipanen sehingga kadar airnya masih tinggi. Selain itu, kualitas nutrisi jagung dari Bima juga lebih bagus karena kesesuaian masa panennya. Masalah lain Direktorat Ketersediaan Pangan 33 yang ada di produksi jagung di Blitar adalah (hampir 70% produksi jagung merupakan pembenihan, dan 30% lainnya dibagi antara pakan ayam dan pakan sapi yang dimakan sekalian tebon tanamannya). Produksi telur untuk mencapai BEP peternak pada bulan ke-8. Ayam sudah mulai tidak dapat

produksi pada umur 90-105 minggu. Rencana tindak lanjut: pelaku usaha telur di kabupaten Blitar akan menyampaikan laporan setiap bulannya.

1.2. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

Hasil monitoring kegiatan prioritas Direktorat SPHP selama bulan September tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan. Kegiatan fisik Pemantapan Ketersediaan dan SPHP yang dilaksanakan oleh Direktorat SPHP yang mendukung kegiatan tersebut pada periode bulan September 2024 antara lain:

A. Regulasi SPHP

1. Diskusi Bersama BPKP terkait Evaluasi Syabilisasi Harga Pangan

Diskusi bertempat di Ruang Rapat Deputi KSP Bapanas Gedung E Lt 6, dipimpin oleh Koordinator Tim Kebijakan Harga Konsumen serta dihadiri oleh tim BPKP dan tim Dit. SPHP Bapanas. Diskusi mengenai lingkup kerja Dit. SPHP secara keseluruhan, terkait evaluasi stabilisasi harga. Terkait regulasi yang digunakan untuk menentukan harga komoditas para Mitra GPM, BPKP akan melakukan crosscheck terkait alat pemantauan kegiatan GPM (lampiran volume jual, harga jual, total omzet, dsb). BPKP membutuhkan data terkait surat koordinasi dengan ID FOOD untuk pelaksanaan kegiatan GPM di daerah. BPKP membutuhkan data panel harga pangan dari tanggal 20 Mei-30 Agustus 2024, data harian per Provinsi.

2. Entry Meeting dan Uji Petik BPK RI di Jawa Barat

Entry Meeting Uji Petik BPK RI di Jawa Barat dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Senin 2 September 2024. Kegiatan dihadiri Wakil Penanggung Jawab 2 BPK, Ketua Tim dan anggota BPK, Direktur SPHP, Kadis DKPP Kota Cirebon, Kadis DKPP Kab. Cirebon, perwakilan Biro KPU, perwakilan Dit. KP, perwakilan Dit. DCP, serta para pegawai PJ Kegiatan terkait Ketersediaan dan Stabilisasi Harga serta produksi pertanian dari DKPP Kota Cirebon dan DKPP Kab. Cirebon. Tujuan kegiatan untuk memverifikasi dan mendapatkan informasi di lapangan terkait pemeriksaan pendahuluan kinerja atas pemantapan ketersediaan serta stabilitas pasokan dan harga pangan tahun 2023 s.d semester I 2024. Poin utamanya terkait kegiatan neraca pangan, CPPD dan Panel Harga Pangan. BPK RI berharap mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga menemukan titik kritis pada kegiatan pemantapan ketersediaan serta stabilitas

pasokan dan harga pangan yang bisa menjadi dasar untuk evaluasi program ketahanan pangan.

3. Forum Cabai Nasional Tahun 2024

Forum Cabai Nasional 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 September 2024 di Jakarta. Forum dibuka oleh Menteri Pertanian yang diwakili Plt Sekjen Kementerian Pertanian dan dihadiri Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kabag Perencanaan Itjen Kemendagri, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Ketua Pokja Sayuran Buah Kementerian Pertanian dan Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia selaku narasumber dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait serta praktisi dan pelaku Cabai. Kegiatan ini mengusung tema Strategi pengamanan ketersediaan komoditas cabai mendukung pengendalian inflasi nasional dan Dukungan sektor terkait dalam penyediaan cabai antar waktu dan antar wilayah. Direktur SPHP Bapanas menyampaikan strategi pengendalian pasokan dan harga cabai melalui optimalisasi cadangan cabai pemerintah dan dukungan fasilitasi distribusi pangan (FDP).

Kabag Perencanaan Itjen Kementerian Dalam Negeri menyampaikan dukungan kebijakan terhadap peningkatan produksi cabai melalui Surat Mendagri No. 500.2.5/1732/IJ tanggal 17 Agustus 2024 tentang atensi atas pemenuhan kebutuhan champion cabai. Atensi kepada Pemda meliputi : menyiapkan offtaker pedagang besar , melakukan contract farming dengan para champion, menyiapkan calon lahan dan calon petani untuk dibina oleh champion, memfasilitasi tersedianya gudang penyimpanan dan cold storage, optimalisasi APBD untuk pengendalian inflasi (termasuk BTT) dan Pemda memberikan bantuan transportasi.

Kementerian Pertanian menyampaikan neraca cabai nasional meliputi produksi nasional 2023 sebanyak 1.506.762 ton, kebutuhan nasional 2024 sebanyak 988.280 ton dan neraca 518.482 ton, akan tetapi kendala yang dihadapi dalam neraca cabai adalah sebaran sentra produksi yang tidak merata serta komoditas cabai tidak bisa disimpan lama serta adanya kendala agroklimat. Hal inilah yang menyebabkan harga cabai fluktuatif. Usulan yang diberikan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga cabai yaitu skema penyiapan supply cabai ke wilayah minus bekerjasama dengan champion dan sentra dan skema penyediaan buffer stock cabai (standing crop).

4. Rapat Koordinasi SPHP Kedelai

Rakor merupakan tindak lanjut Rakor SPHP Kedelai di Tingkat Petani yang dilaksanakan pada hari Minggu, 1 September 2024 terkait panen raya kedelai khususnya di Jawa Tengah yang sudah, sedang dan akan berlangsung, serta mencermati kondisi harga kedelai di petani yang rendah (Rp 8.500-8.700/kg), jauh dibawah harga acuan Pemerintah atau harga kedelai impor di tingkat importir.

Panen raya kedelai lokal agar dijaga harga jangan sampai jatuh, yang dapat mengakibatkan petani rugi serta dapat mengganggu stabilisasi nasional. Untuk itu diharapkan agar para pelaku usaha kedelai (gakoptindo dan importir) agar dapat membantu menyerap kedelai lokal agar petani tidak mengalami kerugian. Kopti Bogor akan menyerap 30 ton, pada hari ini, Jumat (6/9) akan trial pembelian 10 ton. Gakoptindo akan membantu menambah jaringan pemasaran kedelai lokal dengan mengkoordinasikan dan menginventarisir volume kebutuhan Kopti selindo yang selama ini membutuhkan kedelai lokal.

PT. FKS dan PT. GCU pada prinsipnya siap menyerap produksi kedelai lokal (PT FKS sejak 2023 sudah menyerap kedelai lokal dan dijual ke pengrajin tempe tahu), khususnya dengan mempertimbangkan kualitas/mutu kedelai yang selama ini kurang diperhatikan.

Kementan menyampaikan perkiraan produksi kedelai tahun 2024 sekitar 150 ribu ton atau sekitar 5% dari kebutuhan Nasional 3 juta ton, turun dari tahun 2023 sekitar 300 ribu ton. Produksi 2024 tersebar di wilayah sentra (Jawa, NTB dan Sulteng). Kementan akan memetakan lokasi sentra, waktu panen, perkiraan produksi masing-masing wilayah, kontak petani/poktan/gapoktan dan informasi. Tindak lanjut: 1) Kementerian Pertanian melalui Direktorat AKABI akan menyiapkan data gapoktan kedelai (by name, by andreas dan by HP) untuk selanjutnya dapat dihubungkan dengan pelaku usaha berbahan baku kedelai, 2) Dukungan sarana dan prasarana pasca panen akan dikoordinasikan dengan kementerian pertanian untuk selanjutnya dapat difasilitasi dan 3) Gakoptindo akan melaksanakan rakor dengan anggota KOPTI seluruh Indonesia untuk dilakukan mapping kebutuhan kedelai lokal untuk selanjutnya dihubungkan dengan sentra produksi kedelai lokal (data Kementan) di wilayah masing-masing KOPTI.

5. Evaluasi Stabilisasi Perunggasan Nasional

Rapat dilakukan secara hybrid di Ruang Rapat Utama 1 Dirjen PKH Kementan, dipimpin oleh Direktur Bitpro Kementan serta dihadiri oleh perwakilan Satgas Pangan Polri; perwakilan Asdep Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian; perwakilan Dit. SPHP Bapanas; Dinas yang menangani urusan Peternakan Prov. Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Jakarta, DIY; para ahli bidang perunggasan; serta para pelaku usaha perunggasan (asosiasi, pelaku usaha dan perusahaan integrator). Rapat sebagai evaluasi dari FGD Konsolidasi Perunggasan Nasional tanggal 9 September 2024. Harga livebird tidak dilakukan patokan harga dan dikembalikan kepada mekanisme harga yang terbentuk di pasar. Perusahaan terintegrasi dan pelaku usaha budidaya broiler wajib menjaga harga livebird tingkat peternak lebih besar dari harga pokok produksi di setiap daerah. Penerapan proporsi distribusi DOC FS paling tinggi 50% untuk internal beserta kemitraan dan paling rendah 50% untuk eksternal segera dilaksanakan bertahap dan progresif.

6. Solution Day 2024 “Bridging the Digital Divide for Connected Tomorrow

Datacomm Solution Day 2024, dilaksanakan pada Selasa 10 September 2024 di Jakarta. Pertemuan dihadiri Menkominfo RI, Pakar IT, Perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Jajaran Direksi Datacomm. Tujuan Pertemuan antara lain untuk diskusi dan sharing knowledge terkait perkembangan IT antara pemerintah dan sektor swasta, serta launching produk Digital Datacomm DCloud dan DTrust. DCloud merupakan cloud system untuk penyimpanan data serta DTrust merupakan layanan cyber security. Secara global sekitar 33% populasi global belum terkoneksi internet. Secara nasional, tingkat penetrasi internet mencapai 79% namun masih ada kesenjangan di wilayah urban dan rural. Koneksi 4G sudah menjangkau 97,42% dan 5G 3,52%. Pemerintah berupaya memperkecil digital divide antara lain dengan Pembangunan infrastruktur termasuk 3T, peningkatan keterampilan SDM Digital, serta kolaborasi lintas stakeholder, serta transformasi digital yang inklusif, inovatif dan memberdayakan. Saat ini pemerintah mencanangkan program SPBE untuk digitalisasi di pemerintah untuk mempercepat layanan. Namun Pemerintah perlu dukungan dari sektor swasta untuk dapat mewujudkan SPBE yang andal. Datacom merupakan perusahaan telekomunikasi yang memiliki spesialisasi di bidang cloud service, cyber security, infrastruktur IT serta software development. Datacomm memiliki data center di Jababeka. Datacom mendukung terwujudnya SPBE untuk

memberikan kinerja dan pelayanan pemerintahan yang lebih baik sesuai Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Datacomm dapat membantu Pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan IT salah satunya terkait cloud dan cyber security yang menjadi isu penting saat ini.

7. FGD Riset “Resiliensi Rantai Pasok Pangan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat

FGD Riset "Resiliensi Rantai Pasok Pangan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 di Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta dan dibuka oleh Dr. Yulistyne Kasumaningrum (Peneliti Post-doc FEB UNPAD) dan dihadiri secara offline oleh Perwakilan Dit. SPHP Badan Pangan Nasional, Perwakilan Dit. Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Perwakilan Dit. Perbenihan Tanaman Pangan, Kementan, Perwakilan Dit. Serealia, Kementan, Perwakilan Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementan dan dihadiri secara online oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Perwakilan dari BPS, Perwakilan dari Dit. Perubahan Iklim, BMKG, dan Ketua Umum PERPADI. FGD ini merupakan tindak lanjut riset pendahuluan dan untuk mengelaborasi lebih dalam topik riset dengan wilayah yang akan diteliti meliputi Indramayu, Karawang, dan Subang. Hasil dari FGD ini rencananya akan dibuat preliminary research untuk rekomendasi kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan selanjutnya oleh pemerintah diantaranya: risalah bencana alam apa saja yang terjadi di wilayah yang dekat dengan sentra padi dan faktor kunci apa saja yang signifikan mempengaruhi resiliensi rantai pasok pangan terhadap perubahan iklim.

Ketua Umum PERPADI menyampaikan bahwa kegiatan di lapangan antara anggota PERPADI dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan efisiensi pemotongan rantai pasok sudah ada, namun ada beberapa permasalahan seperti misalnya rata-rata nasional penggilingan padi 95%-nya adalah penggilingan kecil, dan untuk mengurangi dampak dari fenomena El Nino dan La Nina salah satunya perubahan penggunaan energi di 150 penggilingan padi yang diubah menjadi listrik untuk mengurangi dampak negatif sektor pertanian seperti akumulasi CO₂, sehingga dapat menghasilkan budidaya tanaman sehat mulai dari pemilihan benih, pengairan yang tidak berlebihan, dan penggunaan pestisida secukupnya.

8. Rapat Koordinasi Inflasi Kementerian Dalam Negeri

Rapat koordinasi inflasi dipimpin oleh Dirjen Bangda Kemendagri, dihadiri langsung oleh Sestama Bapanas, Deputi BPS, Dirjen Kemendikbud, Deputi III KSP, serta dihari tidak langsung oleh Direktur Bapokting Kemendag, Plt. Sesdit TP Kementan, Mabes TNI, Satgas Pangan Polri, Sesjamdatun, serta pejabat daerah OPD di seluruh Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia. Rakor bertujuan untuk mengupdate perkembangan harga M3 September di berbagai wilayah serta berkoordinasi intervensi pengendalian inflasi Dirjen Bangda menyampaikan pada M3 September, Kemendagri memberikan perhatian kepada wilayah yang mengalami kenaikan IPH cukup tinggi yaitu beberapa wilayah di Kalsel, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Kepri, serta wilayah yang mengalami penurunan IPH di bawah 4%, di antaranya Kab. Bangka Tengah, Kab. Karanganyar, Kab. Lombok Timur, Kab. Buru, dan Kab. Indramayu. Deputi BPS menyampaikan sejak tahun 2022, Indonesia mengalami inflasi pada bulan September. Komoditas ambil andil inflasi antara lain Minyak Goreng (naik 0,82% dari bulan Agustus), Bawang Merah (turun 1,97% dibandingkan Agustus), daging ayam (turun 0,45% dibandingkan Agustus), Bawang Putih (turun 0,70% dibandingkan Agustus), Beras (turun 0,01% dibandingkan Agustus). Namun demikian, komoditas tersebut mengalami kenaikan harga pada M3 September dibandingkan M2 September 2024. Sestama Bapanas menyampaikan bahwa Komoditas tingkat produsen yang tergolong perlu di intervensi yaitu Bawang Merah (41,60% < HAP), Kedelai (14,15%<HAP), Telur Ayam Ras (10,24%>HAP), dan GKG TK Penggilingan (1,76% < HAP), sedangkan komoditas tingkat produsen yang tergolong waspada yaitu Ayam Ras (14,24%<HAP), CRM (18,09%<HAP), Sapi Hidup (9,02%<HAP), dan Jagung Tk Petani (7,06%<HAP). Adapun komoditas tingkat konsumen yang tergolong perlu intervensi Beras Medium dan Premium khususnya di Zona 2 dan 3. Secara umum, ketersediaan pangan hingga akhir Desember 2024 aman. Bapanas berupaya menjaga stok/cadangan pangan selalu tersedia. Dalam rangka menjaga inflasi, Badan Pangan Nasional telah melakukan Beras SPHP 1,109 juta ton, GPM 7.257 kali, Kios Pangan sebanyak 346 Kios Pangan, FDP 286 ton, dan penyaluran Bantuan Pangan (Beras, Telur, dan Daging Ayam). Terkait ketersediaan daging lembu di akhir tahun 2024, Badan Pangan Nasional telah melakukan koordinasi dengan para asosiasi dan mendorong realisasi impor sebagaimana PI yang telah terbit.

9. Rapat Pertemuan Substansi Perunggasan di Jawa Barat

Rapat dilaksanakan secara luring di RM. Sindang Reret Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Balai Peternakan Unggas Jatiwangi, dihadiri oleh perwakilan Dit. Bitpro Kementan, Dit. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan Kementan, Baintelkam Polda Jabar, Satgas Pangan Jabar, BPS Jabar, DKPP Jabar, Dit. SPHP Bapanas serta para pelaku usaha perunggasan di Jawa Barat (Pinsar, ARPHUIN, GPPU, PT. CPI, PT. Sidoagung, PT. New Hope, PT. Malindo, PT. Anjawani, PT. Ciomas Adisatwa, PT. Bounty, PT. Mitra Berlian Unggas, PT. Sreeya, PT. Sarana Indonesia Maju, PT. QL, PT. KIP, PT. Mustika). Pertemuan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rapat pada 09 September 2024 yang masih belum menunjukkan keefektifan dari komitmen harga hasil rapat serta realisasinya masih rendah khususnya di daerah Jawa Barat. Fluktuasi harga dan rantai pasok yang belum efisien masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Proyeksi kebutuhan dan ketersediaan daging ayam ras agar lebih diperhatikan, perlu dihitung dan dikaji ulang agar tidak terjadi over supply. Partisipasi data jumlah konsumsi perlu dipetakan per daerah untuk bisa dijadikan referensi. Selain itu perlu menjaga kekompakan antar pelaku usaha perunggasan agar kesepakatan bisa direalisasikan.

B. Panel Harga Pangan

1. Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan

Bimbingan Teknis Panel Harga Pangan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi masing-masing Petugas Enumerator dan Pengolah Data terkait Panel Harga Pangan sebagaimana Pedoman Umum Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Selain itu, pelaksanaan Bimtek juga bertujuan untuk melatih kemampuan petugas Enumerator dan Pengolah Data dalam pengolahan data sederhana. Materi yang disampaikan meliputi Review Juknis SPHP melalui Panel Harga Pangan, dan Pengolahan Data Harga (Pembuatan Tabel Dinamis, Infografis, serta Peta perkembangan harga). Penyelenggaraan Bimtek Panel Harga Pangan juga merupakan realisasi dari pelaksanaan anggaran dana dekonsentrasi Badan Pangan Nasional yang diberikan pada 38 Provinsi. Tiga puluh satu provinsi telah melaksanakan bimbingan teknis panel harga pangan sampai dengan September 2024 dan enam provinsi belum melaksanakan bimbingan teknis. Satu provinsi baru

melaksanakan bimbingan teknis di bulan September yaitu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 September 2024.

2. Perkembangan Harga Pangan Periode September 2024

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada September 2024 untuk komoditas yang aman yaitu GKP Tingkat Petani, Beras Medium Penggilingan, dan Cabai Rawit Merah. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung ($9,15\% < \text{HAP}$), Cabai Merah Keriting ($14,28\% < \text{HAP}$), Sapi (Hidup) ($8,41\% < \text{HAP}$), dan Ayam Ras ($16,74\% < \text{HAP}$). Komoditas yang berada pada status intervensi yaitu GKG Tingkat Penggilingan ($1,18\% < \text{HPP}$), Kedelai ($11,13\% < \text{HAP}$), Bawang Merah ($40,93\% < \text{HAP}$), dan Telur Ayam Ras ($11,29\% < \text{HAP}$).

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M4 September 2024 terjadi pada komoditas Gula, Minyak Goreng Curah, Beras Premium, dan Beras Medium. Wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HET/HAP yang menunjukkan mengalami penurunan pada M4 September 2024 terjadi pada komoditas Kedelai, Telur, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah.

3. Perkembangan Aplikasi Panel Harga Pangan

Perkembangan aplikasi Panel Harga Pangan telah memasuki fase percobaan. Dari hasil percobaan dilakukan evaluasi dan dilakukan pengembangan sebagai berikut:

- a) Ringkasan eksekutif kab/kota yang perlu diintervensi yang dikelompokkan berdasarkan komoditas dan periode tanggal, agar memudahkan penelusuran dan pengambilan keputusan untuk tiap komoditas. Ketika salah satu diagram di klik, akan menampilkan total jumlah kab/kota dalam bentuk tabel.
- b) Penambahan foto pada fitur master usaha dan penambahan fitur Archive Foto.
- c) Penyesuaian tabel laporan enumerator (diberikan highlight merah) pada komoditas yang outlier.

4. Monitoring Perkembangan Harga Pangan

a. Sumatera Barat

Monev Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi (SKPG) Pada Aspek Keterjangkauan (Harga) Tahun 2024 yang dilaksanakan 23 – 25 September 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Monev dilaksanakan bersama tim bidang ketersediaan dan kerawanan pangan dan bidang distribusi dinas pangan Prov. Sumatera Barat, Bapanas (Perwakilan SPHP, KPG, PPK Deputi 2, dan KAKPN), dinas pangan Kota Padang dan Kab Solok, serta BULOG Wilayah Sumatera Barat dan Cabang Solok Raya. Sesuai aspek keterjangkauan SKPG, komoditas yang menjadi indikator SKPG adalah beras medium, telur ayam ras, dan minyak goreng kemasan. Harga Beras medium, telur dan Minyak Goreng Kemasan di Sumatera Barat terpantau selalu di atas harga HET/HAP namun gejolak harga tidak begitu tinggi dan masih berada pada CV yang tidak mengkhawatirkan.

b. Sulawesi Utara

Kegiatan Monev SKPG di Sulawesi Utara meliputi Rapat Koordinasi ke Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow yang menangani kegiatan SKPG, dihadiri oleh tim Bapanas (perwakilan Dit. KPG, SPHP dan KAKPN) dan Tim Bulog Kanwil Sulut. Provinsi Sulut dan Kab. Bolaang Mongondow terpilih menjadi salah satu lokasi uji petik karena memiliki skor SKPG pada kategori Waspada berdasarkan penilaian pada harga komoditas beras medium, telur ayam, dan minyak goreng pada bulan Juni 2024 terhadap Juni 2023. Dinas Pangan Daerah Prov Sulut telah membuat SK Tim SKPG tingkat provinsi, namun belum membentuk SK Tim SKPG tingkat kabupaten/kota. Kegiatan SKPG di tingkat kabupaten/kota di Sulut saat tidak berjalan karena tidak ada dukungan tim dan anggaran, sehingga perlu dirapatkan di tingkat pemerintah daerah sehingga menjadi atensi dan program prioritas tingkat pemda. Data yang digunakan dalam penilaian SKPG tingkat nasional dan daerah bersumber dari Panel Harga Pangan. Upaya mitigasi SKPG yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan frekuensi dan memperluas jangkauan GPM, Peningkatan ketersediaan stok di Bulog dan CPPD khususnya beras, telur ayam, dan minyak goreng.

5. Sosialisasi Aplikasi Baru Harga Pangan Sesi Wilayah Barat, Tengah dan Timur

Tim Panel Harga Pangan pada Senin – Rabu, 9 – 10 September 2024 telah melaksanakan sosialisasi New Aplikasi Panel Harga Pangan dengan Enumerator Tingkat Produsen, Enumerator Tingkat Konsumen dan Pj. Provinsi Panel Harga Pangan seluruh Indonesia dengan hasil sosialisasi sebagai berikut :

- a. Perbedaan yang mencolok dalam aplikasi panel harga pangan yang baru dengan yang lama adalah enumerator mencatat langsung didalam aplikasi setiap info dari responden. Jika ada tiga responden maka semua responden ditulis sehingga sistem akan membuat rata-rata harga secara otomatis
- b. Ujicoba New Aplikasi Panel Harga Pangan ini akan dilakukan selama 1 minggu. Setelah tahapan sosialisasi diharapkan agar semua enumerator mengisi laporan menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan.
- c. Komoditas yang di pantau di Tingkat produsen disesuaikan dengan SK yang diusulkan oleh pemerintah daerah ke pusat, sehingga tidak akan seluruh komoditas akan diisi datanya. Untuk Tingkat konsumen, seluruh komoditas pantauan wajib diisi dan tidak bisa memilih
- d. Beberapa enumerator masih ada yang belum paham dalam menggunakan New Aplikasi Panel Harga Pangan dikarenakan jaringan ketika zoom terputus-putus dan tidak bisa mengikuti sosialisasi dari awal.
- e. Rencana Tindak Lanjut:
 - Enumerator yang tidak bisa login akan dilakukan reset akun oleh tim pengembang aplikasi
 - Bagi enumerator yang masih belum paham dapat membaca panduan dan menonton video tutorial menggunakan aplikasi panel harga pangan baru yang sudah dikirimkan kepada PJ Provinsi Panel Harga Pangan

C. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan SPHP

1. Perkembangan Pelaksanaan GPM

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. SPHP

GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2024 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 30 September 2024 telah dilaksanakan sebanyak 548 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 7 kali, provinsi sebanyak 89 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 452 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-September 2024 sebanyak 7.367 kali dengan rincian Pusat sebanyak 173 kali, Provinsi sebanyak 1.180 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 6.014 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

2. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP periode September 2024

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I. Berdasarkan laporan update tanggal 30 September 2024 realisasi SPHP beras di tingkat konsumen selama Bulan September sebesar 95.954.914 kg. Total realisasi secara nasional dari Januari hingga akhir September sebesar 1.136.691.453 kg atau setara 94,72% dari target penyaluran Tahun 2024 sebanyak 1.200.000.000 kg. Realisasi Penyaluran terdiri dari Pengecer sebesar 728.619.221 kg atau 64,1%, Distributor sebesar 351.237.659 atau 30,9%, Satgas pangan sebesar 39.784.210 atau 3,5%, Pemerintah daerah sebesar 13.640.297 atau 1,2% dan BUMN sebesar 3.410.074 atau 0,3%. Penyaluran beras SPHP melalui PIBC guna mengisi kebutuhan pasar dan menekan lonjakan inflasi. Ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar terus memperluas cakupan beras Bulog, sehingga dapat lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

3. Menghadiri GPM UNPAD

GPM ini merupakan rangkaian kegiatan dalam acara AGRI SUMMIT 2024 yang dilaksanakan di Kampus UNPAD Dipatiukur Bandung. GPM ini dibuka oleh Rektor UNPAD dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian UNPAD, para Alumni Fakultas Pertanian UNPAD, perwakilan SPHP Bapanas dan Masyarakat sekitar. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra (6 Mitra Pangan Strategis diantaranya BULOG, CPI, Aslupama, Hataki, Pinsar, Fajar meat) dan 13 UMKM dari masyarakat sekitar. Untuk RNI tidak hadir. Komoditas yang dijual diantaranya beras sphp, beras premium, minyak goreng, telur ayam ras, CMK, CMR, bawang merah, daging ayam, daging sapi dan produk olahan lainnya. Total omset GPM ini adalah Rp 44.958.000. GPM ini juga dilakukan promosi untuk Branding Kios Pangan yang ditampilkan di setiap tenda – tenda vendor. Antusias pengunjung mengalami penurunan dikarenakan sudah diadakan GPM sebelumnya di hari Jumat (30 Agustus 2024) yang diadakan oleh Kota Bandung.

4. GPM Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia Kabupaten Malang

GPM dilaksanakan di Kantor Desa Gadingkulon, dibuka oleh Kadis Ketahanan Pangan Kab. Malang dan dihadiri oleh Sekdes Gading Kulon, Ketua Senat Ismapeti, Perwakilan Dinas Provinsi Jatim, Bapanas, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Mitra yang terlibat dalam GPM ini diantaranya Perum BULOG, RNI, PPI, Prima Freshmart, Wilmar, Perumda Tunas, dan UMKM. Komoditas yang dijual diantaranya : beras SPHP, beras premium, minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam, cabai rawit merah (CRM), cabai merah keriting (CMK), bawang merah, bawang putih, garam, gula pasir, aneka sayuran serta berbagai pangan olahan. Komoditas yang paling banyak diminati masyarakat yaitu minyak goreng, baik minyak kita ataupun minyak lainnya

5. GPM Perihal Peresmian Taman Albar Alun-Alun Depok

GPM Badan Pangan Nasional bekerjasama Badan Pangan Nasional dengan dibuka oleh Walikota Depok, dihadiri oleh Wakil Walikota Depok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, perwakilan Forkopimda Kota Depok, perwakilan Direktorat SPHP Bapanas. GPM dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Taman Alun-alun dan Hutan Kota Depok wilayah Barat, berada di dekat Situ Tujuh Muara, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Rangkaian acara dimulai dengan senam bersama, pertunjukan tari tradisional, GPM, pengecekan kesehatan

gratis, pembagian bibit dan pupuk tanaman, dan bazar UMKM binaan Kota Depok. GPM diikuti oleh 10 Mitra Bapanas yang membawa bahan pokok dan olahan pangan terdiri dari Perum Bulog, PPI, RNI, SPI, CPI, Pinsar, Allfresh, Agro Bakti Jaya Farm, Aslupama, dan UMKM Aspami. Komoditi yang dijual sebagai berikut: Beras SPHP Rp 11.600/kg; Beras Premium Rp 13.200/kg; Minyak goreng Rp 16.000/L; Gula Pasir Rp 17.000 /kg; Telur Rp 24.000/kg; Garam Rp 2.000/250 gram; Ayam Rp 28.500/kg; Bawang Merah Rp 25.000/kg; Bawang Putih Rp 17.000/kg; Cabai Merah Keriting Rp 30.000/kg; Cabai Rawit Merah Rp 40.000/kg; Produk olahan ayam dan Produk olahan pangan lainnya.

6. GPM Semarak Dirgantara

GPM dalam rangka Semarak Dirgantara TNI Angkatan Udara, Sabtu 28 September 2024 di Lapangan Udara Pantai Depok, Kab. Bantul, DI Yogyakarta. GPM merupakan rangkaian kegiatan Semarak Dirgantara TNI Angkatan Udara yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi DIY. Rangkaian Semarak Dirgantara TNI Angkatan Udara antara lain Demo Udara, panggung hiburan, GPM, B2SA, bazar UMKM, bakti sosial dan Kesehatan serta acara hiburan lainnya. Kegiatan Semarak Dirgantara dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang diwakili oleh Komandan Kodiklat AU, dihadiri Asisten Sekda DIY Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Bapanas, Kemenkes, Kemensos, TNI AD, TNI AL, serta OPD Provinsi DIY. Tujuan Semarak Dirgantara antara lain untuk meningkatkan potensi dirgantara utk ketahanan sosial budaya dan ekonomi termasuk ketahanan pangan. GPM melibatkan 11 vendor yang terdiri dari BUMN dan pelaku usaha antara lain; Perum BULOG, ID FOOD, Kios Pangan DIY, PT. Indoguna, Gapoktan Beras, Gapoktan Telur, Gapoktan Bawang, JP Chicken, distributor serta pelaku usaha UMKM.

7. GPM International Day of awareness of *Food Loss and Waste* (IDAFWL) 2024

Peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFWL) /Hari Kesadaran Internasional, Susut dan Sisa Pangan sudah dilaksanakan sejak Tahun 2022, untuk Peringatan IDAFWL Tahun 2024 dilaksanakan di Area CFD Kota Surakarta dan Lapangan Pamedan Mangkunegaran Kota Surakarta, dengan tema Internasional : “*Stop Food Waste For People and Planet*“, sedangkan tema nasional: “Stop Boros Pangan, Demi Kita Demi Bumi”.

Acara tersebut dihadiri Asda Pemprov Jateng, PJ. Pemkot Surakarta, PJ. Pemkot Tasikmalaya, Staf Khusus Bapanas, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jabar, dan Perwakilan FOI, serta dibuka oleh Deputi II Bapanas. Dalam sambutan Deputi II menyampaikan bahwa melalui peringatan IDAFLW Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya stop boros pangan untuk menyelamatkan pangan dan juga bumi "Demi Kita, Demi Bumi".

Direktorat SPHP Bapanas berpartisipasi kegiatan tersebut berupa pelaksanaan GPM yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng dengan sumber anggaran dari dekonsentrasi Provinsi. Mitra GPM ada 15 Vendor yang berpartisipasi Sebagai berikut: 1. Bulog; 2. Gapoktan Sumber Rejeki, Desa Tarubatang, Kec. Selo, Kab. Boyolali; 3. PPI; 4. Gita Food; 5. Kwt Lohjinawi Surakarta; 6. RNI; 7. KWT Asri; 8. PAU Pedaringan Surakarta; 9. Gapoktan Panggung Mulyo, Desa Puenggung Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, 10. BUMP PT. Sukoharjo Makmur Pangan Nusantara, 11. Primafood, 12. KWT Pesona, 13. CPN, 14. ABMI Sukoharjo dan 15. JTAB. Total omset hasil penjualan pada GPM tersebut sebesar Rp. 164.587.500.

8. GPM Ikatan Kanca Lawas Gombang dan Paguyuban Sedulur Gombang

GPM bekerjasama dengan Ikatan Kanca Lawas Gombang dan Paguyuban Sedulur Gombang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di Lapangan Alun-Alun Manunggal, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen. Dihadiri oleh Camat Gombang, Ikatan Kanca Lawas Gombang dan Paguyuban Sedulur Gombang, Tim SPHP, dan warga Kecamatan Gombang. Mitra atau vendor yang ikut berpartisipasi yaitu Perum BULOG, PT. RNI, PT. PPI, Bumdes Kalirejo, Perumda Aneka Usaha, PT.BSI, dan Asosiasi UMKM. Total Omzet sejumlah Rp 56.106.000.

D. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

1. Update Perkembangan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /packing (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/packing. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan September 2024 sebagai berikut: kedelai dari Pati Ke Kopti Bogor sebanyak 10 ton, kedelai dari Pati ke Kopti Jabar sebanyak 30 ton, kedelai dari Pati ke Cikupa Banten sebanyak 10 ton, kedelai dari Pati ke Semarang sebanyak 9 ton, Kedelai dari Pati ke Sukoharjo sebanyak 10 ton untuk menyikapi panen raya kedelai khususnya di Jawa Tengah yang sudah, sedang dan akan berlangsung, serta mencermati kondisi harga kedelai di petani yang rendah (Rp 8.500-8.700/kg), jauh dibawah harga acuan Pemerintah atau harga kedelai impor di tingkat importir. Selain itu terdapat mobilisasi beras dari Gapoktan Sadulur Jabar ke Kios Pangan Sugema Cikalong wetan sebanyak 2,5 ton, beras dari Gapoktan Sadulur Jabar ke Kios Pangan Simpul sebanyak 7 ton dan beras dari Gapoktan Sadulur Jabar ke GPM Gojek Kota Bandung sebanyak 0,5 ton. Mobilisasi Pangan dengan FDP pada September 2024 sudah terealisasi sebanyak 79 ribu kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu kedelai sebanyak 69 ribu kg.

Secara keseluruhan, mobilisasi pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan pada September 2024 menyumbang 26,4% dari total Mobilisasi Pangan dengan FDP sampai dengan September 2024. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 30 September 2024 sudah terealisasi sebanyak 298,3 ribu kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 113 ribu kg.

E. Kios Pangan

1. Perkembangan Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan di Kios Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dukungan Pasokan Bahan Pangan ke Kios Pangan bersama Perum BULOG, ID FOOD, PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI)

dan PT. Japfa Comfeed Indonesia (JCI) untuk menyediakan pasokan bahan pangan ke outlet-outlet Kios Pangan dengan harga yang terjangkau dan/atau mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) atau ketentuan lain yang berlaku yang diselenggarakan pada Selasa, 9 Agustus 2024 secara daring. Perum Bulog, ID Food, PT CPI, dan PT Japfa akan mendukung pasokan dengan memberikan kontak PIC masing-masing wilayah ke Bapanas yang selanjutnya akan di share ke Dinas Provinsi/Kab/Kota untuk memudahkan koordinasi di daerah. Sebagai tindak lanjut dilakukan rapat lanjutan bersama PT. CPI dan PT. JCI pada Senin, 15 Agustus 2024 dengan hasil PT CPI dan PT. JCI akan mendukung dengan memasok dari kios terdekat yang dimiliki dengan skema pilot project. Perkembangan Kios pangan posisi per 30 September sebanyak 378 Kios Pangan yang tersebar di 29 Provinsi dan 89 Kabupaten/Kota.

2. Peresmian Kios Pangan

Launching Kios Pangan Kota Pematang Siantar dibuka oleh Ibu Walikota Pematang Siantar dan dihadiri oleh Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar, Perwakilan Bank Indonesia Kota Pematang Siantar, Asisten II bidang Perekonomian Kota Pematang Siantar, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Kota Pematang Siantar, Pimpinan Forkopimda lingkup Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kepala Dinas OPD Lingkup Kota Pematang Siantar, dan Camat dan lurah di kota Pematang Siantar. Kios pangan "Pak Jumingan" adalah kerjasama antara pemilik toko sembako dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar dan merupakan Kios Pangan pertama di Kota Pematang Siantar. Lokasi Kios Pangan berada di tengah pemukiman penduduk. Inflasi inti pada saat ini secara Nasional 2,12% (yoy) turun dibandingkan bulan sebelumnya 2,13%. Inflasi Sumatera Utara 1,86% (yoy) dan Inflasi tertinggi Kota Pematang Siantar 2,54%. Penyumbang inflasi tertinggi bukan berasal dari Pangan Pokok Strategis melainkan dari Rokok, Ikan Dencis, Emas perhiasan, Sawi hijau dan Andaliman. Selain launching Kios Pangan juga dilaksanakan penyerahan mobil dari BI kepada Dinas Pangan Kota Pematang Siantar untuk memfasilitasi GPM Keliling

3. Rapat Koordinasi Kios Pangan Ponpes Lampung

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Stabilisasi Pasokan Pangan dan dihadiri oleh Dinas Pangan Prov dan Dinas Kab/Kota, Kanwil dan Kancab Perum BULOG, ID FOOD, PT. Charoen Pokphand Indonesia (PT. CPI), APRINDO se-Lampung, Pimpinan dan Pengelola Ponpes se-Lampung. Perum BULOG telah melakukan kunjungan ke beberapa Ponpes yang akan dijadikan kios pangan untuk dijadikan mitra BULOG. Perum BULOG se-Lampung siap untuk menyuplai bahan pangan ke kios pangan. Syarat menjadi mitra BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD) antara lain KTP, NPWP, dan NIB (pedagang eceran sembako dan beras). Pemesanan pertama minimal Rp. 500.000 dengan skema beli putus (*cash on delivery*).

Penetapan Kios Pangan Ponpes berdasarkan Surat Keterangan (SK) dari Dinas Pangan Kab/Kota di masing-masing Lokasi Ponpes, yang selanjutnya dikompilasi sekaligus dibuatkan SK oleh Dinas Pangan Provinsi untuk diteruskan ke Badan Pangan Nasional. Kerja sama dengan pemasok (BULOG, RNI, dan CPI) bisa langsung dilakukan paralel dengan penerbitan SK Kios Pangan selama persyaratan dari pemasok telah dipenuhi. Rencana tindak lanjut kedepan adalah Perum Bulog, ID FOOD, dan CPI akan memberikan data terbaru nama dan no hp PIC di kantor cabang se-lampung, Badan Pangan Nasional akan bersurat ke PT CPI untuk bantuan peminjaman freezer ke Kios Pangan, BRI akan melakukan pertemuan khusus dengan pengelola kios pangan ponpes se-lampung minggu depan dan kios pangan ponpes se-lampung ditargetkan minggu depan sudah memesan pangan ke supplier.

4. Rapat Koordinasi Dukungan Pasokan Bahan ke Kios Pangan Kegiatan LDPM dan PUMP

Rakor dilaksanakan secara online pada Kamis, 26 September 2024, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perwakilan Gapoktan eks PUPM/ LDPM dan tim SPHP. Rakor bertujuan untuk mengaktifkan kembali Gapoktan Binaan Kegiatan PUPM dan LDPM untuk dapat memasok ke Kios Pangan. Kios pangan dapat dipasok dari BUMN seperti Bulog dan ID Food, PT. CPI, PT. Japfa, Aprindo, Distributor, Importir, Poktan/Gapoktan/Peternak. Gapoktan eks PUPM di masing-masing wilayah produsen dapat memasok/menjual hasil panen ke Kios Pangan (sekaliigus memberi akses pasar bagi Gapoktan setempat).

Saat ini ada penambahan 2 kios pangan yang ada di kecamatan di Pekanbaru.

Optimalisasi Kios Pangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP). Komoditas yang dapat dilakukan FDP meliputi: beras, minyak, gula, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah kecil. Komponen yang dapat dibiayai meliputi transportasi, packaging, sortasi, ongkos bongkar muat (daerah asal dan daerah tujuan). Daerah yang akan mengusulkan FDP bersurat ke Direktur SPHP dan harus melampirkan data seperti harga pangan (di wilayah asal, dan di tingkat konsumen), penyedia jasa logistik, offtaker, jumlah volume yang akan dipindahkan, dan biaya transportasi per kg.

F. Gerakan Aksi Direktorat SPHP

1. Hari Perhubungan Nasional

Upacara Harhubnas (Harhubnas) dihadiri dan dipimpin oleh Menhub RI, dihadiri Forkopimda, pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kemenhub, para pelajar, serta masyarakat. Harhubnas dilaksanakan setiap tanggal 17 September, dimana Harhubnas 2024 mengangkat tema Transportasi Maju, Nusantara Baru.

Menhub menyampaikan pelaksanaan Harhubnas merupakan momentum untuk refleksi kiprah, capaian, karya, dan bakti bidang perhubungan terhadap kemajuan cita-cita nasional. Program pembangunan bidang perhubungan selama 10 tahun terakhir telah fokus pada pembangunan sarana perhubungan di luar Jawa.

2. Musyawarah Nasional Pertama PEJAGINDO

Musyawarah Nasional I Pejagindo diselenggarakan di Surabaya pada tgl 18 September 2024 yang dihadiri langsung oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementan RI, Perwakilan Deputy KSP Bapanas, Perwakilan Ditjen PDN Kemendag, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Prov Jawa Timur, Wakil Pimwil Bulog Jatim, Perwakilan GPMT, Feedmill, dan Dewan Pengurus Pusat serta Anggota Pejagindo.

Munas I Pejagindo dilaksanakan dalam rangka pengukuhan pengurus dan pengesahan organisasi Pejagindo yang akan menjadi wadah bagi para pengusaha dan produsen jagung Indonesia untuk mendorong industri jagung yang berkelanjutan dan tercipta keselarasan dari sektor hulu hingga sektor hilir. Saat ini keanggotaan Pejagindo sudah mencakup 35 Perusahaan Pedagang dan Produsen Jagung Pipilan

Bapanas mengapresiasi dan menyambut baik organisasi Pejagindo melalui Munas ini dapat terus membangun jaringan kolaborasi, sinergi, dan kerjasama dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan jagung dengan tetap mengutamakan kepentingan produksi dalam negeri sehingga bermanfaat bagi petani dan pelaku usaha serta masyarakat konsumen.

3. Forum Bisnis Daerah

Kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Kamis, 19 September 2024 di Surabaya. Forbisda mengangkat tema “Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan serta Kolaborasi Bisnis yang Berkelanjutan. Peserta Forbisda selain Kepala Daerah dan anggota Kadin wilayah Timur (Jatim, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua), juga pelaku usaha. Bapanas mengisi di sesi ke-3, bersama Direktur Melbourne Wealth Group (Importir Malaysia), Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag.

Salah satu hal yang disoroti Kadin adalah masih tingginya importasi pangan serta gejolak harga pangan yang selalu berulang setiap tahun. Bapanas harus berani mengurangi impor dan melakukan substitusi pangan untuk mengurangi efek domino ketergantungan impor.

4. Rapat Diskusi Kebutuhan Modeling Rantai Pasok Beras

Rapat ini merupakan pertemuan ke-2 yang bertujuan untuk memperkenalkan draft pendekatan model sistem dinamis rantai pasok beras di Indonesia. Model ini diharapkan dapat mendukung pendekatan model sistem dinamis rantai pasok beras di Indonesia. Model ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan di Indonesia dalam tata kelola beras. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dan dihadiri oleh peneliti dari National University of Singapore (NUS), perwakilan dari Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Dit.SPHP, Dit.KP, Ditjen TP, Pusdatin Kementan, Perum BULOG dan Universitas Trisakti. Secara online di hadiri oleh BPS, Kemendagri, dan BI.

Penentuan permodelan rantai pasok ini melalui pendekatan Mapping geospasial dan optimalisasi logistik untuk memastikan semua kawasan tercover, mekanisme stabilisasi harga dengan manajemen buffer stok dan intervensi pasar, serta meminimalkan harga pembelian dan subsidi untuk mensupport kesejahteraan para petani.

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pilot project ke beberapa daerah di Indonesia. Jika mengacu informasi dari Kementerian Pertanian bahwa produksi padi di Pulau Jawa mewakili 52% kebutuhan beras Nasional sehingga pilot project kemungkinan besar akan dilaksanakan di Pulau Jawa. Dana pilot project ini akan disupport oleh National University of Singapore. Rencana tindak lanjut kedepan adalah:

- a) Setiap K/L yang terlibat dalam pembentukan permodelan rantai pasok diminta untuk mengkonfirmasi persetujuan pelaksanaan pilot project dalam 1 minggu.
- b) Permodelan rantai pasok ini masih dalam tahap awal dan masih akan dilakukan pengembangan kedepannya.

5. FGD Temu Tani dalam Rangka Hari Tani Nasional (HARTANAS) ke-64

Temu Tani dilaksanakan pada hari Minggu, 22 September 2024, di Cafe Bismika Kec Jelbuk Kab Jember Prov Jawa Timur. dipimpin oleh Ketua APPI Nasional, dihadiri oleh Ketua PPI Wilayah Jatim, Danrem, Polres, Perum Bulog Cabang Jember, dan Para Anggota APPI Se-Kab Jember. Narasumber yang hadir dari Bapanas, PT. Pupuk Indonesia (PI), Ketua Perhepi Kab Jember. Sedangkan Narasumber dari Kementan tidak ada perwakilan yang hadir. Temu Tani dilaksanakan oleh APPI dalam Rangka memperingati Hari Tani Nasional ke 64. Hartanas diperingati setiap tanggal 24 September bertepatan dengan disahkannya UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tema yang diusung pada kegiatan ini yaitu "Bersama Petani Memakmurkan Negeri, Wujudkan Kedaulatan Pangan menuju Indonesia Maju. Hartanas ke 64 dimeriahkan juga dengan Jalan Sehat, Gerakan Pangan Murah, dan Temu Tani. Tindak lanjut FGD adalah:

- a) APPI akan bersurat kepada Bapanas untuk mengusulkan Fasilitas Distribusi Pangan Dalam Rangka beli Produk Petani di Kab Jember dan mengusulkan evaluasi dan reviu HPP beras
- b) Hasil Temu Tani akan dibuatkan rekomendasi Kebijakan Pertanian Nasional yang akan disampaikan kepada Presiden terpilih

6. Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua

Rakor dilaksanakan secara hybrid, secara offline dihadiri oleh PJ Gubernur Gorontalo, Deputy Gubernur Senior BI, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko, Kepala Departemen Regional BI, Kepala BI Wilayah Sulampua, Ketua TPID Prov Sulsel, Ketua TPID Prov Gorontalo, Ketua TPID Wilayah Papua, Biro

Perencanaan Kementan, Pinca BULOG Gorontalo, dan Tim SPHP. Secara online dihadiri Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, dan Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Kemenhub.

1.3. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP)

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) adalah:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK DCP

Pada bulan September 2024, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK untuk mendukung distribusi dan cadangan pangan. Kegiatan ini meliputi pembuatan kajian, desain grand, peraturan kepala badan, serta berbagai panduan teknis. Salah satu fokus utamanya adalah penyusunan kajian terkait margin penugasan yang diberikan kepada Perum BULOG untuk pengelolaan pangan pokok, khususnya beras, guna menentukan besaran kompensasi yang sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Penguatan cadangan pangan nasional juga ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi pangan, dan BUMN, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam negeri. Langkah ini didukung oleh prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, yang fokus pada ketahanan pangan, kemandirian, serta stabilitas harga. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden terpilih periode 2024-2029, yang menekankan ketersediaan pangan berkelanjutan dan harga yang menguntungkan bagi petani dan terjangkau bagi konsumen. Pada bulan tersebut juga disusun NSPK seperti Kepbadan PBP untuk Tahap II dan III Tahun 2024, rancangan peraturan terkait sistem distribusi pangan, dan rancangan Perpres tentang petunjuk teknis DAK Fisik Tahun 2025. NSPK ini mendukung tata kelola distribusi pangan nasional agar lebih efektif dalam mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia.

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan DCP

- a. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Perbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. Rakor dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan, saran dan rekomendasi untuk penyusunan Rancangan Perbadan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sesuai dengan amanat PP 17 Tahun 2015

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada pasal 59 ayat (2) huruf b dan pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

b. Rapat Koordinasi Entry Meeting Reviu Penyaluran Bantuan.

Dalam rangka persiapan pembayaran penyaluran bantuan pangan Tahap II 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 9 September 2024 secara offline meeting di Kantor Perum BULOG Pusat. Rapat dipimpin oleh Dir SCCP BULOG, dan dihadiri Inspektur Bapanas, Dir KP selaku PPK CPP, Kepala SPI BULOG, perwakilan Dit. DCP, tim APIP Bapanas, transporter PT POS, PT, YASA, dan JPL. Bantuan Pangan Beras Tahap II Tahun 2024 alokasi April s.d. Juni 2024 yang terealisasi 100% pada 32 provinsi (selain Papua), dan - Pending matters penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap I (Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara dan Maluku Utara).

c. Rapat Koordinasi Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (CPPD) dan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 2 September 2024 secara online meeting. Rapat dipimpin oleh Dir DCP, dan dihadiri oleh Perum BULOG serta seluruh perwakilan dinas pangan provinsi yang membidangi urusan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan lumbung pangan masyarakat. Rakor ini membahas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Disepakati bahwa Perum BULOG akan memisahkan pengelolaan dan pencatatan CBP dari beras lain, seperti beras komersial, untuk memudahkan pelacakan dan evaluasi. Selain itu, BULOG akan memperbaiki mekanisme dan SOP internal, sementara Kementerian Desa, PDT, dan TNI turut mendukung perbaikan ini untuk memudahkan distribusi dan pengelolaan beras di wilayah terpencil.

Rapat juga membahas peran Lembaga Penyimpanan Masyarakat (LPM) sebagai bagian dari Cadangan Pangan Nasional. LPM diharapkan dapat menyimpan hasil produksi petani, didukung alat dan mesin pengolahan, serta memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama untuk menghadapi paceklik, gejolak harga, dan bencana. Pemerintah sejak 2009 telah membangun 4.868 LPM di 388 kabupaten/kota untuk mendukung penguatan cadangan pangan dan bisnis kelompok tani melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Kedepannya, LPM akan didorong untuk memperkuat kelembagaan, SDM, serta jejaring kemitraan, melalui kegiatan seperti business matching, kerja sama CSR, dan promosi produk dalam pameran. Pengumpulan data dan informasi tentang LPM akan dilakukan mulai minggu kedua September 2024 guna mendukung proses klasifikasi dan perbaikan struktur organisasi untuk memperkuat peran LPM dalam menjaga ketahanan pangan di berbagai daerah.

d. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik T.A 2025

Rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 diadakan secara online pada tanggal 17 September 2024. Rapat ini dipimpin oleh Tim Kerja Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK, Kementerian Keuangan, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam penyusun Juknis DAK Fisik. Beberapa pembahasan utama mencakup revisi Perpres 57/2024 karena perubahan substansi dan penambahan bidang baru yang telah diatur dalam PMK 25/2024, serta persetujuan prakarsa yang sedang menunggu persetujuan presiden.

Dalam RPerpres yang baru, perubahan mencakup kewajiban K/L untuk menyampaikan capaian, kendala, dan data pendukung sebagai syarat usulan tahun berikutnya. Produk turunan dari Perpres tidak wajib kecuali untuk penjabaran detail yang bisa merujuk pada Peraturan Menteri/Kepala Badan yang relevan. Perubahan materi lampiran akan tetap melalui proses RPerpres dan tidak bisa diubah melalui produk hukum K/L saja. Poin tambahan terkait kondisi darurat atau kahar, seperti peningkatan keamanan aplikasi KRISNA, akan dijelaskan dalam Berita Acara *Trilateral Meeting* (BA-TM).

Tindak lanjut rapat mencakup penyampaian lampiran Juknis RPerpres paling lambat akhir September 2024 dengan target penyelesaian pada akhir tahun. Beberapa poin wajib pada lampiran mencakup rincian kegiatan, kriteria teknis, mekanisme barang dan jasa, serta tata cara pelaksanaan dan pelaporan. Setelah disahkan, RPerpres tentang Juknis DAK Fisik akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang konsisten.

d. Rapat Percepatan Realisasi Kegiatan dan Anggaran T.A 2024

Rapat Koordinasi yang berlangsung pada 19 September 2024 di Hotel Aston Simatupang, dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas (PKH), membahas optimalisasi anggaran BA 125 Tahun Anggaran 2024. Hadir dalam rapat ini Inspektur Bapanas dan perwakilan dari Dit Ekontim DJA, Dit DCP, Biro KPU, dan Biro OSH. Pembahasan utama mencakup kekurangan belanja gaji pegawai, anggaran untuk Badan Gizi Nasional, dan pembayaran tambahan terkait Penyaluran Bantuan Pangan 2023 dari ID Food, yang masih memiliki sisa pembayaran sebesar Rp. 31.088.063.969,00 sesuai surat dari ID Food.

DJA Ekontim menjelaskan bahwa pembayaran tambahan biaya bantuan pangan harus didasarkan pada reviu dari BPKP. Dana ini bisa berasal dari optimalisasi sisa anggaran penyaluran bantuan beras periode Februari-Maret 2024 yang masih tersedia sebesar Rp. 50 miliar. Kepala Biro PKH meminta Dit DCP untuk berkoordinasi dengan BPKP agar reviu ini dapat diselesaikan pada Oktober, sebagai dasar pergeseran anggaran dari bantuan beras ke bantuan daging ayam dan telur. Alternatif lainnya, jika mekanisme RPATA tidak memungkinkan, adalah mengalihkan dana bantuan beras Desember untuk pembayaran bantuan Januari, sesuai dengan Quality Assurance BPKP.

Tindak lanjut yang disepakati antara lain mengusulkan rapat koordinasi Dit DCP dengan BPKP untuk membahas permohonan reviu terkait usulan ID Food dan mengundang Biro KPU serta Dit DCP berkoordinasi dengan DJPb untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut atas masukan yang telah disampaikan melalui surat balasan DJPb.

3. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Badan Pangan Nasional telah menjalankan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan tahun 2024 berdasarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional terbaru. Bantuan ini mencakup beras, daging ayam, dan telur yang disalurkan sebagai antisipasi kekurangan pangan, upaya penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. Untuk melaksanakan bantuan ini, Badan Pangan Nasional menerbitkan petunjuk teknis yang diperbaharui agar pelaksanaan penyaluran lebih optimal dan sesuai peraturan. Pendanaan penyaluran CPP bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan APBN. Pada tahun 2024, alokasi anggaran mencakup bantuan pangan beras dan bantuan daging ayam serta telur yang terbagi dalam dua tahap.

Selain itu, alokasi anggaran untuk bantuan pangan beras juga mencakup tambahan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Rencana alokasi anggaran bulan Januari 2024 akan diajukan setelah adanya reviu dari APIP dan jaminan mutu dari BPKP.

Penyaluran CPP melibatkan BULOG dan BUMN Pangan untuk memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg per keluarga penerima selama enam bulan (Januari–Maret dan April–Juni) untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan daging ayam dan telur juga disalurkan kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS) dengan paket satu ekor ayam dan 10 butir telur pada periode yang sama. Surat penugasan dari Badan Pangan Nasional kepada BULOG dan BUMN Pangan menetapkan pelaksanaan ini hingga pertengahan tahun 2024.

Data penerima bantuan pangan beras diperoleh dari Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator PMK, yang diserahkan secara bertahap. Data penerima bantuan stunting untuk daging ayam dan telur berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan disampaikan kepada ID FOOD. Pemberian bantuan beras menyasar wilayah secara nasional, sedangkan bantuan daging dan telur disesuaikan dengan data KRS.

4. Penyaluran CPP Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat

Badan Pangan Nasional, untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023, telah menyusun regulasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) guna menanggulangi bencana dan keadaan darurat, yang kini menjadi wewenang Badan Pangan Nasional setelah dipindahkan dari Kementerian Sosial. Dalam peraturan ini, bantuan pangan diutamakan dari Cadangan Pangan Daerah (CPPD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk mengatasi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, serta bencana non-alam seperti epidemi, termasuk bencana sosial seperti konflik antar kelompok. Sebagai panduan teknis, diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2024 untuk pelaksanaan penyaluran CPP bagi bencana dan keadaan darurat. Hingga September 2024, Badan Pangan Nasional, bersama Perum BULOG, BUMN Pangan, dan dinas terkait, telah menyalurkan bantuan pangan berupa 378,21 ton beras ke 22 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi, dengan 2,84 ton di antaranya disalurkan pada bulan September untuk bencana seperti banjir, longsor dan erupsi gunung.

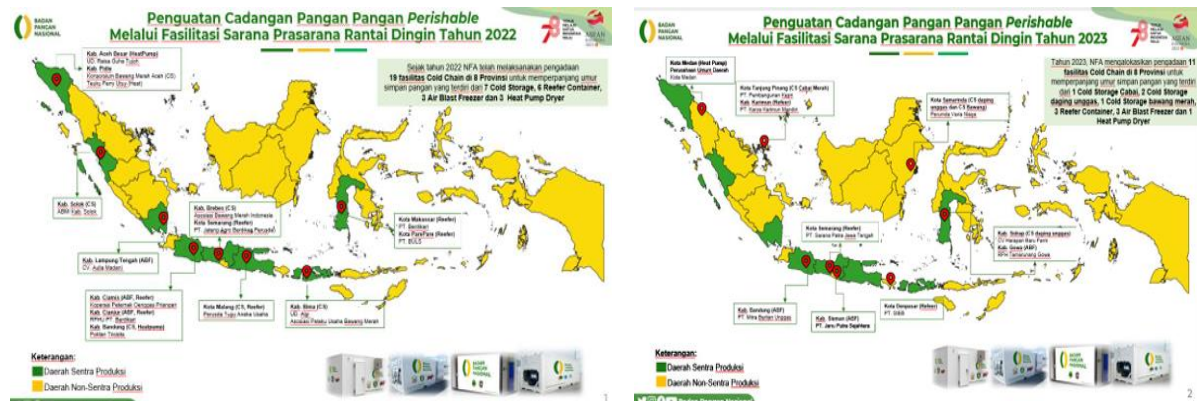
5. Pelaporan Database CPP Pusat dan CPP Daerah

Selama Triwulan III, pelaksanaan rencana aksi terkait Data dan Informasi Distribusi serta Cadangan Pangan didukung melalui pelaporan database cadangan pangan pemerintah pada situs web sigapnasional.badanpangan.go.id. Untuk memperkuat cadangan pangan nasional, Badan Pangan Nasional perlu mengembangkan sistem data dan informasi yang terintegrasi sebagai acuan langkah strategis, guna memperoleh data yang diperbarui secara objektif harian, mingguan, atau bulanan, sebagai dasar dalam penentuan kebijakan. Pengintegrasian data mencakup Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM), dengan pemutakhiran database melalui aplikasi web Sigap Nasional. Pemutakhiran ini dilakukan secara harian oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan, serta mingguan atau bulanan oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan laporan yang dikirim rutin secara manual atau melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id), pada 30 September 2024, informasi stok/cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD) disajikan dalam bentuk infografis.

6. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

Menurut Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022–2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk menjamin keterjangkauan pangan melalui stabilisasi pasokan dan harga, guna memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya pangan. Penguatan sistem logistik pangan nasional juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana logistik pangan yang memadai untuk menjaga ketersediaan dan cadangan pangan, serta memastikan stabilitas pasokan dan harga secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat karakteristik pangan yang mudah rusak, produksi yang bersifat musiman, dan ketimpangan antarwilayah, di samping tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan infrastruktur logistik yang masih terbatas. Pada tahun 2024, Badan Pangan Nasional memperkuat penyediaan fasilitas logistic dengan 13 unit sarana berupa 2 unit cold storage unggas, 6 unit Air Blast Freezer, dan 5 unit reefer container untuk stabilisasi pangan. Hingga September, proses penguatan ini masih dalam tahap persiapan longlist usulan CPCL, sosialisasi kegiatan 2024, serta koordinasi dengan dinas pangan provinsi untuk penjangkaran CPCL. Hingga saat ini

telah terpasang 30 (tiga puluh) unit sarpras Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagai berikut:



2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan dan Gizi, dengan realisasi anggaran pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 4.047.409.529,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

2.1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan adalah:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

a. FGD Exercise Data Metode Baru FSVA

FGD yang berlangsung secara hybrid pada tanggal 3 September 2024 di Jakarta Selatan ini bertujuan untuk memvalidasi data indikator ketersediaan pangan (jagung dan sagu) dalam penyusunan FSVA 2024 serta memperoleh data indikator FSVA 2025 yang belum tersedia. Acara dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dengan narasumber Dr. Farit M Afendi, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPOM, dan Kelompok Kerja Pencegahan Kerawanan Pangan NFA.

Pembahasan FGD mencakup verifikasi dan validasi data produksi jagung dan sagu, data jalan, serta data penjamin keamanan dan mutu pangan tahun 2021-2023. Diskusi menyepakati bahwa data jagung baru tersedia di tingkat provinsi, data sagu tingkat kabupaten/kota masih menunggu konfirmasi, data jalan memerlukan

konsolidasi dari Kementerian PUPR, dan data keamanan pangan dapat diukur melalui sertifikasi pangan yang lolos.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA menyampaikan bahwa pada tahun 2024, dilakukan perbaikan metodologi dengan penambahan indikator terkait resiliensi dan keberlanjutan. Beberapa indikator masih membutuhkan data dukungan, di antaranya Normative Consumption Production Ratio (NCPR) pangan pokok, NCPR protein, panjang jalan/aksesibilitas, dan jaminan keamanan serta mutu pangan.

Untuk tindak lanjut, Pusdatin Kementan akan memperbarui data jagung 2023, Kementerian PUPR akan konsolidasi data panjang jalan untuk FSVA 2025, dan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA akan melengkapi data penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui surat ke Kemenkes, BPOM, dan Direktorat terkait.

b. FGD Lanjutan Exercise Data Metode Baru FSVA dan FGD Hasil FSVA Nasional Tahun 2024

b.1. Pelaksanaan FGD Lanjutan Exercise Data Metode Baru FSVA

FGD yang dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BMKG, dengan tujuan untuk memvalidasi data ketersediaan pangan (komoditas sagu) untuk FSVA 2024 dan memperoleh data NCPR Protein serta informasi cuaca untuk FSVA 2025. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA menjelaskan bahwa tahun 2024 akan dilakukan perbaikan metodologi dengan penambahan indikator terkait resiliensi dan keberlanjutan. Pertemuan membahas verifikasi dan validasi data produksi sagu serta ketersediaan data komoditas perikanan dan cuaca dari tahun 2021 hingga 2023, yang menghasilkan kesepakatan bahwa data produksi sagu tahun 2023 akan disediakan oleh Ditjen Perkebunan Kementan, dan produksi ikan akan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan budidaya, dengan dukungan data dari KKP dan BMKG.

b.2. Pelaksanaan FGD Hasil FSVA Nasional Tahun 2024

FGD dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dengan narasumber dari BPS, Kemenkes, dan Kementerian Pertanian, serta dihadiri oleh perwakilan dari 11 OPD Pangan Provinsi dan 22 OPD Pangan Kabupaten/kota, termasuk tim Kelompok Kerja Pencegahan Kerawanan Pangan NFA, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi hasil FSVA

Nasional Tahun 2024 dengan menekankan pentingnya data valid dalam menggambarkan daerah rentan dan ketahanan pangan pada level kabupaten/kota. BPS menyampaikan bahwa data yang digunakan berasal dari susenas tahun 2023, mendukung aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sementara Pusdatin Kementan melakukan verifikasi data untuk komoditas seperti padi dan jagung, dan Kemenkes memvalidasi data terkait stunting serta kondisi gizi lainnya berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023. Diskusi mencakup analisis FSVA Nasional 2024, faktor penyebab perubahan status ketahanan pangan, dan konfirmasi daerah dari setiap indikator kepada OPD Pangan terkait. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA berencana mengadakan pertemuan dengan tim dan pakar untuk membahas hasil FSVA tahun 2025 berdasarkan ketersediaan data serta menyusun draft laporan FSVA Nasional yang akan diluncurkan secara soft pada 15 Oktober 2024.

c. FGD Pembahasan Reviu Metodologi FSVA

FGD dilaksanakan di Hotel Padjajaran Bogor pada 18 September 2024, dengan tujuan membahas hasil sementara dan narasi laporan FSVA 2024 serta mereviu metodologi baru untuk FSVA 2025. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dengan narasumber dari pakar Dr. Aaron Wise dan Dr. Farit M. Afendi, dihadiri oleh perwakilan WFP Indonesia, tim penyusun FSVA Nasional, dan staf Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA. Direktur menyampaikan pentingnya penyusunan FSVA sebagai instrumen perencanaan kebijakan pangan dan menekankan hasil analisis sementara FSVA 2024. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA akan melakukan finalisasi indikator dan penentuan bobot dari masing-masing indikator untuk metodologi baru FSVA 2025 pada 27 September 2024. Selain itu, akan diadakan pembahasan mengenai indikator dan ketersediaan data FSVA Provinsi dan Kabupaten/kota pada 20 September 2024, serta penyusunan draft laporan FSVA.

d. Koordinasi Verifikasi Metodologi Penyusunan FSVA 2025

Koordinasi dilaksanakan di Hotel Bandung pada 20 September 2024, untuk verifikasi data indikator penyusunan FSVA 2025 tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan OPD Pangan terkait. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dihadiri oleh narasumber dari kalangan pakar, serta perwakilan WFP Indonesia, OPD Pangan dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Direktur menekankan pentingnya pembaruan metodologi FSVA sebagai alat perencanaan kebijakan pangan serta ketersediaan data untuk metodologi baru tersebut.

Dalam pertemuan, dibahas mengenai ketersediaan data untuk indikator baru FSVA 2025 yang mewakili berbagai aspek ketahanan pangan. Indikator yang diusulkan untuk tingkat provinsi mencakup NCPR karbohidrat, angka konsumsi protein, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, dan prevalensi stunting, sementara untuk kabupaten/kota, indikator yang diusulkan antara lain luas lahan pertanian, sarana prasarana penyedia pangan, dan kondisi akses jalan.

Sebagai tindak lanjut, OPD Pangan provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk melengkapi data yang diperlukan untuk indikator yang telah disepakati. Selain itu, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA akan mengadakan diskusi dengan para pakar mengenai hasil indikator yang diusulkan oleh OPD Pangan daerah pada tanggal 26 September 2024.

e. FGD Penyusunan FSVA 2024 dan Lanjutan Pembahasan Metodologi FSVA 2025

FGD dilaksanakan di Hotel Mirah Bogor pada 26 September 2024, dengan tujuan untuk menyampaikan hasil FSVA Nasional 2024 kepada tim pakar, mendapatkan pandangan terkait hasil dan isu aktual FSVA, serta menentukan indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional 2025. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA dan dihadiri oleh tim pakar FSVA, perwakilan tim penyusun FSVA Nasional, WFP Indonesia, dan tim pencegahan kerawanan pangan NFA. Direktur menyampaikan hasil analisis sementara FSVA 2024, termasuk isu aktual yang perlu diperhatikan, seperti NCPR, prevalensi balita stunting, dan akses air bersih.

Dalam diskusi, disimpulkan bahwa hasil FSVA Nasional 2024 perlu dilengkapi dengan solusi strategis untuk memperbaiki kondisi ketahanan pangan, termasuk pemotretan khusus untuk Papua dengan indikator yang relevan. Metodologi untuk FSVA 2025 disepakati akan menganalisis ketahanan pangan berdasarkan tiga pilar, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, dengan bobot yang sama

menggunakan metode expert adjustment. Indikator yang diusulkan mencakup berbagai aspek, seperti NCPR karbohidrat, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, prevalensi stunting, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan mempersiapkan bahan untuk diseminasi soft launching FSVA Nasional 2024 di Surabaya. Selain itu, akan diadakan FGD lanjutan untuk menetapkan bobot dan pemilihan indikator FSVA daerah, memastikan integrasi dan relevansi data dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan ke depan.

f. Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat

Bimbingan Teknis (bimtek) dilaksanakan secara daring pada 17 September 2024, dengan tujuan meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam penyusunan FSVA Kabupaten/kota serta mempercepat realisasi dana dekonsentrasi tahun 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dan dihadiri oleh perwakilan dari 19 OPD Pangan Kabupaten/Kota di provinsi tersebut, dengan narasumber dari Direktur PKP NFA dan Perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Plt. Kadis Pangan Sumbar menekankan pentingnya informasi pangan yang akurat untuk pembangunan ketahanan pangan dan bagaimana hasil FSVA dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan terkait kerawanan pangan dan gizi.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA menyoroti urgensi penyusunan FSVA sebagai dasar untuk komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna mendapatkan dukungan dalam program pembangunan ketahanan pangan daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah serta pemanfaatan dana desa untuk intervensi ketahanan pangan. Kegiatan bimtek mencakup pemaparan materi tentang FSVA, evaluasi FSVA 2023 untuk provinsi dan kabupaten/kota, serta praktik pengunggahan FSVA interaktif, dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pasaman Barat, telah menyelesaikan Laporan FSVA 2024.

Evaluasi penyusunan FSVA 2023 menunjukkan beberapa kendala, termasuk belum adanya SK penetapan dari Kepala Daerah dan perlunya pembaruan peta dasar akibat pemekaran jumlah desa. Realisasi Dana Dekonsentrasi FSVA Provinsi Sumbar mencapai 27,22% pada 13 September 2024, dengan 80% kegiatan fisik telah dilakukan meski masih dalam proses penginputan SPJ. Sebagai tindak lanjut, Dinas

Pangan akan segera mengunggah hasil penyusunan FSVA 2023 ke website FSVA interaktif, melakukan mapping anggaran untuk refocusing, dan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melakukan pendampingan serta memantau realisasi dekonsentrasi FSVA tahun 2024.

g. Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Provinsi Aceh

Koordinasi dan bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan pada 29 September hingga 1 Oktober 2024, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam penyusunan FSVA Kabupaten/kota serta mempercepat realisasi dana dekonsentrasi tahun 2024. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh, dihadiri oleh perwakilan teknis dari 23 OPD Pangan Kabupaten/Kota di Aceh, dengan narasumber dari Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA. Dalam pembukaannya, Direktur NFA menegaskan pentingnya penyusunan FSVA sebagai alat untuk komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna mendukung program pembangunan ketahanan pangan daerah, serta perlunya kolaborasi pentahelix dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Kegiatan bimtek mencakup pemaparan materi tentang penyusunan FSVA 2024, inventarisasi ketersediaan data untuk setiap indikator, praktik analisis data, dan pemetaan. Secara umum, penyusunan FSVA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah memasuki tahap analisis data. Diskusi selama kegiatan menekankan urgensi dukungan dari pemerintah daerah untuk penguatan ketahanan pangan dan gizi, serta pemanfaatan anggaran dana desa untuk intervensi ketahanan pangan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pangan Provinsi dan kabupaten/kota ditargetkan untuk segera menyelesaikan laporan FSVA 2024 pada bulan Oktober 2024. Dinas Pangan Provinsi juga berkomitmen untuk mempercepat realisasi Dana Dekonsentrasi dengan target penyerapan 98 persen pada akhir Oktober 2024. Sementara itu, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA akan memberikan pendampingan dalam penyusunan FSVA dan memantau serta mempercepat realisasi dekonsentrasi penyusunan FSVA tahun 2024.

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan

a. Koordinasi Percepatan Realisasi Dana Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Rapat bertujuan untuk mempercepat penyerapan dana dekonsentrasi lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA menegaskan bahwa telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Sestama NFA No. 2040/PL.01.04/1/8/2024 tentang pengalihan perlengkapan, pendanaan, dan dokumentasi di bidang kerawanan gizi NFA ke Badan Gizi Nasional. Maka dari itu perlu dilakukan percepatan realisasi dana dekonsentrasi yang dikerjakan oleh OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota tahun 2024. OPD Pangan dapat menyelesaikan dana dekonsentrasi sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024, sedangkan untuk penyelesaian SPJ kegiatan intervensi maksimal dikirimkan ke pusat tanggal 10 September 2024. 20 Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu OPD Pangan Provinsi akan melakukan percepatan realisasi dana dekonsentrasi dan penyelesaian SPJ sebelum 22 Oktober 2024.

b. Pertemuan Pembahasan Program Makan Bergizi Gratis dengan Organisasi Badan Gizi Nasional (BGN)

Pertemuan yang diadakan di Avenzel Hotel Cibubur pada 4 September 2024 bertujuan untuk menyepakati Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) serta anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan ini dibuka oleh Kepala BGN dan dipimpin oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dihadiri oleh Tim Transisi BGN, Kemenpan RB, Kemenkeu, Bapanas, Kemen PPN/Bappenas, dan Tim Pakar. Selama tiga hari, pertemuan ini membahas lima agenda utama yang meliputi persetujuan SOTK dan Anggaran BGN, desain program Makan Bergizi Gratis, rencana kerja BGN, nomenklatur program dan fungsi anggaran BGN, serta penyesuaian RPJMN 2025-2029 dan rancangan awal Renstra BGN 2025-2029.

Program Makan Siang Gratis bertujuan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045, dengan sasaran mencakup anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pada pertemuan hari pertama, Kepala BGN menekankan pentingnya penyusunan SOTK yang ramping dan cepat selesai untuk mendukung proses selanjutnya. SOTK yang dirancang mencakup

jabatan dari Kepala hingga UPT dan jabatan fungsional, serta mempertimbangkan beban kerja di setiap unit. Diperlukan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk memberikan makanan bergizi kepada 15.600.000 siswa yang dijadwalkan mulai pada Januari 2025.

Tindak lanjut dari pertemuan ini mencakup penyusunan RPerbadan tentang SOTK BGN yang terdiri dari 17 Bab dan 168 Pasal. Setelah disepakati oleh Menpan RB, dokumen tersebut akan dikoordinasikan dengan Kemenkumham untuk legalitasnya. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 5 September 2024, untuk membahas desain program kerja Makan Bergizi Gratis, rencana kerja BGN, dan nomenklatur program serta fungsi anggaran BGN, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

c. ID-World Food Summit: Leading with Sustainability and Innovation

ID-World Food Summit: Leading with Sustainability and Innovation, yang digelar pada 5 September 2024 di JIExpo, membahas transformasi sektor pangan ASEAN agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global melalui kolaborasi multipihak. Dibuka oleh Ms. Rungphech Chitanuwat dari Informa Markets dan dimoderatori oleh Mr. Luke Tay dari Cornucopia FutureScapes, acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, seperti Dr. Nasir Latif (Farmfresh Industries) dan Ribut Purwanti (GAPMMI), yang menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan sinergi pentahelix (ABCGM) untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya ini mencakup pembangunan ekosistem pangan terintegrasi dari hulu ke hilir yang mendukung pengurangan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta mendorong pelaku usaha mempromosikan diversifikasi pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

d. FGD Penyusunan Materi Publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kerawanan Pangan

FGD dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024 bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang, bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan dalam penyusunan konsep materi publikasi KIE Pengendalian Kerawanan Pangan. FGD membahas strategi penyampaian pesan terkait kerawanan pangan agar lebih mudah dipahami publik, mengingat beragamnya persepsi masyarakat. Salah satu cara efektif adalah melalui video humanis yang membangun kesadaran, menggunakan tokoh berpengaruh sebagai Key Opinion Leader (KOL), dan memastikan konten sesuai etika, menjaga kerahasiaan data, serta mematuhi hak

cipta. Konten harus menggugah kesadaran akan dampak kerawanan pangan dengan narasi jelas dan sesuai budaya. Tahapan KIE dimulai dari membangun kesadaran hingga mendorong perubahan perilaku melalui kolaborasi dengan kanal komunikasi Kemenkominfo. Tim Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan menyiapkan materi publikasi yang fokus pada ancaman kerawanan pangan.

e. Kunjungan Kerja ke Cold Storage PT. Sinar Primera

Kunjungan kerja bertujuan untuk mendapatkan insight dan peluang kolaborasi untuk penyimpanan pangan agar pangan yang berkualitas tetap tersedia. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mengilustrasikan peluang kolaborasi antara pemerintah dan bisnis. Pemerintah menerima daging dam dari jamaah haji dan dapat menyimpannya pada cold storage yang dimiliki oleh PT Sinar Primera untuk kemudian didistribusikan pada orang yang tepat sasaran. Selain berkolaborasi dalam cold storage, kolaborasi dalam hal data center juga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan stok daging dam tersebut. Sementara PT Sinar Primera yang merupakan anak Perusahaan Sinarmas Asia Pulp and Paper sedang mengembangkan pembangunan fasilitas dry warehouse dan cold storage di Cibitung dan Narogong yang nantinya akan berfungsi sebagai first mile pada 25 rantai distribusi pangan. Cold storage di Pluit berfungsi sebagai distribution mile dan last mile yang berkapasitas 4.200 ton dengan lantai 1 terdiri atas 7 level tier dan lantai 2 terdiri atas 5 level tier. Cold storage di Pluit dapat digunakan untuk menyimpan produk pada suhu chiller 2°C dan suhu frozen -20 °C. Cold storage ini telah bersertifikat halal dan dalam proses pengajuan sertifikasi ISO Food Safety 22000.

f. FGD Riset Katalis Resiliensi Rantai Pasok Pangan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat

FGD dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, 11 September 2024, bertujuan untuk melakukan pendalaman terkait resiliensi rantai pasok dan hubungannya dengan gangguan iklim serta bencana alam di Provinsi Jawa Barat.

Kesimpulan FGD ini menyoroti kebutuhan untuk memeriksa fokus penelitian terkait gabah, beras, atau keseluruhannya serta memisahkan produsen dari segi hulu. Kajian juga harus mempertimbangkan dampak La Nina dan El Nino pada produktivitas padi dan menentukan cakupan wilayah studi, seperti Indramayu, Karawang, atau secara regional di Utara, Tengah, dan Selatan. Perlu definisi ulang rantai pasok dan identifikasi intervensi terkait perubahan iklim serta dampak industrialisasi. Data

ketersediaan, akses, pemasaran dari Bapanas dan data kebencanaan dari BMKG akan mendukung analisis. FGD lanjutan direncanakan untuk membahas karakteristik wilayah Jawa Barat dan intervensi kebencanaan yang sesuai di titik-titik tertentu.

g. Rapat Koordinasi FSVA Bersama Kemendagri

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, bertujuan untuk mensosialisasikan penyusunan dan pemanfaatan FSVA kepada stakeholder Provinsi dan Kabupaten/kota. Pertemuan dibuka oleh perwakilan Direktur SUPD I Ditjen Bina Bangda Kemendagri (Dyah Sulistianingsih, SIP, MA) dengan narasumber Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA menjelaskan: a) urgensi penyusunan FSVA; b) pemanfaatan FSVA; c) dukungan pemda dalam intervensi daerah rentan rawan pangan; d) pengalokasian anggaran APBD dalam penyusunan FSVA 2025; e) percepatan realisasi dana dekonsentrasi tahun 2024; dan f) pemanfaatan anggaran dana desa untuk intervensi dan ketahanan pangan daerah.

h. Koordinasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan T.A 2024

Pada tanggal 23-24 September 2024 di Jawa Timur, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan mengadakan koordinasi pelaksanaan dana dekonsentrasi mencakup tiga agenda : penyampaian hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di Kabupaten Kediri, kunjungan ke Ponpes Al Falah Jombang, dan koordinasi realisasi dana dekonsentrasi. Dalam KIE di Desa Tiron, Kediri, dipaparkan tantangan kerawanan pangan terkait minimnya tenaga kesehatan dan tingginya angka kemiskinan, namun peluang budidaya tanaman lokal serta lumbung pangan masyarakat juga diidentifikasi. Optimalisasi dana desa dan lahan pekarangan menjadi salah satu solusi dalam upaya ketahanan pangan daerah.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menekankan pentingnya pendampingan dari akademisi dalam program ketahanan pangan di Kediri melalui kegiatan KKN Tematik dan Sarjana Membangun Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sebagai off-taker produk UMKM juga didorong untuk mendukung perekonomian desa dan mengatasi kerawanan pangan melalui kolaborasi pentahelix. Pendekatan ini bertujuan membangun ekonomi masyarakat desa secara holistik dengan sinergi yang melibatkan berbagai sektor.

Koordinasi dana dekonsentrasi se-Jatim dihadiri 38 kabupaten/kota, membahas penuntasan program Penyusunan FSVA dan KIR pada Oktober. Dinas Provinsi diharapkan memfasilitasi kabupaten/kota dalam menyelesaikan FSVA agar target anggaran dan program tercapai. Disarankan alokasi APBD di tahun 2025 bagi wilayah yang belum menyelesaikan FSVA, demi kelanjutan intervensi pengendalian kerawanan pangan melalui peningkatan CPPD, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi penta helix.

i. Supervisi Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan di Kota Sabang

Supervisi dilaksanakan pada tanggal 29 September - 1 Oktober 2024, bertujuan untuk melakukan supervisi Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan melakukan studi di Kota Sabang yang merupakan daerah Perbatasan dan terluar tetapi masuk kategori tahan pangan. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan kondisi Ketahanan Pangan Kota Sabang berdasarkan FSVA Nasional. Sementara, Sekdis Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan terkait program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kota Sabang, produk pangan unggulan yang dikembangkan, pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Ketahanan Pangan, dan pembangunan demplot usahatani. Selain itu disampaikan upaya upaya yg dilakukan oleh pemda dalam menjaga Ketahanan Pangan berupa: (1) transportasi laut utk pangan, (2) pemenuhan air bersih utk konsumsi, (3) stabilisasi pasokan dan harga pangan, (4) upaya penurunan stunting. 30 Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan menyampaikan lesson learnt keberhasilan Kota Sabang sebagai daerah terluar dan perbatasan kepada daerah serupa yg masih masuk kategori rentan rawan pangan.

3. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan

a. Penyusunan Draft NSPK Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pada pertemuan dibahas Bab III dengan ruang lingkup: a) Potensi krisis pangan; b) Organisasi dan koordinasi; c) Fasilitas, sarana, dan prasarana; d) Tindakan mitigasi; e) Prosedur penanggulangan; f) Kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; g) Pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan; dan h) Pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat. Pada pertemuan dibahas pula Bab IV

yang terdiri dari sosialisasi, pendampingan teknis, dan supervisi pembinaan. Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan NFA akan melanjutkan penyusunan draft NSPK Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan Bab V – VIII serta modul contoh pelaksanaan program.

- b. FGD Pembahasan Ruang Lingkup Pelatihan dan Gladi Kedaruratan Krisis Pangan pada Juknis Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan

FGD dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, bertujuan untuk menyusun lanjutan Bab III (Pelaksanaan); Bab IV (Pembinaan); dan contoh alur cara penanggulangan krisis pangan. Dalam pertemuan dibahas: Bab III dengan ruang lingkup: (a) Potensi krisis pangan; (b) Organisasi dan koordinasi; (c) Fasilitas, sarana, dan prasarana; (d) Tindakan mitigasi; (e) Prosedur penanggulangan; (f) Kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; (g) Pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan; dan (h) Pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat. Bab IV dengan ruang lingkup: (a) sosialisasi; (b) supervisi dan bimbingan teknis; (c) contoh alur cara penanggulangan krisis pangan.

- c. FGD Pembahasan Bab Pelaksanaan pada Juknis Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan

FGD ini dilaksanakan di Hotel Savero Depok pada tanggal 27 September 2024 dengan tujuan mengumpulkan masukan dari berbagai direktorat untuk melengkapi Bab Pelaksanaan terkait kesiapsiagaan krisis pangan, yang mencakup aspek penurunan ketersediaan, lonjakan harga, dan penurunan konsumsi. Dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dengan narasumber dari IPB University, diskusi dihadiri perwakilan Direktorat SPHP, DCP, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, serta tim Kelompok Kerja Pencegahan Kerawanan Pangan NFA. Program kesiapsiagaan akan merinci langkah identifikasi, mitigasi, dan penanggulangan dalam menghadapi krisis pangan, dengan fokus pada koordinasi, fasilitas pendukung, pelatihan, dan komunikasi kepada masyarakat. Direktorat PKP NFA akan menindaklanjuti hasil diskusi ini bersama biro OSH untuk legal drafting.

4. Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

a. Rapat Koordinasi Administrasi Pertanggungjawabab Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan T.A 2024

Rapat Koordinasi Administrasi Pertanggungjawaban Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2024 dilaksanakan secara online pada tanggal 10 September 2024 yang bertujuan untuk: (1) membahas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan IPKP Tahun 2024; dan (2) Perkembangan pemanfaatan Anggaran Kegiatan IPKP oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi lokus kegiatan atas dukungan dan kerjasama yang baik, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Namun demikian, masih diperlukan dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang harus segera dilengkapi agar pelaksanaannya akuntabel. Direktur juga menyampaikan bahwa ke depan, dalam pelaksanaan kegiatan serupa, perlu dilakukan sosialisasi kepada penerima terkait maksud dan tujuan pemberian bantuan serta asal bantuan. Rencana tindak lanjut yg akan dilakukan, yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan merevisi sisa anggaran untuk alokasi kegiatan Pusat dan menyerahkan sisa pagu Direktorat yang tidak dialokasikan /di luar perencanaan kepada Biro PKH.

b. FGD Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024

FGD dilaksanakan pada 26-27 September 2024 di Savero Hotel Depok, bertujuan untuk; (1) Memperoleh informasi terkait pelaksanaan penyaluran kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan serta dinamikanya; (2) Membahas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Pertemuan yang dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan ini dihadiri oleh PT Lima Anugerah Sejahtera (PT. LAS) sebagai penyedia, PT Pos Indonesia sebagai transporter, dan Tim Pokja Penanganan Kerawanan Pangan D21, dengan fokus pada pentingnya dokumen pertanggungjawaban yang akuntabel dan terukur sesuai dengan Petunjuk Teknis. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan terdokumentasi dengan baik.

PT. LAS melaporkan bahwa kegiatan intervensi sudah mencapai 100% dan pembayaran telah dilakukan. Proses pengadaan hingga penyaluran paket bantuan

pangan dijelaskan, lengkap dengan dokumen pertanggungjawaban seperti BAST, Tanda Terima BNBA, dan dokumentasi lainnya, termasuk pengemasan dan distribusi bantuan kepada penerima.

PT. Pos Indonesia juga melaporkan bahwa penyaluran bantuan pangan selesai tepat waktu pada 31 Juli 2024, sesuai jadwal yang disepakati. Namun, dari pengecekan sampling dokumen pertanggungjawaban, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan Petunjuk Teknis, seperti alasan penggantian bantuan yang tidak mengikuti terminologi teknis yang ditentukan dan kurangnya lampiran Surat Pernyataan Menolak Menerima Bantuan di beberapa wilayah.

Sebagai tindak lanjut, PT LAS dan PT Pos Indonesia akan memperbaiki dan melengkapi foto kegiatan serta dokumen pertanggungjawaban yang belum sesuai. Tim D21 berkoordinasi dengan PPK, penyedia, dan transporter untuk memastikan semua dokumen administrasi dan akuntabilitas kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

5. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan

a. FGD Pra-Diseminasi Hasil Analisis Kerawanan Pangan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan

FGD dilaksanakan secara hybrid pada 11-12 Sept 2024 bertempat di Hotel Savero Depok yang bertujuan untuk: (1) Membahas hasil final analisis kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan; dan (2) Membahas konsep acara diseminasi

Diskusi menyoroti pentingnya diseminasi hasil analisis kerawanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten, yang menunjukkan perbedaan sosial-ekonomi rumah tangga dan karakteristik wilayah secara kontras. Hasil analisis dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota berpotensi dikembangkan hingga level desa dengan data by name by address (BNBA), yang dapat diintegrasikan dengan data lain seperti PK, P3KE, dan Regsosek, meski diperlukan regulasi untuk memanfaatkan data ini.

Tindak lanjut meliputi pelaksanaan diseminasi pada 3 Oktober 2024 di Jakarta, dengan konsep acara final yang akan mencakup video, talkshow, dan narasumber. Tim Pokja juga akan berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K untuk mengembangkan data hingga level BNBA, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, waktu, serta dukungan regulasi dalam pemanfaatannya.

b. FGD Finaslisasi Penyusunan Buku Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan

FGD dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024 di Hotel Aloft, bertujuan untuk melakukan pembahasan format penulisan, isi/muatan substansi, visualisasi penyajian, dan finalisasi keseluruhan Buku Analisis Kerawanan Pangan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan.

Format buku yang akan disusun telah disepakati sesuai standar publikasi, dengan referensi dari literatur dan buku terbitan BPS sebelumnya, serta akan memuat sambutan dari Deputi 2 NFA dan Deputi Statistik Sosial BPS, serta kata pengantar dari Dir 21 NFA. Buku ini akan memadukan tabel dan grafik dengan penjelasan singkat yang informatif, dan akan didistribusikan kepada pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

Tindak lanjutnya meliputi finalisasi format dan visual buku berdasarkan masukan yang diterima dalam pertemuan. Buku ini ditargetkan dicetak pada akhir September dan dipublikasikan pada acara diseminasi hasil analisis kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan yang dijadwalkan pada awal Oktober 2024.

2.2. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

a. Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Rilis September 2024)

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan). Penyusunan SKPG bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait

dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 42,61% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 0,19% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 23 provinsi (60,53%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 3 provinsi (7,89%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 12 provinsi (31,58%) tidak mengalami bencana.



b. Optimalisasi Perencanaan Pangan Daerah, NFA; *Workshop Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2024*

Badan Pangan Nasional dorong daerah perkuat kebijakan dan program Penanganan Kerawanan Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia serta untuk mengoptimalkan perencanaan kebijakan dan program penanganan kerawanan pangan. Dalam sambutannya, Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo mengatakan, Pemahaman yang mendalam mengenai PoU sangat penting bagi OPD daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Melalui workshop ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih efektif dalam menangani isu pangan dan mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- Perhitungan Susut dan Sisa Pangan: Diperlukan perhitungan yang akurat guna mencapai target pengurangan per tahun
- Gelorakan spirit IDAFLW 2024, Badan Pangan akan terus membumikan Gerakan Stop Boros Pangan dan Penyelamatan Pangan di Indonesia

Badan Pangan Nasional (NFA) terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi susut dan sisa pangan (SSP) demi mencapai target pengelolaan SSP sebesar 50% pada 2030 dan 75% pada 2045. Dalam peringatan Hari Kesadaran Internasional tentang SSP di Surakarta, Deputy Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, menekankan pentingnya perilaku hemat pangan sebagai langkah menuju kedaulatan pangan di Indonesia. NFA, bekerja sama dengan berbagai organisasi, telah menjalankan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) yang berhasil menyelamatkan sekitar 71.968 kg pangan hingga 2024, dengan harapan memperkuat gerakan ini secara nasional melalui regulasi SSP.

Pada kegiatan itu, Badan Pangan Nasional juga memberikan Anugerah Penyelamatan Pangan kepada pemerintah daerah, komunitas, dan perusahaan yang aktif dalam penyelamatan pangan, termasuk Pemerintah Kota Surakarta dan Kota Tasikmalaya serta komunitas seperti Foodbank of Indonesia dan Scholars of Sustenance. Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, berharap gerakan stop boros pangan yang masif akan berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seraya mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju yang berkelanjutan pada 2045.

c. Sosialisasikan Selamatkan Pangan, NFA ajak Siswa Berperan Aktif Mensosialisasikan GSP

Pada kegiatan Remaja Putri Sehat Aktif Produktif (PUTRI SAKTI) dan Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (GaRANGASEM) di Semarang, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi NFA, Nita Yulianis, memaparkan bahwa sekitar sepertiga pangan dunia atau 1,3 miliar ton terbuang setiap tahun, dengan SSP di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun. Konsumsi menjadi titik kritis dengan potensi menyelamatkan pangan untuk 62-125 juta orang jika dikelola lebih baik. NFA telah meluncurkan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) pada 2022 untuk mengurangi SSP melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Semarang, Endang Sarwiningsih, menguatkan komitmen mengurangi SSP melalui GaRANGASEM, sementara Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Pramusinto, mengapresiasi inisiatif edukasi ini yang ditargetkan juga bagi siswa SD dan PAUD. Dalam acara tersebut, digelar lomba kreasi pangan berlebih guna mendorong konsumsi pangan sehat, inovasi dan edukasi.

- d. Kepala Badan Pangan Nasional; Arief Prsaetyo Adi Jaga Komitmen Bersama Atasi Susut dan Sisa Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya komitmen bersama antara berbagai pemangku kepentingan untuk menurunkan angka Susut dan Sisa Pangan (SSP) sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia di tingkat global. Dalam peluncuran Metode Baku Perhitungan SSP di Jakarta, Arief menjelaskan bahwa metode ini penting untuk mengukur dan mengurangi SSP yang dihasilkan di setiap tahap rantai pasok pangan. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah

- e. Ujicoba Perhitungan Susut Dan Sisa Pangan di Jawa Timur, NFA : Akurasi Data SSP Penting Untuk Penyusunan Kebijakan Dan Perencanaan

Data akurat mengenai susut dan sisa pangan sangat penting untuk menyusun kebijakan yang efektif serta perencanaan penurunan SSP dalam lima tahun ke depan. Untuk itu, 38 dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten/kota se-Jawa Timur melakukan uji coba perhitungan SSP dalam Rapat Koordinasi Gerakan Selamatkan Pangan pada 26 September 2024.

2. Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- a. Sinergi Program Genius: Bentuk Kehadiran Negara Penuhi Kebutuhan Gizi Anak

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak-anak melalui pemenuhan gizi yang optimal, salah satunya melalui Gerakan Edukasi Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (GENIUS) yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (NFA). Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, menegaskan pentingnya program ini untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang gizi yang baik, serta berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dalam kegiatan supervisi program GENIUS di SDN 028227 Kota Binjai, Nyoto dan pejabat daerah lainnya menekankan manfaat pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sejak dini untuk menciptakan generasi sehat dan produktif.

- b. Monitoring Program GENIUS : Langkah Strategis Menuju Generasi Emas 2045

Dalam upaya mendukung visi Generasi Emas 2045, Badan Pangan Nasional (NFA) melaksanakan monitoring program Gerakan Edukasi Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa (GENIUS) di beberapa sekolah di Sukabumi, bertujuan memastikan bahwa generasi muda memperoleh asupan gizi yang memadai dan berkualitas. Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, menjelaskan bahwa monitoring ini melibatkan evaluasi terhadap pemilihan bahan pangan hingga

penyajian makanan di sekolah, dengan penekanan pada pentingnya gizi yang baik untuk mencapai visi tersebut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

c. Uji Coba Makan Bergizi Gratis, NFA Dorong Ekosistem Pangan Terintegrasi
Tunjang Program MBG

Dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (NFA) melakukan kunjungan kerja ke lokasi Uji Coba Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Institut Food Security Research (IFSR). Kegiatan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan makanan bergizi yang berkualitas serta meninjau proses pengolahan hingga distribusi makanan. Di lokasi tersebut, UPT MBG memproduksi paket makan siang sebanyak 3.313 porsi setiap hari untuk 20 sekolah, termasuk siswa SD, SMP, SMA, dan Pondok Pesantren di sekitar wilayah.

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 9.931.839.677,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut

3.1. Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah:

1. Sosialisasi Konsumsi Buah dan Sayur di Bulungan Run 2024

Badan Pangan Nasional mendorong perubahan perilaku ini dengan pendekatan yang relevan bagi generasi muda. Salah satu cara efektif yang dilakukan adalah melalui keterlibatan dalam kegiatan olahraga, seperti pada Bulungan Run 2024. NFA melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan membagikan jus segar dan buah pisang pada peserta lari sebagai refreshment setelah sebagai bentuk dukungan serta pengingat akan pentingnya pola makan sehat.

2. Monev Kegiatan Rumah Pangan B2SA Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten merupakan salah satu penerima manfaat Program Rumah Pangan B2SA. Edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman

(B2SA) bagi orang tua menjadi hal krusial dalam upaya pencegahan stunting di keluarga.

3. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA Melalui Kegiatan Kuliah Umum di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda salah satunya melalui kegiatan kuliah umum yang dilaksanakan di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia. Terbatasnya keberagaman pangan yang dikonsumsi, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya nilai gizi di masyarakat saat ini merupakan akar dari permasalahan konsumsi pangan yang tidak B2SA, Sehingga peningkatan pengetahuan dan edukasi kepada generasi muda akan pentingnya konsumsi pangan B2SA menjadi langkah strategis untuk mengubah pola pikir makan asal kenyang.

4. Monev Kegiatan Rumah Pangan B2SA Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program peningkatan gizi melalui konsumsi pangan B2SA berjalan dengan baik. Program pemberian makanan di Rumah Pangan B2SA Desa Bedono telah dilaksanakan sebanyak 37 kali dari target 60 kali, Adapun penerima manfaat makanan B2SA diantaranya 40 balita gizi kurang sebagai penerima manfaat. Program ini menjadi bagian dari upaya penanganan masalah stunting di desa tersebut.

5. Monev Kegiatan Rumah Pangan B2SA Desa Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Melalui kegiatan pemberian makanan B2SA kepada kelompok sasaran stunting, status gizi balita bisa meningkat sehingga optimis dapat mencapai zero stunting tahun ini, meskipun kondisi desa sedang tidak baik akibat kekeringan. Program Rumah Pangan B2SA di Desa Gendayakan telah dilaksanakan sebanyak 31 kali, menjangkau 41 penerima manfaat, yang terdiri dari tiga anak stunting, satu ibu hamil, lima ibu menyusui, dan 32 balita dengan

status gizi kurang. Rencananya, program ini akan dilanjutkan hingga 55 kali pemberian makanan, dengan frekuensi tiga kali seminggu pada pukul 10 pagi, hingga November mendatang. Usai itu, pendanaan program akan dialihkan ke dana desa yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa.

6. B2SA Goes to School

Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) menggencarkan upaya penganeekaragaman pemantapan konsumsi pangan dalam rangka pencapaian target skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) di GOR Universitas Mulawarman, Kota Samarinda. Dalam kegiatan ini, lebih dari 1.000 mahasiswa dan 13 Fakultas hadir untuk mendapatkan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan yang Beragam

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rumah Pangan B2SA di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aer Tembaga, Kota Bitung

Kegiatan pemberian makanan B2SA di Rumah Pangan telah mencapai 24 kali dari total 50 kali dengan menggunakan dana APBN, untuk selanjutnya pemberian makan akan dilanjutkan dengan dana desa hingga bulan Desember 2024

8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rumah Pangan B2SA di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Diketahui bahwa program pemberian makanan B2SA di Rumah Pangan B2SA telah dilaksanakan sebanyak 17 kali, dengan sasaran 40 balita kurang gizi. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga bulan November 2024 dengan frekuensi pemberian makanan 4 kali dalam seminggu, dan akan terus berlanjut dengan dukungan dana desa yang telah dipersiapkan. Kepala Desa Aluh Aluh menyampaikan laporan bahwa, kegiatan Rumah Pangan B2SA berperan dalam menurunkan angka stunting. Dalam dua tahun terakhir, Desa Aluh Aluh Besar berhasil turun dari peringkat pertama sebagai desa dengan angka stunting tertinggi di Kecamatan Aluh Aluh, kini menjadi peringkat kelima dari 19 desa. Dalam Monitoring ini, NFA menekankan pada edukasi yang diberikan terkait pola makan sehat ini supaya dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

9. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pengolahan Pangan Lokal

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan usaha pangan lokal, terutama di kalangan UMKM dan IKM, melalui pendekatan berbasis potensi sumber daya lokal. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 peserta yang terdiri dari 20 perwakilan Dinas Pangan Provinsi serta 32 pelaku usaha penerima manfaat kegiatan PUPPL (Program Usaha Pengembangan Pangan Lokal). Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Prof. Achmad Subagio sebagai pakar olahan singkong dari Universitas Jember, Dialekha Ryan Permata dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM.

10. Sosialisasi Perpres 81 Tahun 2024

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bergerak cepat untuk mendorong implementasi Perpres 81 melalui kegiatan Sosialisasi Perpres 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilaksanakan pada hari Senin, 30 September 2024 di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sosialisasi ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota lingkup Provinsi NTT, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, seluruh unsur Forkopimda NTT, tim ahli Perpres Penganekaragaman Pangan Prof. Achmad Suryana, Prof. Agung Hendriadi, Dr. Mulyono Machmur, perwakilan dari unsur perguruan tinggi dan organisasi masyarakat pemerhati, penggiat pangan lokal, serta Dinas Pangan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang hadir secara daring. Sosialisasi Perpres di NTT merupakan penanda komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait untuk mengarusutamakan pangan lokal.

3.2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan adalah:

1. Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawas keamanan pangan segar di daerah. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

pengawas keamanan pangan segar merupakan salah satu kunci keberhasilan kinerja dalam menciptakan 7 Laporan Bulan September 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sistem pengawasan keamanan pangan nasional. Melalui dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di Daerah akan berjalan baik dan optimal. Dalam rangka menciptakan tenaga pengawas keamanan pangan di daerah yang handal dan profesional, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menggandeng Fakultas Teknologi Pertanian UGM mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 2–6 September 2024 di DI Yogyakarta.

2. Pembahasan Rekomendasi Zat Gizi RSNi

Badan Pangan Nasional sedang berproses untuk menyusun RSNi Beras Fortifikan. Regulasi terkait beras fortifikasi nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan fortifikasi beras, sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan zat gizi harian masyarakat. Sebelumnya telah diselenggarakan Rapat Teknis 2 Pembahasan RSNi Kernel Beras Fortifikan pada 20 Agustus 2024, namun masih terdapat pending issue terkait dengan rekomendasi zat gizi. Menindaklanjuti adanya pending issue tersebut dilakukan Rapat Pembahasan Rekomendasi Zat Gizi RSNi secara daring pada 7 September 2024 melalui media zoom meeting. Rapat ini dihadiri oleh pakar IPB, staf Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian BSN serta fungsional dan staf Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Pembahasan rapat difokuskan untuk membahas pending issue terkait perhitungan rekomendasi zat gizi. Adapun kesimpulan rapat yang disepakati adalah penambahan batas maksimal zat besi sebesar 150% (1,5 kali dari kebutuhan asupan) dari batas minimal yang ditambahkan serta penambahan vitamin B12 sebagai vitamin yang dapat ditambahkan dalam kernel.

3. Mengikuti Pertemuan USDA Cooperation on Global Pesticide Engagement with ASEAN Member State

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan sistem registrasi pestisida dan batas maksimal residu (BMR) pestisida untuk memfasilitasi perdagangan regional. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura)

mendapatkan fasilitasi proyek dengan dukungan USDA dan mitranya terkait penerapan pedoman APEC iMRLs pestisida pada bahan Trifloxystrobin aktif (anggur), Chlorantraniliprole (buah Hop), Spinetoram (cherries), dan Zeta-Cypermethrin (blubberies). Pada pertemuan ini juga dilakukan FGD antara fasilitator dengan negara-negara ASEAN, untuk mendapatkan informasi terkait dengan 9 Laporan Bulan September 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan kebijakan/peraturan setiap negara dalam hal penanganan pestisida dan BMR-nya serta mendapatkan informasi fasilitasi yang diperlukan untuk mendukung keselarasan dalam kebijakan tersebut.

4. Sampling Kajian Mutu Beras Premium dan Medium di Peredaran

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, melaksanakan sampling beras premium dan medium di peredaran baik di pasar tradisional maupun retail di daerah sentra produksi beras pada tanggal 9–19 September 2024. Pengambilan sampel dilaksanakan di 10 titik lokasi yang tersebar di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Hasil kajian beras ini akan didiskusikan lebih lanjut bersama dengan pakar, pelaku usaha dan instansi terkait untuk kemudian dijadikan rekomendasi bagi standar regulasi yang saat ini telah ditetapkan.

5. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyusun Rancangan Peraturan Badan tentang Standar Mutu Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan. Rancangan Peraturan Badan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka diversifikasi pangan lokal yang bermutu dan berdaya saing.

Standar mutu produk pangan segar ditetapkan untuk 6 jenis pangan pokok yakni diantaranya adalah jagung, sagu, sorgum, talas, ubi jalar dan ubi kayu. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Pangan Lokal, Badan Pangan Nasional melaksanakan rapat Harmonisasi

Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan pada tanggal 18 September 2024 di Jakarta secara hybrid.

Rapat ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait yakni Kemenkumham, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pertanian, BRIN, BPOM, Kementerian Perindustrian. Pada pertemuan ini disepakati substansi yang diatur dalam RanPerbadan tentang Standar Mutu Pangan Lokal dan harmonisasi dinyatakan selesai. Adapun tindak lanjut dari rapat ini akan dilakukan penyempurnaan drafting dan penyampaian izin presiden melalui Sekretariat Kabinet.

6. Pertemuan Penilaian Sistem Manajemen Kelembagaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKKPD Kabupaten/Kota

Tahap pertama, pertemuan penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 di Bogor dan dihadiri oleh tim penilai dari 5 OKKPD Provinsi yaitu Jawa Tengah, Jambi, Gorontalo, Sumatera Barat dan Bengkulu. Total kabupaten/kota yang dinilai pada pertemuan ini sebanyak 32 kabupaten/kota.

Total penilaian OKKPD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan adalah sebanyak 93 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kegiatan penilaian ini merupakan pelaksanaan dekonsentrasi yang dilakukan oleh OKKPD Provinsi. Adapun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah melakukan sidang evaluasi atas hasil verifikasi yang dihadiri oleh tim penilai OKKP Pusat untuk finalisasi hasil penilaian.

7. Mengikuti Rapat Persiapan Sidang Codex Committee on Residue Veterinary Drugs in Food

Rapat ini ikut melibatkan K/L terkait, salah satunya Badan Pangan Nasional yang merupakan Alternate Coordinator MC CCRVDF. Rapat dihadiri oleh perwakilan BSIP, Badan Pangan Nasional, BSN, BRIN dan BB Veteriner Kementerian Pertanian. Rapat ini merupakan lanjutan dari FGD Pembahasan CL dan Posisi Indonesia pada sidang CCRVDF ke-27 yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024. Pada rapat hari ini dibahas 5 agenda item, termasuk 2 Circular Letter (CL). Pada rapat ini diperoleh kesepakatan yakni terkait MRL Klopido pada SNI 9223:2023, direncanakan akan ada kajian untuk

revisi setelah penetapan oleh Codex. Kemudian terkait pembahasan agenda item 7, 8, 9 dan 10 disepakati untuk dibahas pada agenda rapat selanjutnya.

8. Penyampaian Hasil Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pada tanggal 17 September 2024, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari BPOM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil rapat koordinasi tersebut disampaikan kepada masing-masing kementerian/lembaga pada tanggal 23 September 2024.

Kesimpulan dari koordinasi ini menyatakan bahwa Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian sepakat untuk tetap menggunakan rumusan yang terdapat dalam naskah RPP sebelumnya. Namun, BPOM belum dapat menyepakati hasil pembahasan dan akan melaporkannya kepada pimpinan. Kemenko Perekonomian juga akan segera mengagendakan Rakornis Tingkat Eselon I untuk membahas dan menetapkan isu-isu yang tertunda dalam naskah RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019.

9. Pembahasan Draft Code of Practice pada sidang Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)

Terdapat 2 agenda pembahasan draft Code of Practice (CoP) yaitu:

- Proposed revised CoP for the prevention and reduction of aflatoxin contamination in peanuts (CXC55-2004) dan
- Proposal for new work on a CoP for the prevention and reduction of cadmium contamination in foods.

Rapat menyepakati usulan Code of Practice for The Prevention and Reduction of Aflatoxin Contamination in Peanuts terhadap cara penanganan yang baik pada tahap pre-harvest, harvest dan post-harvest. Sedangkan untuk Code of Practice for The Prevention and Reduction of Cadmium Contamination on Foods terkait rekomendasi ruang lingkup serta struktur

Code of Practice (CoP). Adapun tindak lanjut dari rapat ini adalah Badan Pangan Nasional sebagai alternate MC akan menyusun masukan Indonesia untuk Draft Code of Practice (CoP), kemudian disampaikan kepada BPOM selaku MC untuk dikirimkan ke platform eWG Codex.

10. Penyampaian Posisi Indonesia pada electronic Working Group (eWG) Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)

Badan Pangan Nasional sebagai Alternate Committee Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) telah melaksanakan rapat pembahasan draft Code of Practice (CoP) for the prevention and reduction of aflatoxin contamination in peanuts dan Code of Practice (CoP) for the prevention and reduction of cadmium contamination in foods. Rapat tersebut menghasilkan masukan Indonesia yang disampaikan melalui BPOM selaku Koordinator Mirror Committee untuk dikirimkan melalui platform eWG CCCF. Masukan/posisi Indonesia terhadap dua draft Code of Practice (CoP) telah dikirimkan kepada BPOM pada tanggal 26 September 2024

11. Rapat Konsensus Pembahasan RSNI Kernel Beras Fortifikan

Penyusunan RSNI kernel beras fortifikan ditujukan sebagai acuan standar beras fortifikasi yang beredar dan beras fortifikasi yang ditujukan sebagai bantuan pangan pemerintah dalam rangka perbaikan status gizi masyarakat. Ruang lingkup RSNI Kernel Beras Fortifikan meliputi persyaratan keamanan dan mutu kernel, metode fortifikasi, cara produksi pangan yang baik (bahan baku, BTP, pengendalian proses produksi, pengemasan dan penyimpanan); pelabelan, serta prosedur uji. Rapat konsensus menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

- Substansi terkait ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, bahan, persyaratan umum mutu kernel beras fortifikan, pengambilan contoh dan metode uji, cara produksi pangan yang baik, pengemasan dan penyimpanan, pelabelan, lampiran, serta bibliografi.
- Terkait zat gizi yang wajib ditambahkan pada kernel beras fortifikan dan zat gizi yang opsional beserta persyaratan nilai kandungan zat gizinya.

3.3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan prioritas selama periode bulan September tahun 2024 yang telah dilaksanakan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan adalah:

1. AEA-Koordinasi (Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan)

a. Evaluasi Pasar Pangan Segar Aman Tahap I

Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) Tahap I Tahun 2024, dan menggali rekomendasi perbaikan konsep dan implementasi program PAS AMSN, dihadiri oleh peserta dari dinas yang menangani urusan pangan yang mendapatkan program PAS AMAN dan perwakilan Tim ICS dari 11 provinsi dan 32 Kab/Kota.

Dari hasil paparan dan evaluasi dapat dicatat ampak positif dari pelaksanaan program PAS AMAN diantaranya adalah :Sanitasi Pasar menjadi lebih baik/tertata dan bersih; persepsi pedagang dan konsumen terhadap keamanan pangan lebih baik; adanya peningkatan frekwensi sampling pengujian keamanan pangan segar; pendataan pedagang PSAT untuk menjamin ketelurusan produk.

Hambatan dalam implementasi program PAS AMAN diantaranya adalah: Masalah fasilitas dan sarana sanitasi higiene belum memadai dan optimal; Kesadaran pedagang dan konsumen yang perlu terus dikuatkan; belum semua melaksanakan tindak lanjut hasil pengujian; masih ada beberapa pedagang yang menempati lapak tidak sesuai zona; terbatasnya SDM yang kompeten; Pergantian personel Tim ICS yang sudah terlatih;

b. Pertemuan Evaluasi Pasar Pangan Segar Aman (PAS Aman) Tahun 2024 Tahap II

Pertemuan Evaluasi bertujuan untuk mereview pelaksanaan kegiatan PAS Aman Tahun 2024, mendapatkan best practice pengelolaan pasar aman, dan mendapatkan rekomendasi penyempurnaan kegiatan PAS Aman. Dari hasil paparan dan evaluasi peserta dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Hasil identifikasi permasalahan di lokasi PAS Aman mencakup: kondisi sarana

prasarana pasar masih belum seluruhnya memenuhi persyaratan sanitasi hygiene, keterbatasan SDM pengelola pasar, masih kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat terkait keamanan pangan, dan masih ditemukan pangan segar yang terindikasi tidak aman. b. Tim Pembina Provinsi, bersama dengan Tim Teknis Kab/Kota dan ICS telah melakukan intervensi dan inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut namun belum optimal dilakukan, karena partisipasi dan dukungan lintas sektor masih lemah.

c. Peringatan The International Day of Awareness of Food Loss and Food Waste 2024

Peringatan IDAFLW bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas serta aksi pencegahan dan pengurangan Susut dan Sisa Pangan (FLW).

Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Bapanas bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam rangkaian EXPO IDAFLW yaitu coaching clinic terkait perizinan PSAT dan pengujian residu pestisida PSAT. Pengujian residu pestisida PSAT dilakukan menggunakan rapid tes kit. Sampel pengujian yang digunakan antara lain: cabai merah keriting, sawi hijau, sawi putih, kacang panjang, dan tomat yang diperoleh dari Pasar Legi, Surakarta. Pengujian residu pestisida terhadap sampel PSAT tersebut menunjukkan hasil negatif.

d. Festival Urban Farming Jakarta 2024

Festival Urban Farming Jakarta 2024 berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 17-19 September 2024, dengan tujuan mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam pertanian perkotaan demi ketahanan pangan Jakarta. Kegiatan ini meliputi seminar, pameran inovasi, bazaar produk, bimbingan teknis, lomba, dan pemilihan Duta Urban Farming, dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta dan diwarnai penampilan Puteri Indonesia Lingkungan 2024, Sophie Kirana. Badan Pangan Nasional berpartisipasi dalam pameran, memperkenalkan program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah serta keamanan pangan segar. B2SA mendorong pola konsumsi sehat dan bergizi,

sementara keamanan pangan segar mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah kontaminasi pangan, termasuk dengan mencuci tangan, memilih pangan terdaftar, dan memasak hingga matang. Kegiatan ini mendukung pengentasan stunting secara nasional melalui pengembangan desa B2SA.

2. PCA-PERIZINAN PRODUK (SERTIFIKAT SARANA DAN PRODUK PANGAN SEGAR)

a. Penerbitan Sertifikat SPPB PSAT dan Registrasi Izin Edar

Penerbitan sertifikat SPPB PSAT dan Registrasi Izin edar, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada bulan September 2024, adalah menerbitkan 194 Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT PL) dan 9 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPBB-PSAT). Proses pelayanan atas permohonan masuk meningkat sebesar 31.8%, peningkatan penerbitan sertifikat perizinan 52.7% dan permohonan yang tidak memenuhi syarat meningkat 15.5%. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat telah melakukan audit lapang ke pelaku usaha atas permohonan untuk menerbitkan izin edar Sertifikat SPBB-PSAT 9 kali.

b. Rapat Pembahasan Koordinasi dalam rangka Implementasi Kerjasama antara Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal, Kemenag dengan Badan Pangan Nasional

Rapat merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pada tanggal 12 September 2024 sebagai konsekuensi penandatanganan nota kesepahaman Nomor : 01 / HK.03.01/K/12/2023 Badan Pangan Nasional dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengenai “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal”, yang bertujuan untuk memfinalkan draft PKS khususnya yang terkait dengan ruang lingkup serta HAK dan KEWAJIBAN masing-masing pihak.

Draft PKS terdiri dari 13 BAB dengan ruang lingkup Kerjasama berupa: a.pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi jaminan produk halal di bidang pangan; b. pengawasan terhadap label produk pangan segar di peredaran yang wajib bersertifikathalal; c. tindak lanjut hasil pengawasan terhadap label produk pangan segar di

Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan September 2024 14 peredaran yang wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; d. sosialisasi, edukasi, publikasi, dan/atau promosi jaminan produk halal di bidangpangan; e. fasilitasi, pembinaan dan/atau pendampingan jaminan produk halal kepada pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Rapat Komisi Teknis OKKP-Pusat

Rapat ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higiene Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), sehingga proses audit dalam penerbitan SPPB-PSAT dapat lebih obyektif, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Komtek, terdapat dua perusahaan dari tujuh yang diajukan untuk dilakukan surveilan lebih awal. Tim Komtek menyetujui penerbitan SPPB-PSAT untuk tujuh perusahaan tersebut dengan beberapa rekomendasi, termasuk memperbaiki diagram alir dan dokumen standar mutu produk, menyesuaikan SOP penggunaan APD, serta memastikan SOP pemusnahan produk dan pemutakhiran SOP fumigasi. Selain itu, uji residu phospin harus dilakukan secara periodik terhadap produk yang telah difumigasi.

Tindak lanjut dari pembahasan ini mencakup penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) keamanan pangan kepada pelaku usaha agar dapat menerapkan SOP dengan efektif. Selain itu, rekomendasi catatan dari tim Komtek akan disampaikan kepada pelaku usaha yang direkomendasikan untuk penerbitan SPPB-PSAT, dan surveilan akan diprioritaskan untuk perusahaan yang memiliki catatan perbaikan terbanyak.

3. QIA-PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUK

- a. Forum Group Discussion lanjutan Penyusunan Indeks Keamanan Pangan (IKP)
Rapat bertujuan mendapatkan masukan dari masing-masing K/L terkait identifikasi komponen indikator, penentuan interval nilai dan pembobotan untuk penyusunan Indeks Keamanan Pangan.

Berdasarkan masukan peserta rapat, maka disepakati indikator - sub indikator dan data yang digunakan sebagai berikut: a) SDM dan kelembagaan (bobot 20) - Regulasi : penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan lain-lain; - SDM : proporsi jumlah pengawas dibandingkan dengan jumlah pasar; - Lab uji: proporsi jumlah laboratorium dibandingkan dengan jumlah pasar. b) penjaminan keamanan pangan (bobot 36) - Pangan aman: persentase pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik uji dengan rapid test kit maupun laboratorium; - Jumlah sampel : jumlah sampel yang diujikan oleh daerah, dengan menggunakan APBN dan APBD; - Lembaga: proporsi kabupaten/kota yang telah menggunakan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan izin edar; Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan September 2024 16 c) Perdagangan (bobot 20) - izin edar : jumlah nomor izin edar yang telah diterbitkan oleh OKKPD. d) Kesehatan masyarakat (bobot 12) - KLB : proporsi kasus KLB per jumlah penduduk; - penyakit bawaan makanan : proporsi penderita penyakit bawaan makanan (diare) per jumlah penduduk; - akses terhadap air bersih: persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih e) kesadaran konsumen (bobot 12) - kepemilikan kulkas: persentase rumah tangga yang memiliki kulkas - kelayakan sanitasi : persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB). - pendidikan: angka partisipasi wanita yang sekolah.

- b. Bimtek Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan pendampingan Penilaian kesesuaian pada Pelaku Usaha PSAT

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada 26 September 2024, dihadiri oleh perwakilan 13 kabupaten/kota dan dibuka oleh Plh Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Materi yang disampaikan mencakup kewenangan daerah dalam pengawasan keamanan pangan segar sesuai

dengan undang-undang terkait. Praktik pengawasan dilakukan di Hypermart Mega Mall Pontianak, di mana ditemukan bahwa Hypermart belum memiliki SPPB PSAT dan ada buah impor tanpa nomor izin edar. Selain itu, pendampingan dilakukan untuk penilaian kesesuaian penerbitan SPPB PSAT di PT. Fajar Tirta Natural, menghasilkan temuan ketidak sesuaian sebanyak satu kategori serius, 11 mayor, dan satu minor. Pelaku usaha berkomitmen untuk melakukan perbaikan ketidak sesuaian dalam waktu 30 hari kalender.

c. Notifikasi Penolakan Ekspor Bubuk Pala Tujuan Taiwan

Biji pala yang dipasok berasal dari Kec. Banda, Kota Ambon, dan merupakan jenis Pala SS yang diproses secara alami tanpa bahan berbahaya. Pengeringan biji pala dilakukan dengan sinar matahari langsung atau metode pengasapan hingga kering sempurna sebelum dikirim ke pemasok di Cileungsi. Di unit penanganan, produk melalui proses sortasi untuk memisahkan biji utuh dari yang reject (pecah, jamur, atau menghitam), di mana produk reject dijual ke pasar induk Kramat Jati.

Dari hasil identifikasi, pemasok menggunakan fumigan tablet merek Phostoxin yang mengandung Aluminium Fosfida 56% untuk mengurangi kutu pada biji pala. Penggunaan fumigan dilakukan dengan cara memasukkan tablet fumigan yang dibungkus tissue dan potongan karung ke dalam karung biji pala ukuran 50 kg. Meskipun informasi penggunaan fumigan telah disampaikan ke bagian gudang PT Gunacipta Multirasa, tidak ada catatan bahwa informasi ini disampaikan ke bagian Quality Control, yang diduga menyebabkan residu fumigan terdeteksi pada produk akhir.

Rekomendasi untuk pemasok mencakup penghentian penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai, menggunakan fumigator bersertifikat jika fumigasi diperlukan, dan menerapkan sanitasi higiene. Untuk PT. Gunacipta Multirasa, disarankan untuk membuat standar pemasok, memonitor pemasok, dan melakukan pengujian keamanan pangan secara terjadwal, termasuk mikotoksin, logam berat, dan residu pestisida. Tindak lanjut untuk OKKP-P mencakup pengawasan dan sampling produk reject di pasar induk Kramat Jati untuk memastikan keamanannya.

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, dengan realisasi anggaran pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 8.702.944.783,- dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

4.1. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (PKH)

Kegiatan prioritas biro PKH selama bulan September 2024 telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi selama bulan September Tahun 2024 melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Telah dilaksanakan rapat pembahasan substansi Ranwal Renstra Badan Pangan Nasional pada tanggal 13 September 2024 dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

- a. Kementerian PPN/Bappenas sedang Menyusun Ranwal RPJMN 2025-2029 secara iterative denfan penyusunan Ranwal Renstra Kementerian/Lembaga 2025-2029
- b. Muatan substansi Ranwal Renstra K/L 2025-2029 akan diinput melalui aplikasi KRISNA Renstra dan menjadi masukan Ranwal RPJMN 2025-2029
- c. Substansi Ranwal Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 dapat diakses pada link: <https://drive.google.com/drive/folders/1Fsl-J7vc0Rx3yrcaMHaDuK12Z8VUu2aq>.

2. Penilaian DAK Non Fisik Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Direktur Dana Transfer Khusus a.n Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S- 24/PK/PK.3/2024 tanggal 7 September 2024 hal Penyampaian Penyesuaian Pagu Anggaran DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sub jenis Pangan TA 2025 dan hasil Multilateral Meeting Pengalokasian DAK Nonfisik TA 2025 tanggal 5 September 2024, kami informasikan bahwa hasil penilaian usulan DAK Non Fisik TA 2025 DKPP Sub Jenis Pangan sebagai berikut:

No	Menu/Rincian Menu	Hasil Penilaian Usulan (approve)	
		Vol	Nilai
1.	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat		7.500.000.000
	- Biaya operasional LPM	50	2.500.000.000
	- Pelatihan pengelola LPM	50	5.000.000.000
2.	Pengembangan Desa B2SA		80.900.000.000
	- Kebun B2SA	809	16.180.000.000
	- Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan	809	44.495.000.000
	- Operasional dan Pendampingan	809	20.225.000.000
	Total Hasil Penilaian DAK Non Fisik DKPP Sub jenis Pangan		88.400.000.000
	Pagu DAK Non Fisik DKPP Sub jenis Pangan		88.400.000.000

3. Pembahasan Rancangan Perbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan

Dalam rangka pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, telah dilaksanakan pertemuan pembahasan Rancangan Perbadan Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan pada tanggal 18 September 2024. Hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Pertemuan dipimpin oleh ketua tim distribusi pangan dan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian KKP, BPS dan unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional.
2. Pertemuan bertujuan untuk membahas draft awal Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan.
3. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan dan Gizi.
4. Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas menyampaikan masukan untuk menstrukturkan muatan pasal yang mengatur substansi utama perbadan (pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pemberian insentif) dengan memasukkan maksud dan tujuan, pembagian peran K/L dan bentuk kegiatan pada masing-masing substansi tersebut.
5. Masukan lainnya adalah:
 - a. Memasukkan substansi penjaminan keamanan, mutu, gizi dalam pengelolaan distribusi pangan.

- b. Memasukkan pasar rakyat dalam hub distribusi.
 - c. Pengintegrasian dengan kegiatan yang telah dilaksanakan K/L lain, misal tol laut oleh Kementerian Hubungan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan oleh BPS, rantai pasok hulu hilir KKP.
6. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Distribusi dan Cadangan akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum untuk melakukan penyempurnaan dan drafting kembali sesuai masukan hasil rapat.
4. Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2024
- Dalam rangka percepatan realisasi kegiatan dan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 19 September 2024. Hasil pertemuan sebagai berikut:
1. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas dan dihadiri oleh Inspektur, perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran dan Unit Kerja yang mengajukan usulan revisi anggaran (Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum, serta Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum).
 2. Agenda utama pertemuan adalah membahas rencana buka blokir automatic adjustment (AA) dan tagihan ID Food tahun 2023.
 3. Blokir AA Badan Pangan Nasional TA. 2024 sebesar Rp. 22.131.086.000 yang direncanakan dibuka untuk memenuhi kekurangan Belanja Pegawai dan kebutuhan anggaran Badan Gizi Nasional.
 4. Tindak lanjut:
 - DCP agar mengundang BPKP sebagai tindak lanjut surat Nomor 618/TS.02.02/B/09/2024 agar dapat terbayar dengan DIPA 2024.
 - DCP mengundang rapat DJPB terkait mekanisme pembayaran bulan Desember 2024
 - DCP-KPU harus berkoordinasi intensif untuk memastikan penyerapan anggaran yang sudah tersedia di DIPA 2024 dan menyelesaikan tagihan untuk Desember 2024.

5. Revisi DIPA 14

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien, maka dilaksanakan revisi DIPA 14. Fokus utama revisi DIPA 14 adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan dalam rangka 1) Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 serta 2) Dukungan Kesekretariatan Badan Gizi Nasional.

2. Kerja Sama Bidang Pangan, melalui kegiatan:

1. Mengikuti High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP).
2. Melakukan fasilitasi keikutsertaan Kepala Badan Pangan Nasional pada Indonesia-Africa Forum ke-2
3. Mengikuti Rapat Pembentukan Pokja Pemberian Kerja Sama Pembangunan ke Timor-Leste dalam rangka Akses Kerja Sama Ekonomi ASEAN.
4. Terlibat dalam fasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah TA 2025.
5. Mengikuti dua rangkaian Rapat Koordinasi Persiapan Hari Pangan Sedunia (HPS).
6. Mengikuti kegiatan High Level Event “Bappenas-United Nation Forum on Development Cooperation 2024.
7. Mengikuti Meeting of the Working Group on Interrelation of Food, Energy and Water Security, the Asia Cooperation Dialogue (ACD).
8. Melakukan fasilitasi pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan BPJPH, terkait Implementasi Sertifikasi Halal Dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Di Bidang Pangan.
9. Mengikuti Rapat Penyusunan Terjemahan Resmi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
10. Mengikuti Seminar International “Jakarta’s Green Economy and Financial Policy: a Pathway to Sustainable Development”.
11. Mengikuti Rapat Koordinasi Penentuan Focal Point pada Working Group (WG) di Forum Asia Cooperation Dialogue (ACD).
12. Mengikuti Penjajakan Awal Rencana Kegiatan Perpanjangan Umur Simpan Pangan Lokal Guna Peningkatan Nilai Tambah dan Pencegahan Food Waste.

13. Melakukan fasilitasi dan peninjauan rencana kerja sama antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Jember terkait Sinergitas Penguatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.
14. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ke Unsika Karawang, terkait PKS antara Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singaperbangsa Provinsi Jawa Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Provinsi Jawa Timur, dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Provinsi Lampung, terkait Sinergitas Penguatan Pangan dan Gizi dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi.
15. Melaksanakan diskusi internal terkait penentuan Indikator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Sama.
16. Melakukan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi E-Learning Sertifikasi Halal dari Sekretariat Komite Nasional ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan.
17. Bersama dengan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, melaksanakan koordinasi dengan Kedutaan Denmark perihal *Follow-up Discussion and Preparatory Meeting for the Steering Committee Meeting on the Strategic Cooperation (SSC) on FLW*.
18. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti Knowledge Co-Creation Program (Country Focus): Country Focused Training for Nutrition and School Meal di Jepang.
19. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri Undangan Thai Rice Networking Forum 2024 di Thailand, beserta administrasi pembatalan keikutsertaan delegasi Badan Pangan Nasional (batal menghadiri).
20. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri Peresmian Indonesia Brands Go Global di Malaysia, beserta administrasi pembatalan keikutsertaan delegasi Badan Pangan Nasional (batal menghadiri).
21. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka Kunjungan Kerja ke Malaysia untuk melihat potensi pengembangan pasar ritel di bidang Pangan di Malaysia.

22. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti The 2nd APEC Seminar on Best Practices and Applications of Digitalization and Innovation in Food Supply Chain di Republik Rakyat Tiongkok
23. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri The 39th Meetings of Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG) and Its Related Meetings di Da Nang, Vietnam.
24. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti pelatihan terkait “Food Safety Crisis Preparedness” oleh Better Training for Safer Food (BTSF) Initiative, the Health and Food Safety Directorate – European Commission di Hanoi, Vietnam.
25. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti Training on Sampling & Analysis: Residues of Veterinary Medicinal Products (VMP) di Polandia.
26. Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri Pertemuan Reguler Komite Pertanian (COARS) ke-109 di Jenewa, Swiss.
27. Menghadiri Seminar “Merajut Pertanian Masa Depan/ Cultivating Agriculture for the Future”, dalam perayaan 11 tahun program the Australia- Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) towards developing Indonesia’s agricultural ecosystem for Indonesia Emas 2045.

3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, dengan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media Badan Pangan Nasional Volume 3 Nomor 9, September 2024 yang disebarluaskan di lingkup internal dan juga stake holder terkait.
- b. Talkshow/ wawancara Kepala Badan Pangan Nasional di media TV/ Radio pada bulan September 2024 sebagai berikut :

21 September 2024	Kompas TV	Bapanas dan Pengamat Pertanian Jelaskan Mengapa Harga Beras Indonesia 20% Lebih Tinggi dari Global
30 September 2024	Investor Daily TV	Harga beras RI termahal di ASEAN, kenapa?
19 September 2024	Radio Elshinta	Bapanas Siapkan Keberlanjutan Tata Kelola Pangan Nasional

- c. Pada bulan September 2024, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan 13 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut: 7 isu terkait ketersediaan dan stabilisasi pangan, 2 isu terkait kerawanan pangan dan gizi dan 1 isu terkait penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan 3 isu lainnya.
- d. Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik dan terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.

4.2. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum (KPU)

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan September Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada bulan September telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pada bulan September dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 956 Layanan BMN telah merealisasikan Rp. 23.104.500,- atau sebesar 3,44%.
2. Pada bulan September dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 959 Layanan Protokoler telah merealisasikan Rp. 121.078.552,- atau sebesar 13,15%.
3. Pada bulan September dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 962 Layanan Umum telah merealisasikan Rp. 852.809.384,- atau sebesar 7,28%.
4. Pada bulan September dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 994 Layanan Perkantoran merealisasikan komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan September sebesar Rp. 3.847.894.824,- atau sebesar 7,92%, Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 684.747.778,- atau sebesar 4,40%. Sedangkan untuk KRO EBB 951 Komponen Layanan Sarana Internal dan KRO/RO EBD 955 Komponen Layanan Manajemen Keuangan melaksanakan beberapa kegiatan, berupa:
 - a. Entry Meeting BPK RI dalam Rangka Uji Petik ke Daerah Provinsi Jawa Barat

- b. Rapat Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Keuangan tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Meningkatkan Kualitas IKPA Badan Pangan Nasional TA 2024
 - c. Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Kegiatan & Anggaran TA 2024
 - d. Rapat Kegiatan PIPK TA 2024
 - e. Rapat Kegiatan Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
5. Pada bulan September KRO/RO EBB 962 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Komponen Layanan Sarana Internal telah merealisasikan Rp. 41.800.000,- atau sebesar 6,49%.

4.3. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum (OSH)

Biro OSH pada bulan September telah melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

- a. Koordinasi Kelembagaan dan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kemenpan RB
Kegiatan koordinasi dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN RB terkait kelembagaan dan Seleksi Terbuka JPT Pratama Badan Pangan Nasional
- b. Sosialisasi core values ASN BerAKHLAK
Sosialisasi internalisasi Budaya Kerja Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan Badan Pangan Nasional dan dalam rangka persiapan pengisian Survei Indeks BerAKHLAK oleh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- c. Rapat Rekon Tukin TMT 1 Agustus 2024
Pembahasan rekonsiliasi data tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk data bulan TMT 1 Agustus 2024 yang akan dibayarkan pada bulan September 2024
- d. Rapat Konsinyering Badan Gizi Nasional
Mengikuti kegiatan rapat konsinyering yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas terkait penyiapan organisasi dan tata laksana Badan Gizi Nasional.

- e. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Daerah dan JF AKP di Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi
Kegiatan Sosialisasi kepada Pemerintahan Daerah khususnya pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam rangka sinergi dan koordinasi pembinaan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana serta pengembangan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan tahun 2024
- f. Monitoring pengisian survei berAKHLAK
Monitoring pengisian Survei dan Evaluasi Budaya Kerja ASN 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 27 Agustus 2024, dimana diperlukan internalisasi Budaya Kerja Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan Badan Pangan Nasional dan dalam rangka persiapan pengisian Survei Indeks BerAKHLAK oleh pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Badan Pangan Nasional
Penyelesaian pengusulan Kenaikan Gaji Berkala periode Bulan September dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi sekaligus sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara.
- b. Pengusulan Kenaikan/Perpindahan Jabatan Fungsional Pegawai Lingkup Badan Pangan Nasional Periode September 2024
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian terhadap PNS lingkup Badan Pangan Nasional yang telah memenuhi syarat Kenaikan/Perpindahan Jabatan Fungsional Sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara.
- c. Finalisasi Seleksi Administrasi Pengadaan PNS Tahun 2024 Lingkup Badan Pangan Nasional
Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/BKS.04/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA. 2024 dan Pengumuman Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1956/SM.02.01/A/08/2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pangan

Nasional, bahwa dengan berakhirnya pendaftaran seleksi CPNS pada tanggal 6 September 2024 perlu dilakukan finalisasi seleksi administrasi oleh Tim Verifikasi dan Supervisi Badan Pangan Nasional. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum'at Sabtu, 6-7 September 2024 di Hotel Santika Depok.

d. Pembukaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Politeknik SSN TA.2024/2025

Berkaitan dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) 5 (lima) orang mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara TA. 2024/2025 di Kantor Badan Pangan Nasional, mulai tanggal 9 September s.d 1 November 2024, maka dilakukan kegiatan pembukaan PKL yang dilaksanakan pada hari Senin, 9 September 2024 di Ruang Rapat Nusantara II lantai 4 Gedung E, Kantor Badan Pangan Nasional.

e. Rapat Pleno Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Lingkup Badan Pangan Nasional

Sehubungan dengan berakhirnya tahapan pendaftaran pengadaan CPNS Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024, selanjutnya sesuai dengan pengumuman Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor: 1956/SM.02.02/A/08/2024 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pangan Nasional TA 2024 dan Surat kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 5900/B-KS.04/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 perihal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024, dilakukan tahap persiapan pengumuman hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2024 di ruang rapat Nusantara 1 Lantai 2 Kantor Badan Pangan Nasional.

f. Rapat Pleno Jawab Sanggah Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Lingkup Badan Pangan Nasional

Sehubungan dengan berakhirnya masa sanggah pengadaan CPNS tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, selanjutnya sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5900/B-KS.04/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 perihal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS TA 2024, Badan Pangan Nasional melakukan jawab

sangguh paling lambat tanggal 24 September 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan rapat pleno pada hari Selasa, 24 September 2024 di Hotel Savero Depok.

g. Pembuatan perizinan cuti pegawai Badan Pangan Nasional

3. Layanan Hukum

a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

- a) Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional tentang perubahan kedua atas peraturan Badan pangan nasional Nomor 11 tahun 2022 tentang harga acuan pembelian di tingkat Produsen dan harga acuan pembelian di tingkat konsumen komoditas kedelai, bawang merah, cabe merah kriting, daging sapi/kerbau dan gula konsumsi);
- b) Rancangan Peraturan Presiden (Rpepres) No.57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan;
- c) Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Di Peredaran (Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan);
- d) e. Finalisasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- e) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f) (PP 5/2021) Pembubuhan Paraf Batang Tubuh dan Penjelasan
- g) Revisi PP 5/2021(Kemenko Sekretariat Biro Hukum dan
- h) Organisasi);
- i) Peraturan Presiden No 10 tahun 2021 dan Perubahannya tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (revisi Perpres BUPM) Kemenko Asdep Peningkatan daya saing ekonomi;
- j) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang kawasan aglomerasi (permintaan PAK oleh Kemendagri);
- k) Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional perihal : tugas fungsi UKPBJ;

- l) Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang norma standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian fasilitas, dan pemberian insentif pengelolaan sistem distribusi pangan);
- m) Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- n) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Verifikasi Penetapan Rencana Kebutuhan Impor dan Rencana Pasokan Produk Hortikultura Dalam Neraca Komoditas;
- o) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Setneg);

b. Penyusunan Naskah Perjanjian

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan (stakeholder). Penyusunan naskah perjanjian yang disusun pada bulan Agustus 2024, sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan dan merumuskan draft Perjanjian Kerjasama Antara Badan pangan Nasional dengan Badan Penyelenggara jaminan produk halal dalam rangka implementasi;
- b) Menyempurnakan dan merumuskan Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara;

c. Penyusunan Instrumen Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum dilakukan beberapa penyusunan instrument hukum lainnya, sebagai berikut:

- i. Penyempurnaan Rancangan Surat Keputusan sekretaris Utama Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Pada Badan Pangan Nasional;

- ii. Penyempurnaan Rancangan Perubahan Usulan Program Penyusunan Peraturan Badan menjadi Surat Keputusan (Pusat Data dan Informasi Pangan);
- iii. Penyempurnaan Rancangan Perubahan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Tahun 2024;

d. Kegiatan JDIH

Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024, Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola JDIH, Pangan Badan Nasional melaksanakan bimbingan teknis pembuatan abstrak peraturan perundang undangan yang baik, metadata hukum; pengisian artikel dan pengisian metadata Buku-buku Hukum/ Monografi hukum pada Rabu, 11 September 2024 di Depok. Bimbingan teknis dibuka oleh Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum dan dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan, perwakilan Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas, perwakilan PT. Metrodata dan Tim Pengelola JDIH Badan Pangan.

e. Pelaksanaan kegiatan Advokasi Hukum

- a) Mengikuti rapat kerja dari DPR mengenai : RKA K/L tahun 2025 dan usulan program yang akan di danai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi;
- b) Pengiriman nama personil yang akan bergabung dalam Tim Advokasi hukum Badan Pangan Nasional (POLRI);
- c) Perubahan jadwal rapat dari DPR (komisi 4) menjadi tanggal 5 september 2024
- d) Mengikuti rapat penyusunan Laporan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan Pangan Nasional tahun 2024; e) Rapat Percepatan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2024;
- e) Menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan ID FOOD;

5. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan

Pusdatin Pangan pada bulan September telah melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:

1. Tata Kelola SPBE

a. Kebijakan:

Kebijakan terkait SPBE telah disahkan pada 20 September 2024 (Perbadan Nomor 11 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional).

b. Manajemen:

Pedoman Manajemen SPBE telah disusun, telah di reviu dan diperbaiki. Hasil perbaikan masih dalam proses tim Hukum.

c. Tata kelola

Telah dilakukan penilaian mandiri SPBE pada aplikasi Tauval dengan klaim indeks 4.3

d. Layanan

Belum dilakukan kegiatan dan koorodinası terkait Layanan SPBE.

e. Arsitektur:

✚ Telah disusun arsitektur SPBE di lingkup Badan Pangan Nasional untuk semua domain.

✚ Sedang disusun lampiran untuk pengesahan peta rencana dan arsitektur SPBE 2024 yang nantinya akan disahkan menjadi SK Arsitektur SPBE 2024 menggantikan SK 84.2/2023. Saat ini sedang dalam proses permohonan reviu ke Biro OSH.

f. Pengisian Arsitektur SPBE di SIA SPBE

✚ Telah disusun arsitektur SPBE di lingkup Badan Pangan Nasional untuk semua domain.

✚ Sedang disusun lampiran untuk pengesahan peta rencana dan arsitektur SPBE 2024 yang nantinya akan disahkan menjadi SK Arsitektur SPBE 2024 menggantikan SK 84.2/2023. Saat ini sedang dalam proses permohonan reviu ke Biro OSH.

✚ Pengisian Arsitektur SPBE di SIA SPBE.

✚ Proses pengisian arsitektur SPBE di SIA SPBE telah selesai dan mendapatkan nilai 3.

- + vCPU dari yang dialokasikan sebanyak 284 GHz sudah terpakai 232 GHz atau 81,69%.
- + Memory dari yang dialokasikan sebanyak 436 GB sudah terpakai 412 GB atau 94,50%.
- + Storage dari yang dialokasikan sebanyak 13,6 TB sudah terpakai 12,16 TB atau 89,41%.
- + Menggunakan 20 vApps, dari total VM sebanyak: 46 VM dengan status power on VM sebanyak: 43 VM.

2. Kelola Server Pusat Data Nasional

- a. Penggunaan resource PDNS 1 Kominfo oleh Badan Pangan Nasional
- b. Penggunaan resource pada PDNS2 darurat, restore data pasca terkena serangan ransomware di PDNS2. untuk saat ini service SIPG yang ada di PDNS2 sedang dilakukan restore, perbaikan dan rekonfigurasi ulang untuk operasional kembali.
- c. Penggunaan resource pada Ruang Pusat Kendali IT NFA adalah sebagai berikut:
 - i. vCPU dari yang dialokasikan sebanyak 134,4 GHz sudah terpakai 5,45 Ghz.
 - ii. Memory dari yang dialokasikan sebanyak 1023,52 GB sudah terpakai 192,73 GB.
 - iii. Storage dari yang dialokasikan sebanyak 25,34 TB sudah terpakai 1,77 TB.
 - iv. Total VM running 17 dari 18 VM, total host terkoneksi 1 host.

3. Server Kendali IT

Penggunaan resource pada Ruang Pusat Kendali IT NFA adalah sebagai berikut:

- a. vCPU dari yang dialokasikan sebanyak 134,4 GHz sudah terpakai 5,45 Ghz.
- b. Memory dari yang dialokasikan sebanyak 1023,52 GB sudah terpakai 192,73 GB.
- c. Storage dari yang dialokasikan sebanyak 25,34 TB sudah terpakai 1,77 TB.
- d. Total VM running 17 dari 18 VM, total host terkoneksi 1 host.

4. Jaringan Internet

a. In bound (download)

- ✚ Current: Besar bandwidth yang terakhir tercatat selama periode September sebesar 557.50 KB.
- ✚ Average: Besar bandwidth rata-rata selama periode September sebesar 35.22 MB.
- ✚ Maximum: Besar bandwidth maksimal selama periode September sebesar 81.97 MB.

b. Outbound (*upload*)

- ✚ Current: Besar bandwidth yang terakhir tercatat periode September sebesar 16.29 MB.
- ✚ Average: Besar bandwidth rata-rata selama periode September sebesar 20.40 MB.
- ✚ Maximum: Besar bandwidth maksimal selama periode September sebesar 81.97 MB.

c. Koneksi Advice ke AP

- ✚ Total Client yang mengakses jaringan Internet NFA selama bulan September rata-rata mencapai 390-400 device per/hari.
- ✚ Hasil MONEV berfungsi dengan baik, terpantau normal dan stabil, terpasang dan lengkap.
- ✚ Verifikasi fungsi perangkat routing dari router dtp ke arah router internal bapanas melalui fortinet berfungsi dengan baik, tidak ada nya anomali.
- ✚ Keseluruhan Perangkat HUB switching dengan layer 2 sampai end user berfungsi dengan baik.
- ✚ Dinamika penggunaan internet secara rata-rata per hariTotal penggunaan Akses Poin (AP) selama bulan September 2024 mengalami kenaikan secara umum antara 1-3 pengguna untuk setiap AP. Rata-rata penggunaan secara harian.

d. Fortiget

- ✚ IPS : Terdapat 179 serangan yang telah terblock pada intrusion Prevention dengan predikat High.
- ✚ AntiVisru : 0 File terdeteksi virus
- ✚ Anomali : 63 Source terdeteksi Critical

- ✚ Web Filter : 2971 Source Web Filter yg terdeteksi berbahaya
- ✚ SSL : 507 Source IP yang ter blokir
- ✚ Aplikasi Control : 9154 Source Aplikasi Control yang sudah terblok
- ✚ Forwart Traffic : 34067 Traffic Destination yang terblokir
- ✚ Aplikasi/URL yang sering terblokir selama bulan September: Game, Catce, Malware, Pornografi, Iklan Negatif, Icmp_float (tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri jaringan atau sistem target dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuat sistem tidak responsif atau tidak dapat diakses).

5. Helpdesk (SAPA)

Permohonan Layanan yang diajukan selama bulan September yaitu:

- a. Total request zoom di bulan September ada 14 permintaan zoom, yang berasal dari internal Pusdatin Pangan dan dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. Permohonan data Penentuan Jenis pangan segar terhadap syarat keamanan mutu sesuai Perbadan Nomor 10 tahun 2024.
- c. Permintaan penambahan akun Sipena untuk Ibu Rahmi Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan.

6. Pembangunan SI Pangan dan Gizi dan Portal Satu Data Pangan (SDP)

- a. Rapat Progress perkembangan pembangunan Portal SDP pada tanggal 6 September 2024 dengan rumusan sebagai berikut:
 - i. Pengisian konten dalam portal baru 30%.
 - ii. Menu Beranda
 - a) Logo Badan Pangan Nasional masih tidak terlihat, perlu diperbaiki dan dilakukan perubahan warna putih backgroundnya.
 - b) Mengganti icon kategori “Kerawanan Pangan dan Gizi” ke gambar kategori yang lebih relevan.
 - iii. Menu Dataset
 - a) Keterangan metadata dibuat 2 kolom agar tidak terlalu panjang ke bawah

- b) Hapus logo instansi yang ada di dataset saat dipilih kemudian ditambah tulisan sumber datanya, contoh “sumber: Badan Pangan Nasional”
 - c) Format dataset harus konsistensi, sehingga data harus dicek lagi. Tim Pusdatin Pangan sedang melakukan pengecekan ulang terkait hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dari pengembang, diantaranya:
 - hapus semua judul dan keterangan
 - jika ribuan dipisahkan dengan titik, dihapus yaa (tanpa titik)
 - jika yang dimaksud adalah koma desimal, formatnya titik
 - kemudian file di save dalam bentuk csv
- iv. Menu Visualisasi
 - a) Tampilan depan akan disesuaikan sesuai dengan tema visualisasi.SAS: loading masih lama, sering timed out
 - b) Superset sudah bisa tampil, tidak ada issue
- v. Menu Infografis: sudah aman
- vi. Menu Publikasi

Ketika ulasan disubmit, di backend belum masuk, perlu dicek kembali oleh pengembang.
- vii. Menu SiPangan

Perlu ada penyesuaian deskripsi pada halaman ketika menu SiPangan dipilih.
- viii. Menu Katalog
 - a) Perlu diberikan sedikit deskripsi untuk setiap aplikasi.
 - b) Yang masuk ke dalam katalog cukup data, untuk publikasi tidak perlu
- ix. Menu Jadwal Rilis

Diberikan filter tahun dan bulan.
- x. Menu Kontak
 - a) Diubah jam kerja menjadi Senin-Jum'at.
 - b) Kontak whatsapp sudah dilakukan ujicoba dan berhasil.

- xi. Tindak Lanjut:
 - a) Secara keseluruhan portal sudah sesuai dengan rancangan, hanya ada sedikit catatan perbaikan di setiap menunya.
 - b) Minggu depan diusahakan bisa masuk ke production.
 - c) Selanjutnya pengembang akan mengupdate seluruh data saat portal sudah masuk ke production.
- b. Rapat Koordinasi teknis terkait integrasi Portal Satu Data Pangan dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI) dengan rumusan sebagai berikut:
 - i. Alur proses integrasi untuk kebutuhan teknis sebagai berikut:
 - a) Format portal dapat menggunakan CKAN, untuk data dengan format csv dan excel akan diinputkan di portal K/L/D yang selanjutnya portal tersebut akan menghasilkan sebuah katalog data yang di dalamnya memuat metadata. Metadata ini nantinya akan dikirimkan
 - b) Pengaturan/ hak akses berbagi data perlu diperhatikan juga yaitu pada data-data terbatas dapat diatur dalam field metadatanya bahwasanya data tersebut bersifat restricted/ private. Sehingga pengaturan hak akses dalam metadatanya bisa diisikan sebagai 'terbatas' pada field 'accessRights' nya.
 - c) Begitu juga dengan Geoportal, K/L/D dapat menggunakan template yang disediakan oleh BIG. Pengisian metadata tersebut akan menghasilkan end point berupa CSW (Catalog Service Web) yang akan masuk ke portal SDI. Saat ini data spasial memang belum terhubung ke SPLP.
 - ii. Untuk kebutuhan administrasi pada proses integrasi yaitu sebelumnya Pusdatin Pangan sudah pernah mengirimkan surat permohonan fasilitasi instalasi, nantinya tinggal menyesuaikan kamus API dari json.
 - iii. Harapan ke depannya untuk kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan dilakukan di portal K/L/D yang sudah memiliki fitur dan kemampuan untuk perencanaan dan pemeriksaan juga.

- iv. Data K/L/D yang masuk ke portal SDI bukan hanya yang prioritas saja, namun data non prioritas juga harus masuk.
- v. Tindak lanjut hasil rapat:
 - a) Pusdatin Pangan perlu mengidentifikasi data-data mana saja yang termasuk terbuka, terbatas, dan tertutup untuk pengisian pada field 'access rights' nya.
 - b) Pusdatin Pangan akan melakukan revaluasi kembali penamaan list Data Prioritas tahun 2024 yang belum final agar memudahkan dalam penyediaan dataset.
 - c) Pusdatin Pangan akan menyiapkan contoh data 'indeks pemanfaatan pangan' dan 'volume stok cadangan pangan pemerintah' yang status metadata indikatornya sudah disetujui oleh BPS untuk diuji cobakan integrasi oleh pihak pengembang yang direncanakan akan dilakukan maksimal pada hari Selasa, 24 September 2024.
 - d) Pusdatin Pangan menyampaikan kepada SDI terkait kebutuhan kode referensi pangan (untuk komoditas dan pangan segar) agar dapat digunakan sebagai acuan bersama.

7. Monev integrasi aplikasi

a. Integrasi FSVA melalui SPLP

Total 7 subscriber (Diskominfo Kota Balikpapan, Diskominfo Kota Yogyakarta, Diskominfo Kab. Halmahera Utara, Diskominfo Kabupaten Buleleng, Diskominfo Kab. Wonogiri, dan Diskominfo Kab. Banjar, dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan).

- i. 0 Total Success Request 3) 0 Total Traffic

b. Integrasi Panel Harga melalui SPLP

c. Total 24 subscriber. Berikut daftar aplikasi Kementerian/Lembaga/Daerah yang terintegrasi dengan Panel Harga:

- i. 472 Total Success Request.
- ii. 481 Total Traffic.

d. Integrasi Neraca Bahan Makanan melalui SPLP

- i. Total 4 subscriber (Kab. Wonogiri, Kab. Banjar dan kab. Ngawi,

ii. Provinsi Kalimantan Selatan).

iii. 0 Total Sucess Request

iv. 0 Total Traffic

Kegiatan integrasi aplikasi juga dilakukan melalui webapi.badanpangan.go.id untuk instansi pemerintah yang membutuhkan integrasi aplikasi tetapi belum mengimplementasikan SPLP dan pihak non pemerintah.

e. Dalam web-API ada beberapa API aplikasi yang sudah siap untuk dibagi pakai, antara lain:

i. Panel Harga Pangan

ii. FSVA

iii. SKPG

iv. Sigap Nasional

v. Sipsat

vi. Sinmb

f. Total verifikasi pengguna pada web API Badan Pangan Nasional sebesar 12, pengguna terblokir: 0, pengguna aktif: 10, total pengguna: 12.

8. Monitoring Sistem

Pemantauan operasional sistem lingkup Badan Pangan Nasional bulan September 2024 berkisar antara 97% - 100%.

9. Backup Cloudnesia

Secara umum back up cloud untuk ke-6 aplikasi berjalan dengan baik. Untuk sinkronisasi atau replikasi database PostgreSQL pada setiap VM berstatus sync pada server master, ini mengindikasikan bahwa proses sinkronisasi atau replikasinya berjalan dengan baik.

10. Pengembangan Intranet (SIM ASN, FORM, SIPENA)

a. Mengubah redirect url top menu publikasi, buku digital ke pustaka.badanpangan.go.id.

b. Menampilkan menu/modul Sipena pada Intra Badan Pangan sesuai permintaan unit kerja dan saat ini sudah di tampilkan pada seluruh unit kerja.

c. Menampilkan popup beberapa gambar terkait himbauan keamanan data pribadi.

11. Pendampingan pembangunan aplikasi

- a. Sistem Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP) : Melakukan backup aplikasi dan storage dan menyiapkan untuk pelaksanaan penyesuaian jabatan fungsional analis ketahanan pangan TA 2024.
- b. Pengembangan panel harga pangan: Sedang melakukan penyesuaian dan permintaan resource VM ke Kominfo.
- c. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG):
 - i. Aplikasi telah dibangun dan prototipe dapat diakses melalui <https://alc-corp.com/skpg2024/>.
 - ii. Progres bulan September adalah Reviu Formulir Data Entry dan Analisa Aplikasi SKPG.
 - iii. Dalam rapat disampaikan mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan saat aplikasi akan live seperti pengecekan keamanan aplikasi baik dari pengembang ataupun melalui ITSA.
 - iv. Pengecekan keamanan direncanakan akan menggunakan ITSA setelah setiap komponen aplikasi SKPG selesai.
- d. Pendampingan Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) khususnya SI Penyaluran CPP Bantuan Beras:
 - i. Ruang lingkup yang dikerjakan oleh pengembang sesuai dengan kesepakatan awal, yakni: Modul SPHP Beras, Modul SPHP Jagung, Modul Banpang Beras, Modul Banpang Stunting, Modul Bencana Alam, Modul Entry, Modul Upload, Modul Setting Periode, dan Modul Verifikasi.
 - ii. Tim Pengembang SIKP akan lebih ringkas mengingat sudah adanya aplikasi dan dashboard SI Penyaluran Bantuan Pangan dari Perum Bulog. Tim Pengembang hanya perlu men-develop dari sisi hulu saja khususnya terkait cleansing data, karena sisi hilir sudah dibangun oleh Bulog.
 - iii. Fitur cleansing telah diuji cobakan dengan skenario data double penerima, NIK 9999 dan duplikasi NIK ke beberapa nama penerima. Fitur cleansing data sudah sesuai dengan skenario

dan berjalan dengan baik namun dengan catatan perlu ditambahkan komentar dari hasil cleansing untuk skenario penerima double yaitu berapa data yang harus ditambahkan setelah proses cleansing dan juga ditampilkan daftar penerima yang sudah benar.

12. Keamanan Siber

- a. Dalam rangka penguatan keamanan Siber, Badan Pangan - CSIRT sampai dengan bulan September 2024 telah menjalankan layannya antara lain:
 - i. Layanan pemberian peringatan terkait laporan insiden siber.
 - ii. Layanan penanganan dan pemulihan pada 2 (dua) insiden siber di tahun 2024.
 - iii. Layanan penanganan kerawanan melalui rapat koordinasi dan tindak lanjut ITSA.
 - iv. Layanan penanganan artefak.
- b. Selain itu juga telah mengikuti National Cyber Exercise - Cyber Drill Advanced Persistent Threat (APT) Scenario yang diadakan oleh BSSN pada tanggal 9- 12 September 2024. Dari 185 Instansi yang terlibat, Badan Pangan - CSIRT menduduki peringkat ke -25.
- c. Dalam rangka uji kerentanan aplikasi lingkup NFA, Pusdatin menerima Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dari Politeknik Sandi dan Siber Negara (Poltek SSN) untuk memperkuat sistem keamanan jaringan dan informasi dalam mendukung rencana aksi kegiatan di Pusdatin Pangan. Mahasiswa tersebut telah melakukan uji kerentanan terhadap 10 (sepuluh) aplikasi yang paling banyak diakses oleh pengguna, dan hasilnya menunjukkan adanya kerentanan pada beberapa aplikasi yaitu Server-side Template Injection pada website sipg.badanpangan.go.id, kerentanan Improper Access Control pada website sipg.badanpangan.go.id, kerentanan Hidden File Found pada website badanpangan.go.id, epegawai.badanpangan.go.id, dan fsva.badanpangan.go.id, Directory Browsing yang memungkinkan untuk melihat daftar isi direktori pada website fsva.badanpangan.go.id, kerentanan BigRedirect Detected pada website badanpangan.go.id dan belum diterapkannya header keamanan pada 10 subdomain NFA.

- d. Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan CSIRT di NFA, BSSN telah melakukan penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden pada tanggal 30 September 2024. Hasil penilaian TMPI Badan Pangan – CSIRT secara mandiri yang diusulkan sebesar 2,78, sedangkan hasil validasi dari BSSN sebesar 2,74 atau dalam instrumen tingkat kematangan TK 3 (established). Nilai TMPI tersebut lebih tinggi dari TMPI pada bulan Januari 2024 sebesar 1,53. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Badan Pangan Nasional sudah mempunyai kebijakan, strategi dan prosedur yang khusus membahas manajemen insiden, sudah dilakukan simulasi penanganan insiden secara berkala, pemahaman SDM yang ditugaskan sudah cukup, baik dari sisi kompetensi keamanan informasi, penanganan insiden maupun terkait operasional infrastruktur TI yang ada.
- e. Dalam rangka menunjang pencegahan kerentanan yaitu gangguan sistem yang disebabkan oleh penuhnya resources, telah dirancang sistem monitoring storage server website NFA dan intra NFA sebagai notifikasi awal melalui telegram CSIRT Badan Pangan sebagai acuan tim teknis dalam melakukan free space dan penambahan storage server yang efektif dan efisien sebelum aplikasi down.
- f. Dalam rangka perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV), Badan Pangan Nasional (NFA) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan identifikasi proses bisnis dan layanan vital pada Sektor Pangan. Dalam pelaksanaannya telah ditetapkan layanan IIV pada sektor pangan di sisi hilir salah satunya adalah layanan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang melibatkan Perum Bulog dan ID Food. Hasil identifikasi Sistem Elektronik (SE) pada layanan tersebut yang masuk dalam kriteria IIV sebanyak 5 (lima) aplikasi. Selanjutnya SE tersebut akan ditetapkan oleh pengampu pembina sektor pangan yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama antara Kementan dan NFA, dengan Kementan sebagai unit pengampu di sisi hulu dan NFA di sisi hilir.

13. Hasil Pengumpulan Data Ketahanan Pangan

- a. Monitoring pengumpulan data lingkup produsen data Bapanas, diantaranya Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Posis

Bulan Agustus, Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Posisi Bulan Agustus, Proyeksi Neraca Pangan Posisi Bulan Agustus, Jumlah Stok Komoditas Pangan Posisi Bulan Agustus.

- b. Mengajukan permohonan data andil inflasi per komoditas pangan periode bulan Agustus 2024 melalui permohonan nol rupiah BPS.
- c. Melakukan monitoring pertukaran data antara BPS dan Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Transdata BPS selama bulan September, diantaranya KSA Padi (Luas Panen dan Produksi Padi), Data Ekspor berdasarkan Negara Tujuan, Data Ekspor berdasarkan Kode HS, Inflasi dan Indeks Harga Konsumen, Inflasi Pangan Bergejolak, Nilai Tukar Petani. Data-data tersebut juga telah disampaikan kepada produsen data di Bapanas, yang sebelumnya membutuhkan data tersebut melalui aplikasi cloud Bapanas. Sementara itu data yang diberikan oleh Bapanas ke BPS adalah Harga Produsen dan Harga Konsumen Periode bulan sebelumnya (Agustus) dan Proyeksi Neraca Pangan Nasional posisi data bulan Agustus. Data-data tersebut juga telah disampaikan kepada produsen data di Bapanas, yang sebelumnya membutuhkan data tersebut melalui aplikasi cloud Bapanas. Sementara itu data yang diberikan oleh Bapanas ke BPS adalah Harga Produsen dan Harga Konsumen Periode bulan sebelumnya (Agustus) dan Proyeksi Neraca Pangan Nasional posisi data bulan Agustus.

14. Partisipasi dalam pelaksanaan SDI

- a. Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Pemutakhiran Data Prioritas 2024 pada hari Kamis, 5 September 2024 dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:
 - i. Setiap K/L mencermati dan mengkaji kembali DP 2024 untuk dilakukan pemutakhiran.
 - ii. Deadline pengumpulan hasil pemutakhiran DP 2024 tanggal 23 September 2024 yang dikirimkan melalui link yang telah disediakan.
 - iii. Hasil Pemutakhiran DP 2024 Badan Pangan Nasional telah disampaikan ke Sekretariat SDI melalui surat dan hasilnya dapat diakses melalui <https://bit.ly/PemutakhiranDPNFA2024> link berikut

- b. Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah pada hari Selasa, 17 September 2024 dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:
- c. Mengikuti Forum SDI bersama Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilaksanakan secara daring pada hari Kamis, 26 September 2024 dalam rangka penetapan pengampu produsen angka konsumsi ikan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut adanya duplikasi usulan pengampu produsen data angka konsumsi yang diusulkan oleh Badan Pangan Nasional dan KKP. Pada RPJMN tahun 2025-2029 data konsumsi ikan sudah tidak menjadi wewenang dari Badan Pangan Nasional, untuk itu disepakati bahwa produsen data untuk konsumsi ikan adalah KKP. Pusdatin Pangan NFA telah mengupdate untuk form pemutakhiran Data Prioritas 2024 dengan menambahkan penjelasan pada data jumlah konsumsi ikan bahwa status persetujuan menjadi "Tidak dapat disediakan", dan menambahkan catatan walidata: Data yang dihasilkan sama dengan data Angka Konsumsi Ikan yang diproduksi KKP.
- d. Mengikuti Forum SDI bersama Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilaksanakan secara daring pada hari Kamis, 26 September 2024 dalam rangka penetapan pengampu produsen angka konsumsi ikan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut adanya duplikasi usulan pengampu produsen data angka konsumsi yang diusulkan oleh Badan Pangan Nasional dan KKP. Pada RPJMN tahun 2025-2029 data konsumsi ikan sudah tidak menjadi wewenang dari Badan Pangan Nasional, untuk itu disepakati bahwa produsen data untuk konsumsi ikan adalah KKP. Pusdatin Pangan NFA telah mengupdate untuk form pemutakhiran Data Prioritas 2024 dengan menambahkan penjelasan pada data jumlah konsumsi ikan bahwa status persetujuan menjadi "Tidak dapat disediakan", dan menambahkan catatan walidata: Data yang dihasilkan sama dengan data Angka Konsumsi Ikan yang diproduksi KKP.
- e. Penyampaian Daftar Data Badan Pangan Nasional Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat SDI Kemen PPN/Bappenas Nomor 16364/SDI/DI.08/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal

Penyusunan Daftar Data Instansi Pusat, serta amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Pasal 26 mengenai Perencanaan Data, Pusat Data dan Informasi Pangan telah menyusun daftar data lingkup Badan Pangan Nasional. Daftar data tersebut telah disampaikan ke Sekretariat SDI melalui surat dan hasilnya dapat diakses pada link berikut <https://bit.ly/DaftarDataNFA>.

15. Partisipasi dalam pelaksanaan SDI

Badan Pangan Nasional mendapatkan apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) atas komitmen dan capaian Kementerian/Lembaga dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024. Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektor NFA tahun 2024 sebesar 2,83 masuk ke dalam kategori Baik di atas rata-rata nasional sebesar 2,35 dan meningkat 0,18 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 2,65.

16. Penyusunan Standar Data dan Metadata

- a. Melakukan Pengajuan Standar Data Statistik (SDS) di INDAH BPS
 - SDS Konsep Harga Pangan.
 - SDS Konsep Pangan.
 - SDS Indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi.
 - SDS Indikator Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari.
 - SDS Indikator Rata-rata Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari.
 - SDS Indikator Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan.
 - SDS Indikator Koefisien Variasi Harga Pangan.
 - SDS Indikator Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Syarat Keamanan Pangan.
 - SDS Konsep Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan.
 - SDS Konsep Pangan Segar Asal Tumbuhan.
 - SDS Konsep Keamanan Pangan.
 - SDS Indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.

17. Kerjasama Pihak Ketiga

Telah dilakukan penandatanganan PKS antara Pusat Data, Statistik, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional dengan Nomor

B.3811/SJ.7/KS.320/IX/2024 dan Nomor 03/KS.02.01/A.5/8/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Sinergitas Data dan/atau Informasi Perikanan dan Pangan dalam rangka Penguatan dan Penyelenggaraan Data Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

18. Penyusunan Buku Statistik, Analisis, dan Visualisasi Data
Updating data yang digunakan sebagai visualisasi dashboard SAS disesuaikan dengan buku publikasi yang telah terbit agar data konsisten menggunakan source yang sama.
19. Arsip persuratan bulan September
Jumlah Surat Masuk: 91
Jumlah Surat Keluar: 31

4.5. Inspektorat

Hasil monitoring kegiatan prioritas kegiatan fisik Layanan Audit Internal yang dilaksanakan Inspektorat yang mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada periode Bulan September Tahun 2024 antara lain sebagai berikut

1. Reviu Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LK Bapanas.
Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan jenis masing-masing pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Bagian Keuangan Badan Pangan Nasional dan unit kerja terkait sebagai dasar untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara apabila pertanggungjawaban tidak valid/lengkap sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Ruang lingkup reviu meliputi temuan BPK-RI yang bernilai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023.
2. Reviu LK Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801). Tujuan dilaksanakan reviu APIP atas laporan keuangan Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (Kode Satker 999801) Tahun anggaran 2024 adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan Keuangan Likuidasi Satker Distribusi Cadangan Pangan (999801), serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Satker serta pengakuan, pengukuran dan

pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ruang lingkup reviu yang akan dilakukan adalah penyajian Laporan Keuangan Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Kode Satker 999801 Tahun Anggaran 2024 per 31 Agustus 2024 termasuk penelaahan dan analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas system pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilakukan dalam suatu audit.

3. Entry Meeting Desk Reviu Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap II bertempat di Jakarta dan Bogor serta DI Yogyakarta. Pelaksanaan Reviu merupakan kelanjutan Reviu Bantuan Pangan Tahap I kegiatan yang dilaksanakan meliputi desk reviu terhadap dokumen penyaluran bantuan pangan tahap II. Tim reviu melakukan kompilasi terhadap Kertas Kerja yang telah disusun untuk mempermudah pelaksanaan Reviu.
4. Uji Petik Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap II di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara.
5. Uji Petik Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap bertempat di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Uji Petik Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap II Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan hasil uji petik Reviu Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap II Tahun 2024 yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 3 (tiga) Kab/Kota (Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala).
7. Uji Petik Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras bertempat di Provinsi Aceh.
8. Uji Petik Tagihan Pembayaran atas Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap II 2024 bertempat di Provinsi Banten.

3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Periode Bulan September Tahun 2024

Kepala Badan Pangan Nasional dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, telah melaksanakan kegiatan pada bulan September Tahun 2024, diantaranya:

1. Hadiri High Level Plenary Session - MSP Bali, Kepala NFA Dukung Kolaborasi Global Capai Target SDGS

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menghadiri High-Level Plenary (HLP) Session "Building Bridge: Unlocking the Full Potential of Global South through Multi-Stakeholder Partnerships," pada Senin 2 September 2024 di Nusa Dua Bali.



Merupakan rangkaian pertemuan internasional Multi Stakeholder Partnership (MSP) yang bertujuan untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam upaya memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarnegara di tengah tantangan global.

Dalam keterangannya se usai menghadiri forum tersebut, Arief mengungkapkan, pangan sangat penting dalam kerangka isu global mengingat berbagai tantangan ketahanan pangan membutuhkan upaya bersama dari negara-negara dengan semangat kolaborasi dan kemitraan global. Terlebih lagi pangan menjadi salah satu isu yang didorong dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam sambutannya pada pembukaan HLP Session tersebut mengatakan, untuk mempercepat upaya kolaboratif dalam mengatasi tantangan global yang mendesak melalui forum kemitraan multipihak tingkat tinggi, Indonesia menekankan pentingnya perubahan transformatif.

"Dengan upaya perubahan transformatif melalui kemitraan multipihak, diharapkan kesenjangan pembangunan antar bangsa dapat dipersempit, dan kemajuan global menuju pencapaian SDGs pada tahun 2030 dapat berjalan dengan baik," ucap Suharso.

2. Kemukakan Peran Krusial CPP, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi Terus Perkuat Bulog dalam Penuntasan Penugasan Pemerintah



Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menghadiri diskusi kelompok terarah yang mengangkat topik 'Kebijakan CPP Jangka Menengah dan Jangka Panjang' pada Rabu 11 September 2024 di Jakarta. Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BUMN pangan mesti

disiapkan dan diperkuat untuk menghadapi dinamika produksi dan konsumsi pangan khususnya beras secara bulanan di akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengutarakan fungsi krusial dari penguatan CPP tersebut dan telah mendorong Perum Bulog untuk terus melakukan penyerapan dalam negeri serta menuntaskan penugasan dari pemerintah.

Bapak Arief berterima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberikan fasilitas subsidi bunga pinjaman dalam rangka penguatan stok CPP, sehingga sampai dikeluarkan plafond pinjaman hingga Rp 28,7 Triliun dan dari itu diberikan subsidi bunga. Bapak Arief juga menegaskan bahwa penyerapan Bulog harus terus diperkuat untuk mengantisipasi tren produksi bulanan yang berada di bawah konsumsi bulanan pada Oktober mendatang. "Di Oktober nanti, lalu November dan Desember sampai Januari Februari tahun depan harus diantisipasi mengingat pada periode tersebut panen rendeng volumenya lebih sedikit dari panen raya.

Dalam diskusi kelompok terarah hari ini, dipaparkan pula laporan kajian tentang penguatan CPP jangka menengah dan jangka panjang. Ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Beberapa poin penting antara lain kebutuhan CPP untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, dan daging unggas diproyeksikan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, permintaan pangan nasional, dan mitigasi kejadian bencana dan rawan pangan.

Di samping itu, disebutkan pula peningkatan kebutuhan beras dan kedelai terjadi secara konsisten, karena masih memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. CPP berperan penting di hulu dan hilir. Di hulu, menjadi instrumen penting dalam menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan. Di hilir, penyaluran CPP digunakan untuk sebagai upaya meningkatkan

angka kecukupan gizi (AKG), mengendalikan harga komoditas pangan di pasar, dan membantu menanggulangi korban bencana.

Turut hadir dalam diskusi hari ini antara lain Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq; Direktur Transformasi & Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Sonya Mamoriska; Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyamto; Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani; Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA Maino Dwi Hartono; Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas NFA Budi Waryanto; Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum NFA Enny Indarti; beserta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Dampingi Presiden Jokowi Cek Banpang Beras, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi Ungkap Langkahnya dalam Mendukung Upaya Pemerintah Menjaga Pendapatan Petani



Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Joko Widodo dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono melaksanakan pengecekan langsung ke masyarakat penerima program bantuan pangan (banpang) beras yang merupakan salah satu kebijakan pro rakyat

pemerintahan saat ini, sudah menjadi tumpuan bantalan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah untuk pemenuhan konsumsi hariannya. Guna memastikan keberlangsungan banpang beras. Giat dilaksanakan di Gudang Bulog Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur pada tanggal 26 September 2024.

Sebagai resultan dari penyaluran banpang beras tahap ketiga yang telah terlaksana di Agustus 2024 lalu, terdapat penurunan harga beras di berbagai wilayah Indonesia. Dalam laporan mingguan Badan Pusat Statistik (BPS), pada minggu pertama Agustus tercatat hanya ada 73 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras. Namun pada minggu pertama September ada kenaikan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras menjadi 90 kabupaten/kota.

Presiden Jokowi juga menanggapi terkait adanya asumsi tingginya harga beras dan minimnya pendapatan petani di Indonesia. "Coba dilihat harga beras FOB (Free on Board) itu berapa, kira-kira 530 sampai 600 dollar ditambah cost. Freight cost kira-kira 40-an dollar. Menurut Jokowi bawa jika harga, sebaiknya membandingkan di Tingkat konsumen karena itu akan kelihatan.

Lebih lanjut, NTP atau Nilai Tukar Petani telah tercapai terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2019, NTP tahunan berada di angka 100,90. Kemudian 2020, NTP tahunan menjadi 101,65. Tahun 2021 terus naik menjadi 104,64. Selanjutnya tahun 2022 di 107,33 dan terakhir NTP secara tahunan di 2023 berada di 112,46. Selama kurun waktu 4 tahun, NTP telah meningkat hingga 11,45 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa melalui banpang beras juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Ini dikarenakan Bulog ditugaskan untuk melakukan penyerapan beras yang berasal dari hasil petani lokal. Sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog terus meningkat. Bapak Arief juga menambahkan bahwa pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani kita yang kemudian kita salurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras seperti hari ini.

Realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu di 2022 capai 994 ribu ton. Lalu 2023 berhasil sampai 1 juta ton. Pada tahun 2024 sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti penyerapan Bulog bisa terus meningkat.

BPS turut melaporkan bahwa dari seluruh usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2023, sebanyak 68,10 persen termasuk dalam kategori petani skala kecil. Dari kategori itu, secara nasional di 2023, petani skala kecil di Indonesia disebutkan mampu memperoleh pendapatan sebesar 8,50 US\$ PPP (Purchasing Power Parities) di mana 1 US\$ PPP sama dengan Rp 5.239,05 sehingga menjadi setara dengan Rp 44.507 per hari kerja.

Badan Pangan Nasional bersyukur pendapatan sedulur petani masih terjaga baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini turut menandakan ekosistem pangan yang dibangun mulai dari hulu sampai hilir, berjalan cukup baik. Kita meyakini apabila semangat produktivitas petani terus menggebu, tentu ketercukupan kebutuhan konsumsi pangan dari pasokan domestik mampu terwujud, sehingga kemandirian pangan nasional pun kian kokoh.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Jokowi turut kebersamai antara lain Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Paser H.M Syirajudin, dan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa.

4. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi: Jaga Komitmen Bersama Atasi Susut dan Sisa Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengikuti acara peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan pada Petani dan Metode Baku Perhitungan Sisa Pangan pada Ritel di Jakarta pada tanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Perencanaan

Pembangunan (PPN)/Bappenas, bersama tiga mitra Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) yakni Garda Pangan, Parongpong RAW Lab, dan World Resources Institute (WRI) Indonesia. tegaskan komitmen bersama dengan para stakeholder pangan untuk menurunkan angka Susut dan Sisa Pangan (SSP). Ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengurangan susut dan sisa pangan.

Fokus utama yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional pada kegiatan hari ini adalah (metode baku) perhitungan susut pangan, itu di hulu, dan sisa



pangan di hilir, tapi ini bukan tujuan utama, perhitungan dengan metode ini menghantarkan kita agar susut dan sisa pangan betul-betul terukur dan dapat terus diturunkan atau dikurangi. Jadi jangan sampai produksi yang sudah diupayakan itu banyak yang terbuang,

dan juga nanti sampai di meja makan juga terbuang karena tidak dikonsumsi.

Susut Pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Sementara itu, Sisa Pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

Ditambahkan oleh bapak Arief bahwa akurasi penghitungan susut dan sisa pangan (SSP) sangat penting dalam perencanaan pangan. Diyakini bahwa kehadiran metode baku yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia ini dapat membantu para pihak dalam menghasilkan data SSP yang lebih akurat dan reliabel. Dengan adanya metode baku ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha pangan, penyedia pangan dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan analisis yang lebih tepat dan akurat. Sehingga kebijakan yang disusun dapat diarahkan lebih efektif, menangani titik-titik kritis di sepanjang rantai pasok pangan, dan memberikan solusi yang lebih strategis. Kepala Badan juga menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor, akademisi maupun petani dan pihak horeka (hotel, restoran dan catering) dan menjaga komitmen bersama mengatasi susut dan sisa pangan menjadi kunci penting dalam penanggulangan permasalahan ini.

Pernyataan senada dengan kepala Badan Pangan Nasional, Arief, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo menjelaskan bahwa metode ini

telah diujicobakan kepada Pemerintah Daerah yang melibatkan OPD Pangan dan Bappeda di 15 provinsi pelaksana kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan. Beliau berharap metode baku ini dapat menjadi pijakan penting dalam upaya kolektif kita untuk mencegah dan menangani, termasuk meredistribusi SSP di Indonesia, sekaligus mengurangi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan,

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto yang turut hadir juga menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pangan Nasional yang telah menindaklanjuti isu terkait susut dan sisa pangan di Indonesia sehingga penanganannya dapat terus bergaung. Bentuk perhitungan ini merupakan kontribusi nyata bagi Indonesia ke global bahwa kita sangat concern terhadap isu *food loss and waste*, kami juga berharap nantinya tidak hanya dalam konteks mengukur tetapi juga memberitahu para pelaku seberapa besar *food loss and waste* yang dikontribusikan sehingga terjadi perubahan perilaku para pelaku dalam sistem pangan itu. Bapak Jarot menegaskan pula berharap ini menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk merumuskan upaya-upaya pengurangan susut dan sisa pangan serta bentuk nyata bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi sistem pangan.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Rut Krüger Giverin mengapresiasi berbagai upaya dan kolaborasi yang secara pro aktif telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama mitra terkait dalam Penanganan isu susut dan sisa pangan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KSPL Gina Karina mengatakan bahwa kedua metode baku yang diluncurkan hari ini disusun berdasarkan dokumen *Food Loss and Waste Protocol* yang diluncurkan oleh 7 organisasi nonprofit terkemuka dunia pada 2013 lalu. Bersama mitra, kami berupaya untuk memastikan metode tersebut sesuai dengan kondisi di Indonesia sehingga benar-benar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terkait susut dan sisa pangan di Indonesia, baik untuk ritel maupun petani di tingkat lokal dan nasional. Harapan besar Gina, metode baku ini dapat menjadi langkah awal untuk mencapai target utama dari susut dan sisa pangan sebesar 50 persen di 2030.

Berdasarkan data Bappenas, Indonesia menghasilkan susut dan sisa pangan atau *food loss and waste* sebanyak 115-184 kg per kapita per tahun pada periode tahun 2000-2019. Kerugian ekonomi yang dihasilkan juga tidak sedikit, yakni sekitar 4-5% dari PDB Indonesia per tahun.

Turut hadir pada kesempatan ini Plt. Sekretaris Utama Sarwo Edhy, Country Director WFP, Denmark Embassy, Atase Chile, Country Project Portfolio Indonesia IFAD, Chief Executive Officer Garda Pangan, Vice President Parongpong RAW Lab, Policy Manager IBCSD, Waste4Change, perwakilan lintas K/L Bappenas, Kementan, KKP, Kemendag, Kemendagri, Kemenparekraf, Kemlu, Kemenkes, BRIN, BPOM, akademisi, mitra BUMN/Swasta dan OPD Pangan terkait serta bank pangan/penggiat selamatkan pangan.

5. Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Pertanian

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menjadi narasumber dalam Rakor Bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, ID FOOD, PTPN dan Pupuk Indonesia pada Jumat 20 September 2024 di Auditorium Kementerian Pertanian, di Jakarta. Dalam Rakor, Bapak Arief menyampaikan kesinergisan dalam ekosistem pangan nasional yang mencakup konektivitas sejak proses di hulu sampai hilir perlu dicapai melalui kolaborasi bersama stakeholder terkait.

Kepala Badan Pangan Nasional dalam kesempatan tersebut menyambut baik forum ini dan menyampaikan eksplikasi tentang beberapa gagasan yang



dibutuhkan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Beliau juga menyampaikan komitmennya terhadap program dan kebijakan pemerintahan selanjutnya, terutama di bidang pangan, memerlukan penerapan strategi yang dikerjakan secara kolaboratif dan holistik. Kebangkitan pangan nasional di 2025 perlu kita rencanakan secara bersama bersama BUMN pangan, tentunya Bapak Menteri BUMN juga, akan mendukung semua kebijakan pemerintahan depannya. Kita semua bersama Bapak Menteri Pertanian, siap berkolaborasi untuk menyukseskan program Bapak Presiden Joko Widodo dan melanjutkan Bapak Prabowo ke depan, yang menaruh perhatian besar pada sektor pangan dan pertanian.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional, yang pertama, kita perlu benih yang berkualitas. Untuk itu, ID FOOD dan SHS telah kita siapkan dan pastikan benih dari SHS adalah benih terbaik. Selanjutnya Bulog telah ditugaskan untuk tambahan penyerapan beras dalam negeri sampai 600 ribu ton sampai akhir tahun 2024. Dryer juga penting disiapkan, karena tahun depan saat produksi beras oleh Kementan berlimpah, kita perlu dryer. Jadi kita bicara secara end to end. Produksi di hulu ditingkatkan, hilirnya pun kita siapkan.

Mengenai realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog, sampai tengah September 2024 ini, total telah mencapai 882 ribu ton. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian ini mengalami peningkatan yang cukup impresif. Realisasi selama Januari sampai Agustus 2023 tercatat di 803 ribu ton. Namun di periode yang sama tahun ini telah berada di angka 828 ribu ton.

Kemudian Pupuk Indonesia selain memasok pupuk, juga ada aplikasi teknologi pemupukan menggunakan drone. Ini perlu eskalasi terus menerus karena untuk luas tanam yang semakin bertambah, harus ada percepatan pekerjaan dengan

teknologi. Mimpi kita itu kultivasi sudah siap, kemudian nanti planter jalan dan pemupukan pakai drone. Jadi semuanya mulai dari produksi mesti dipikirkan holistik end to end.

“BUMN pangan harus selaras dengan yang dikerjakan Kementan. Kemudian selama ini dari input sampai hilir semuanya sudah ada dan akan bertambah dengan Badan Gizi Nasional melalui program MBG (Makan Bergizi Gratis). Saya meyakini tidak ada lagi peternak yang buang telur atau ayam dan ekonomi pedesaan akan bergerak, jika produksi petani peternak kita terserap dengan baik melalui program pemerintah,” tambahnya.

Adapun NFA pun selama ini bersama ID FOOD telah memberikan stimulus bagi kalangan peternak unggas berupa program bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta keluarga. Dengan adanya program ini yang turut menysasar wilayah di luar Pulau Jawa, dapat menggerakkan peternak unggas lokal di daerah sasaran dan tidak mengandalkan pasokan daging ayam dan telur dari Pulau Jawa saja. Realisasi per 19 September, total telah capai 3,8 juta paket bantuan pangan yang telah disalurkan untuk alokasi 4 bulan.

Sebagai penutup dalam pertemuan itu, Bapak Arief menambahkan bahwa kita juga perlu meluaskan penggunaan *cold storage*. Apabila produksi dari sektor unggas meninggi, storage ini bisa jadi solusi dan disebar ke seluruh Indonesia. Dengan kapasitas 20 ton, tapi kalau di tiap desa punya itu, maka akan membantu masyarakat memiliki stok ayam dalam bentuk karkas dan frozen condition. Jadi ini merupakan upaya pemerintah memperkuat masa simpan pangan pokok bagi Masyarakat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun mengamini strategi kolaborasi yang harus terus diusung ke depan. Mentan Amran menekankan bahwa untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, seluruh stakeholder dari hulu hingga hilir berkolaborasi. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ini keluarga besar untuk pangan, dari hulu ke hilir, kita ketemu. Dan ke depan kami harus secara rutin rapat dengan keluarga besar pangan, sehingga Insya Allah lumbung pangan atau swasembada akan kita raih. Sukses untuk mencapai mimpi tidak bisa berdiri sendiri, itu harus kolaborasi dari hulu hilir, semua pihak harus lakukan. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri, tapi harus kolaborasi,” ujar Mentan Amran. Terkait itu, menurut Kerangka Sampel Area BPS, puncak produksi beras terjadi di April 2024 sebesar 5,31 juta ton. Pada Mei 2024 proyeksi produksi beras di 3,61 juta ton dan turun pada Juni 2024 di 2,06 juta ton. Namun, pada Juli sampai September 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan produksi yang masing-masing ada di angka 2,18 juta ton, kemudian 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton.

6. Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi IV DPR RI

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi IV DPR RI di Jakarta pada tanggal 12 September 2024. Dalam RDP itu Arief menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sepakat kalau penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk program intervensi pangan, sebaiknya berasal dari



produksi dalam negeri. Sempat disebut importasi beras tinggi setelah ada Badan Pangan Nasional, namun bukan begitu. Setelah kami hitung ketersediaan dikaitkan dengan produksi yang ada, namun karena climate change dan lainnya, hanya ada lebih sekitar 500 ribu ton, oleh karena itu diperlukan tambahan pengadaan.

Selama 2 tahun terakhir, tantangan fluktuasi pangan turut menerpa Indonesia. Tak bisa dipungkiri, gejala ini turut menerpa secara global. Dampak fenomena El Nino berimbas pada kenaikan faktor biaya agroinput bagi kalangan produsen tanaman pangan. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyikapinya dengan melaksanakan berbagai strategi regulasi dan aksi nyata intervensi pasokan ke pasaran yang bersumber dari stok CPP.

Untuk diketahui, jika melihat historis data grafik pada The Food and Agriculture Organization (FAO) All Rice Price Index (FARPI) dapat terlihat perkembangan harga beras dunia sampai tahun ini mengalami pergerakan yang menanjak. Pada Agustus 2022, indeks FARPI masih berada di angka 108,5 dan di Agustus tahun ini menjadi 134,02.

Kami pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional menginginkan dampak ekonominya kembali ke Indonesia, tidak lagi di Vietnam atau Thailand. Namun ada titik cerah dari anggaran Kementan yang dari Rp 7,9 Triliun menjadi Rp 29 Triliun, ini kita harusnya bisa berharap banyak. Semoga nanti produksi beras nasional minimal bisa setara 35 juta ton. Ini juga menjelaskan kepada publik bahwa ketersediaan itu paling baik adalah produksi dalam negeri. Terkait itu, kebijakan pengadaan luar negeri yang selama ini telah diimplementasikan tidak memberi dampak negatif kepada petani tanaman pangan dalam negeri. Ini salah satunya dapat dipantau dari pergerakan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Selama ini, pemerintah secara konsisten mampu menjaga NTPP selalu melebihi dari 100 poin sejak Oktober 2022.

Di samping itu, indeks harga yang diterima petani padi terhadap indeks harga yang dibayar petani pun terus diupayakan mengalami surplus. Secara tahunan, pada 2023, indeks harga yang diterima petani padi tercatat 127,26 dan ini lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani di 117,31. Terbaru, indeks harga yang diterima petani padi di Agustus 2024 berada di 136,42. Sementara indeks harga yang dibayar petani di 121,09. Adapun harga yang dibayar petani sendiri merupakan rerata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian.

Lebih lanjut, Arief mendorong adanya akselerasi produksi pangan dalam negeri. Begitu nanti anggaran Rp 29 Triliun tadi diimplementasikan dan dikerjakan, artinya produksi dalam negeri akan meninggi. Nah kita perlu BUMN pangan untuk menyerapnya, sehingga teknologi pasca panen harus siap. Kami telah meminta Bulog untuk siapkan dryer. Jadi bisa terwujud keseimbangan antara produksi sampai processing dan warehouse yang ada di Bulog sampai hilirisasinya.

Sebagai penutup, Arief menambahkan juga berusaha menghubungkan produksi dalam negeri yang diserap BUMN pangan kepada Badan Gizi Nasional, ini bisa jadi alternatif pengadaan bagi Badan Gizi Nasional. Langkah ini diperlukan agar stok yang ada di BUMN pangan terhindar dari disposasi. Perlu ada program hilirisasi sebagai strategi intervensi pengendali inflasi, seperti bantuan pangan dan program SPHP, itu harus tetap kita kerjakan.

7. Menghadiri Pembukaan Toko “Misoa Story” Sebut Culinary Business Menjanjikan, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi Kaitkan dengan Kepastian Offtake Produksi Pangan Dalam Negeri

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menghadiri pembukaan Toko “Misoa Story” di Pasaraya Blok M, Jakarta pada Senin, 16 September 2024. Visi yang disampaikan pada giat itu adalah *‘from farm to table’* bahwa dengan meningkatnya bisnis kuliner, dapat memberi dampak positif bagi penyerapan hasil panen tanaman pangan dari petani dalam negeri.



Bapak Arif menyampaikan juga, Badan Pangan Nasional itu membangun ekosistem dari hulu sampai dengan hilir. Kalau ranah produksi di Kementerian Pertanian. Lalu pasca panen itu Badan Pangan bersama BUMD, BUMN, dan

seluruh dinas pangan pemerintah daerah. Jadi kita ingin wujudkan 'from farm to table' sehingga dengan adanya Misoa Story ini sangat positif. Kepastian adanya pihak yang menyerap hasil panen petani menjadi unsur penting dalam ekosistem pangan nasional. Untuk itu, selama ini pemerintah terus menopangnya dengan berbagai strategi intervensi, misalnya program bantuan pangan dan operasi pasar murah.

Alhasil sejak Oktober 2022, indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) selalu berada lebih dari 100 poin. Di Agustus tahun lalu NTPP di 106,71. Sementara NTPP di Agustus tahun ini naik menjadi 110,25. Jadi ini positif karena akan bisa meng-offtake produksi di dalam negeri, ini akan sangat baik. Jadi kalau raw material itu pasti ada yang menyerap, itu sangat membantu petani. Jadi ekonomi kita terus bergerak. Hari ini culinary business itu sangat menjanjikan. Apalagi anak-anak muda kita sudah ikut merambah di lini bisnis ini. Semoga terus berkembang, termasuk Misoa Story ini, sehingga culinary business Indonesia terus terbangun.

Dalam acara itu, turut hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri Sandiaga menuturkan kuliner ini menjadi subsektor yang menyumbang PDB terbesar dalam ekonomi kreatif. Jumlahnya mencapai 41 persen atau Rp 519 Triliun dari total PDB di 2022. Tenaga kerja yang diserap pun hingga 13 juta orang. Untuk itu, kita apresiasi pembukaan Misoa Story yang makin melengkapi culinary experience di Pasaraya Blok M ini.

8. Panen Raya di Lahan PT. Sang Hyang Seri (SHS), Subang

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prsaetyo Adi bersama ID FOOD, SHS, Bulog, dan Pupuk Indonesia melakukan panen raya di Lahan PT. Sang Hyang Seri (SHS) di Subang pada tanggal 18 September 2024. Lalu ada akademisi beserta asosiasi AB2TI, HKTI beserta private sector. Jadi inilah sinergisitas pentahelix semua terlibat disini untuk membangun ekosistem pangan yang semakin progresif.



Pembangunan ekosistem pangan nasional mensyaratkan keterpaduan proses dari hulu hingga hilir yang dilakukan dengan sinergi yang kuat bersama-sama dengan stakeholder terkait. Ini demi perwujudan ketahanan pangan yang mandiri dan

berdaulat. Kebangkitan pangan nasional dapat diinisiasi berawal dari pembenihan padi yang berkualitas dan diiringi dengan proses lanjutan sampai tercapai hilirisasi yang ideal. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional berupaya mencapai adicita itu dengan merangkul segenap stakeholder yang terkait untuk menjadikan PT. SHS sebagai pusat benih nasional. Kita mau mengembalikan kebangkitan pangan nasional itu dimulai salah satunya dari sektor benih. Jadi benih itu sangat penting. Pak Soeharto itu tahun 1968 sudah menyiapkan pembenihan padi seperti ini tinggal melakukan *maintenance* dan memperbaiki secara konsisten. Saat ini, di PT. SHS ada 3.200 hektar, sehingga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Apabila hulu sudah siap secara baik, kita juga perlu siapkan hilirnya dengan ada yang jadi standby buyer. Kemudian ada penangkar di setiap daerah produksi, itu akan sangat menolong.

Dalam panen raya hari ini memperlihatkan peran yang saling melengkapi kebutuhan dan ketersambungan antar lini. ID FOOD dan SHS mampu mengoptimalkan aset lahannya. Kemudian pemupukan dibantu Pupuk Indonesia yang menggunakan aplikasi teknologi drone. Mesin pemanen oleh CV. Sandy Jaya. Setelah panen pun, Perum Bulog siap sedia menyerap untuk memenuhi target penyerapan beras dalam negeri.

Selaras dengan Arief, Direktur Utama PT. SHS Adhi Cahyono Nugroho, dalam kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama yang dilaksanakan saat ini merupakan piloting yang ke depannya akan terus ditingkatkan. “Dari piloting ini ke depannya kita akan tingkatkan dan fokus ke perbenihan dan meningkatkan fungsi riset. Kita hidupkan lagi SHS sebagai riset perbenihan yang nantinya akan menjadi pusat perbenihan nasional. Dalam kesempatan itu, hadir pula Guru Besar IPB yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, mengungkapkan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama untuk mendorong peningkatan produksi. Kalau dilihat saat ini NTPP yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Kebijakan HPP cukup efektif dalam menopang NTPP selama ini. Harapan kami, saya mengimbau bagaimana mempertahankan NTPP. Kalau itu bisa kita lakukan, petani tersenyum, petani happy, kalau petani happy, mereka pasti akan berusaha dengan keras untuk meningkatkan produksi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo dengan kebijakan penetapan HPP yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional, mendorong minat petani untuk terus menanam padi. Struktur perhitungan (penetapan HPP) yang disampaikan HKTI saat itu diterima Bapanas. Waktu itu kami menuntut biaya produksi harus dihitung dengan benar dan petani minimal menerima 30 persen. HPP terakhir berikan profit kira-kira 20 persen.

Dalam panen padi ini, turut hadir Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno beserta Anggota Dewan Pengawas Bulog, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,

serta segenap pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Badan Pangan Nasional.

9. NFA Fasilitasi Distribusi Pangan Untuk Jaga Stabilisasi Harga Kedelai Petani Jawa Tengah di Masa Panen Raya



Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga kedelai di tingkat petani, Badan Pangan Nasional memberikan bantuan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Kedelai dari petani ke pelaku usaha kedelai. Sebanyak 10 ton kedelai biji kering dari petani Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah didistribusikan kepada

Koperasi Produsen Tahu Tempe (KOPTI) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya juga telah didistribusikan 10 ton ke KOPTI Rumah Tempe Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyampaikan aksi ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga kedelai petani pada musim panen raya kedelai di Agustus sampai September 2024. FDP diberikan kepada para mitra seperti KOPTI, pengrajin tempe dan tahu, serta pelaku usaha lainnya. Kedelai lokal harganya dijaga agar sedulur petani bisa terus semangat menanam. Kami sudah koordinasikan dengan GAKOPTINDO, KOPTI, pelaku usaha kedelai serta para importir untuk turut menyerap hasil panen petani dengan harga yang wajar. Hal ini disampaikan pada Rabu, tanggal 11 September 2024.

Pada puncak panen raya di awal bulan September harga kedelai di tingkat petani Jawa Tengah sempat menyentuh angka Rp 8.500-8.700 per kilogram (kg). Jauh dari harga pada tahun sebelumnya yang menyentuh Rp 10.000-10.500 per kg. Kondisi tersebut bisa berdampak pada demotivasi petani menanam kedelai pada periode selanjutnya.

Diketahui dari data Panel Harga Pangan per tanggal 9 September 2024 harga rata-rata nasional kedelai biji kering di tingkat produsen sebesar Rp 10.030 per kg, lebih rendah 6,91 persen dibandingkan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen. Rata-rata harga tertinggi berada di Provinsi Jambi (Rp 11.500 per kg) dan terendah berada di Provinsi Banten (Rp 9.000 per kg). Adapun produksi kedelai nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 150 ribu ton.

Sebagai penutup, bapak Arief menambahkan bahwa sampai hari ini beberapa pelaku usaha kedelai komitmen akan membantu menyerap kedelai petani, antara lain KOPTI Bogor siap menyerap 30 ton, KOPTI Bandung 10 ton, Pemprov Jateng

16,4 ton, PT. FKS 10 ton, PT. GCU 10 ton, dan pengrajin tempe di Kabupaten Klaten 10 ton. Jika nanti KOPTI, pengrajin tempe dan tahu, PT. FKS, dan PT. GCU terus menyerap kembali, pastinya pasokan di hulu akan kembali lancar, pemasaran terjamin, dan sedulur petani akan tetap semangat menanam.

10. Badan Pangan Nasional Dukung Program Makan Bergizi Gratis; Siap Sokong dengan Cadangan Pangan Pemerintah yang Terus Diperkuat

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) memiliki andil yang signifikan terhadap keberhasilan berbagai program pemerintah yang bertalian dengan intervensi urusan pangan. Berkaca dari itu, penguatan stok CPP yang diampu oleh BUMN pangan terus diupayakan Badan Pangan Nasional. Intensi ini pun termasuk untuk mendukung pemenuhan salah satu program unggulan Presiden dan Wakil



Presiden terpilih, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kami di Badan Pangan Nasional tentu mendukung program MBG, karena dengan itu, keterhubungan hulu sampai hilir menjadi semakin terkoneksi dengan baik. Jadi ini merupakan program pemerintah yang dapat

membuktikan hasil produksi petani dan peternak di hulu tersambung sampai di hilir, sehingga hasil panen pasti diserap. Melalui CPP yang memadai, nantinya bisa turut menyokong pasokan pangan pokok yang dibutuhkan selama pelaksanaan MBG yang dimulai tahun depan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu tanggal 11 September 2024.

Arief memastikan pihaknya telah mempersiapkan jejaring penyuplai dan distribusi dalam ekosistem pangan yang dapat diintegrasikan guna menunjang pelaksanaan program MBG, sehingga memenuhi ekspektasi yang ditetapkan. Ia pun ingin memitigasi kemungkinan terjadinya situasi fluktuasi pangan dengan terus memastikan ketercukupan dan ketersediaan pasokan pangan pokok strategis bagi masyarakat secara umum. Selama ini kolaborasi Badan Pangan Nasional bersama dengan asosiasi pelaku usaha dan pengelola pasar tradisional dan modern telah terbentuk dengan baik. Kita harap jejaring sinergis ini mampu terus menjaga stabilitas pangan dan bisa berpadu dengan Badan Gizi Nasional sebagai pihak pelaksana program MBG. Badan Pangan Nasional siap mendukung dan berkolaborasi secara intensif.

Adapun penguatan stok CPP selama ini dilaksanakan oleh Perum Bulog dan ID FOOD dengan terus mendahulukan melalui penyerapan produksi dalam negeri.

Namun tatkala produksi dalam negeri terdapat defisit antara produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, demi menjaga harga domestik agar tidak melonjak, terpaksa dilakukan pengadaan dari luar negeri. Itu juga pemerintah selalu laksanakan secara terukur tanpa mempengaruhi harga di tingkat produsen.

Sampai minggu pertama September, Bulog telah melaksanakan pengadaan beras asal dalam negeri sebanyak 854 ribu ton. Jika dibandingkan total pengadaan beras dalam negeri periode yang sama di tahun 2023 terdapat peningkatan 0,56 persen. Untuk pengadaan komoditas jagung pakan asal dalam negeri, Bulog telah merealisasikan sebanyak 84 ribu ton untuk stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Pengadaan dalam negeri lainnya oleh Bulog antara lain minyak goreng 53 ribu kilo liter, gula konsumsi 25 ribu ton, daging ayam 1,6 ribu ton sampai telur ayam 441 ton.

Lebih lanjut, ID FOOD dalam melaksanakan program bantuan pangan untuk penanganan stunting di tahun ini, dipastikan menyalurkan paket telur dan daging ayam hasil peternak dalam negeri. Bantuan pangan kepada total 1,4 juta keluarga di 7 provinsi selama 3 bulan tersebut juga menjadi instrumen pemerintah dalam membantu penyerapan hasil peternak unggas lokal. Per 9 September, bantuan pangan sebanyak 2.630.776 paket untuk alokasi 3 bulan telah berhasil disalurkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Mei Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) kegiatan dengan 17 jenis KRO (ABR, AEA, AEC, AFA, BEC, BMA, EBA, EBB, EBC, EBD, PCA, PEH, RAG, QIA, QDD, QEA, QMA) dan 55 output/RO dengan pagu total berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional Revisi ke 14 Tahun 2024 sebesar Rp. 25.222.891.455.000,- yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen.
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan September Tahun 2024 sebesar Rp. 6.608.568.216.887,- dengan persentase realisasi sesuai pagu DIPA Revisi sebesar Rp. 18,16%. Sedangkan realisasi pada bulan September Tahun 2024 untuk satker Badan Pangan Nasional mencapai Rp. 34.552.726.101,- atau mencapai 0,09% dari pagu DIPA Revisi dan mencapai 91,41% % dari target bulan September pagu DIPA Revisi atau setara Rp. 37.834.337.183,-
3. Realisasi fisik sampai bulan September Tahun 2024 sesuai target pencapaian KRO dan Output/RO Tahun 2024 adalah:
 - a. ABR Kebijakan bidang pertanian dan pangan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan RO Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - b. AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Pelaporan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - c. AFA Norma Standar Prosedur dan Kriteria untuk RO NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, RO NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu NSPK Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 181 Tahun 2024 tentang Pemberian Kompensasi atas Penyelenggaraan CPP, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Tahap I Tahun 2024, SK penetapan Lokasi dan Penerima Sarpras 2024, PKS Bapanas dan BULOG tentang Penyaluran CPP UNTUK Pemberian Banpang Beras Tahun 2024, Dokumen Persetujuan Izin

- Prakarsa Penyusunan Rperpres 125/2022 tentang Penyaluran CPP, BAST Data PBP Tahap II antara Bapanas dengan Perum BULOG dan Rancangan Pagu Indikatif TA 2025 lingkup DCP (Bahan Tri Lateral Meeting Tahap I), RO RO Pengendalian Kerawanan Pangan yaitu untuk NSPK mengenai Naskah Urgensi Perencanaan Pangan untuk penyusunan RPerpres Perencanaan Pangan 2025-2029, RO NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa naskah urgensi perencanaan pangan untuk penyusunan RPerpres Perencanaan Pangan 2025-2029;
- d. QMA Data dan Informasi Pangan untuk RO Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan RO Data Distribusi dan Keamanan Pangan;
 - e. PCA Perizinan Produk untuk RO Pengawasan Keamanan Pangan;
 - f. PEH Promosi untuk RO Promosi Pangan B2SA kepada pelajar sekolah yang berkerjasama dengan kemendikbudristek dan UMKM pada saat expoB2B2G(business to business to government) dan sosialisasi pada saat lomba masak .
4. Dinamika bantuan pangan pada bulan September volume anggarannya meningkat dari 25.222.891.455.000,- ada tambahan ABT sebesar Rp. 11.187.837.876.000,- sehingga pagu total menjadi Rp. 36.388.593.245.000,- dengan adanya penambahan ABT dialokasikan untuk pembiayaan bantuan pangan untuk tahap II (September s.d Desember 2024).

4.2 Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan September Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya realisasi anggaran lingkup Badan Pangan Nasional pada bulan September Tahun 2024 disebabkan karena adanya anggaran tambahan untuk pembiayaan bantuan pangan Tahap II (September-Desember), sehingga tahapan kegiatannya menjadi lebih banyak yang menyebabkan realisasi anggarannya menjadi lebih kecil.
2. Minimnya keahlian di bidang keuangan, administrasi pelaksana kegiatan di Satker di provinsi yang menyebabkan keterlambatan dalam membuat laporan.

3. Adanya pergantian pimpinan Satker, menyebabkan kegiatan menjadi stagnan karena harus menunggu pengusulan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Pencapaian yang baik terkait pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada bulan September sebesar 91,41% dari target bulan September sebesar 0,15% dari pagu total selama bulan September Tahun 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Pengisian Anggaran (DIPA) Tahun Nomor SP DIPA.125.01.1.690590/2023 Revisi 14 Tanggal 6 September 2024, realisasi keuangan sampai dengan bulan September Tahun 2024 mencapai 18,16% dari pagu total 25.222.891.455.000,-. Perlu dilakukan strategi percepatan realisasi anggaran untuk mendukung target realisasi anggaran dengan penetapan rencana aksi dan pemantauan realisasi capaian serta kendala yang dalam pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

- 1) Percepatan kelengkapan administrasi kegiatan terutama untuk satker Dekon di 38 provinsi dengan melakukan revisi terhadap PK, percepatan relisai kegiatan rencana Aksi.
- 2) Percepatan kegiatan pusat dan satker dekon di 38 provinsi
- 3) Untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga lebih focus melaksanakan kegiatan dan pelaporannya.
- 4) Koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif ke KPPN di Provinsi/Kab/Kota.
- 5) Perlunya mengoptimalkan kompetensi dan profesional SDM dengan pelatihan dan bimtek anggaran, perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Lampiran III DIPA Revisi ke-14: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



05:4663-6253-1221-4707

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
 Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
 (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.428.037	15.128.567	386.894.752	15.215.428	17.179.089	24.405.766	22.830.342	6.143.630.539	38.376.749	8.657.733.558	26.602.246	9.869.466.382	25.222.891.455
		BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.315.637	48.509.711
		BELANJA BARANG	4.015.474	11.049.139	379.368.221	10.996.170	13.077.548	16.303.415	18.633.607	6.131.979.886	19.903.520	8.653.210.074	22.070.850	9.861.756.792	25.142.364.695
		BELANJA MODAL	48.748	694.730	329.122	181.612	292.313	485.667	400.713	8.131.016	14.953.587	1.003.842	1.011.754	4.393.953	31.927.049
	125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.209.515	2.101.172	371.762.286	3.256.379	3.047.063	5.257.199	3.025.171	6.118.413.207	19.223.568	8.636.123.587	4.611.377	9.837.768.257	25.006.798.781
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.194.398	2.065.456	371.571.896	3.198.690	3.000.043	5.022.302	2.944.264	6.116.329.254	4.676.942	8.635.547.799	4.074.056	9.837.122.881	24.987.747.981
		53 BELANJA MODAL	15.116	35.716	190.390	57.689	47.020	234.897	80.907	2.083.953	14.546.626	575.789	537.321	645.376	19.050.800
	125.01.HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	86.451	2.005.328	2.657.745	1.992.225	1.846.956	3.981.675	6.836.502	4.675.851	4.689.186	7.374.967	6.585.221	10.033.513	52.765.620
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	84.605	1.969.931	2.603.362	1.978.268	1.823.240	3.956.753	6.772.174	4.579.744	4.611.314	7.194.280	6.425.744	9.859.756	51.859.170
		53 BELANJA MODAL	1.846	35.397	54.384	13.957	23.716	24.922	64.328	96.107	77.872	180.687	159.477	173.758	906.450
	125.01.HA.6877	Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	855.006	2.972.430	1.348.511	1.641.118	3.428.866	3.128.726	3.407.354	10.217.241	4.243.897	4.563.397	4.747.568	9.802.722	50.356.836
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	834.198	2.889.480	1.315.549	1.599.370	3.322.095	3.033.621	3.283.720	4.369.261	4.091.813	4.407.601	4.532.465	7.642.663	41.321.836
		53 BELANJA MODAL	20.808	82.950	32.962	41.748	106.771	95.105	123.634	5.847.980	152.084	155.796	215.103	2.160.059	9.035.000
	125.01.WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.277.066	8.049.637	11.126.209	8.325.706	8.856.203	12.038.167	9.561.315	10.324.240	10.220.097	9.671.606	10.658.080	11.861.891	112.970.218
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.809.228	7.616.684	3.796.022	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.519.642	3.315.637	48.509.711

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III, 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	902.272	4.124.272	3.877.414	4.219.843	4.932.169	4.290.740	5.633.450	6.701.626	6.523.451	6.060.394	7.038.585	7.131.493	61.435.706
		53 BELANJA MODAL	10.977	540.667	51.386	68.217	114.806	130.743	131.843	102.972	177.004	91.570	99.853	1.414.761	2.934.799

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pangan Nasional

td.
Arief Prasetyo Adi, ST., MT
NIP. 197411272022211004

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan September Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI
Kementerian Keuangan

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
JUMLAH SELURUHNYA		36.388.593.245.000	37.801.140.554	34.552.726.101	6.608.568.216.887	18,16%	29.780.025.028.113
HA	15.590.447.566.000	36.278.209.965.000	37.664.881.856	25.849.781.318	6.531.001.908.462	18,00%	29.747.208.056.538
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	36.186.339.379.000	37.510.198.172	11.870.532.112	6.466.203.862.061	17,87%	29.720.135.516.939
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.075.798.000	6.121.197	214.144.322	3.135.947.308	76,94%	939.850.692
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	1.450.077	70.888.089	827.293.390	85,58%	139.424.610
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	1.678.620	65.251.770	954.440.892	85,29%	164.639.108
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.900.000.000	2.992.500	78.004.463	1.354.213.026	68,05%	635.786.974
AEA	Koordinasi	15.868.048.000	27.985.689	721.715.992	10.830.630.427	68,25%	5.037.417.573
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	610.275	27.081.500	325.820.270	80,08%	81.029.730
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	7.267.323.000	10.900.985	127.843.080	5.321.000.262	73,22%	1.946.322.738
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.198.875.000	16.474.430	566.791.412	5.183.809.895	63,26%	3.010.065.105

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000	4.352.063	63.055.360	2.299.035.414	79,24%	602.339.586
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	749.063	14.052.440	467.862.113	93,69%	31.512.887
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	1.953.000	4.529.000	1.179.615.837	90,60%	122.384.163
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	1.650.000	44.473.920	651.557.464	59,23%	448.442.536
BEC	Bantuan Produk	36.123.470.353.000	37.403.448.716	0	6.424.545.628.946	17,78%	29.698.924.724.054
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	36.123.470.353.000	37.403.448.716	0	6.424.545.628.946	17,78%	29.698.924.724.054
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.500.000.000	2.250.000	24.544.000	547.224.716	36,48%	952.775.284
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.500.000.000	2.250.000	24.544.000	547.224.716	36,48%	952.775.284
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	20.073.805.000	38.365.508	1.784.072.438	15.768.834.993	78,55%	4.304.970.007
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	6.374.585.000	13.611.878	710.285.159	5.235.146.086	82,13%	1.139.438.914
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12.117.140.000	22.380.510	1.061.673.279	9.324.193.657	76,95%	2.792.946.343

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.582.080.000	2.373.120	12.114.000	1.209.495.250	76,45%	372.584.750
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.450.000.000	27.675.000	9.063.000.000	9.076.560.257	49,20%	9.373.439.743
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	16.450.000.000	24.675.000	9.063.000.000	9.076.560.257	55,18%	7.373.439.743
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	3.000.000	0	0	0,00%	2.000.000.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	47.588.014.000	79.148.430	4.047.409.529	33.138.714.733	69,64%	14.449.299.267
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000	17.025.000	802.550.022	6.460.142.048	83,24%	1.301.054.952
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	6.184.500	276.773.050	2.318.088.564	74,23%	804.911.436
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	10.840.500	525.776.972	4.142.053.484	89,30%	496.143.516
AEA	Koordinasi	18.706.217.000	28.942.530	1.922.721.844	9.077.993.261	48,53%	9.628.223.739
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	8.550.000	410.707.845	2.395.489.649	46,87%	2.715.707.351
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	13.595.020.000	20.392.530	1.512.013.999	6.682.503.612	49,15%	6.912.516.388
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	978.450.000	1.467.675	1.922.721.844	576.930.259	58,96%	401.519.741

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	600.000	410.707.845	296.804.344	74,20%	103.195.656
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	578.450.000	867.675	1.512.013.999	280.125.915	48,43%	298.324.085
QEA	Bantuan Masyarakat	17.851.550.000	27.917.325	1.280.270.273	16.225.534.332	90,89%	1.626.015.668
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	13.765.000.000	21.787.500	33.764.273	13.075.662.732	94,99%	689.337.268
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	6.129.825	1.246.506.000	3.149.871.600	77,08%	936.678.400
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	3.795.900	27.664.540	798.114.833	34,84%	1.492.485.167
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	1.912.500	16.414.540	588.162.261	56,83%	446.837.739
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	1.883.400	11.250.000	209.952.572	16,72%	1.045.647.428
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	44.282.572.000	75.535.254	9.931.839.677	31.659.331.668	71,49%	12.623.240.332
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.200.400.000	3.747.600	144.902.839	1.047.353.718	47,60%	1.153.046.282
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	152.000.000	450.000	69.720.000	114.720.000	75,47%	37.280.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.048.400.000	3.297.600	75.182.839	932.633.718	45,53%	1.115.766.282
AEA	Koordinasi	22.919.912.000	36.760.217	2.935.426.098	17.879.190.710	78,01%	5.040.721.290
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.922.818.000	13.054.113	507.863.505	5.871.905.639	74,11%	2.050.912.361
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	10.521.222.000	16.906.833	1.753.259.800	8.566.711.260	81,42%	1.954.510.740
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.475.872.000	6.799.271	674.302.793	3.440.573.811	76,87%	1.035.298.189
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2.065.000.000	3.375.000	189.122.688	1.006.037.302	48,72%	1.058.962.698
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	465.000.000	975.000	34.575.000	100.985.000	21,72%	364.015.000
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	2.100.000	154.547.688	770.735.404	55,05%	629.264.596
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	300.000	0	134.316.898	67,16%	65.683.102
PCA	Perizinan Produk	1.516.475.000	2.568.000	77.890.740	973.433.697	64,19%	543.041.303

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.516.475.000	2.568.000	77.890.740	973.433.697	64,19%	543.041.303
PEH	Promosi	4.130.000.000	7.566.000	507.685.120	2.573.668.873	62,32%	1.556.331.127
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.130.000.000	7.566.000	507.685.120	2.573.668.873	62,32%	1.556.331.127
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.940.000.000	3.405.000	12.188.047	792.316.650	40,84%	1.147.683.350
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	1.940.000.000	3.405.000	12.188.047	792.316.650	40,84%	1.147.683.350
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000	3.409.238	76.124.145	1.304.007.766	57,37%	968.817.234
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	3.409.238	76.124.145	1.304.007.766	57,37%	968.817.234
QMA	Data dan Informasi Publik	992.660.000	2.190.000	0	88.259.160	8,89%	904.400.840
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	992.660.000	2.190.000	0	88.259.160	8,89%	904.400.840
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.245.300.000	12.514.200	5.988.500.000	5.995.063.792	95,99%	250.236.208

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.245.300.000	12.514.200	5.988.500.000	5.995.063.792	95,99%	250.236.208
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	110.383.280.000	169.455.327	8.702.944.783	77.566.308.425	70,27%	32.816.971.575
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	110.383.280.000	169.455.327	8.702.944.783	77.566.308.425	70,27%	32.816.971.575
AEC	Kerjasama	2.824.972.000	4.350.000	59.079.283	1.616.982.731	57,24%	1.207.989.269
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.824.972.000	4.350.000	59.079.283	1.616.982.731	57,24%	1.207.989.269
.BMA	Data dan Informasi	4.949.943.000	7.872.120	287.342.955	3.052.871.670	61,67%	1.897.071.330
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	4.949.943.000	7.872.120	287.342.955	3.052.871.670	61,67%	1.897.071.330
.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	83.427.742.000	125.708.667	6.099.960.425	61.042.634.097	73,17%	22.385.107.903
EBA.956	Layanan BMN	672.000.000	1.080.000	23.104.500	465.322.010	69,24%	206.677.990
EBA.957	Layanan Hukum	1.591.900.000	2.550.000	104.277.000	802.285.610	50,40%	789.614.390
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.422.000.000	5.250.000	366.756.093	2.438.063.706	71,25%	983.936.294
EBA.959	Layanan Protokoler	921.000.000	1.462.500	121.078.552	616.578.903	66,95%	304.421.097
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	1.425.000	99.292.294	643.881.538	67,78%	306.118.462
EBA.962	Layanan Umum	11.715.694.000	17.633.445	852.809.384	7.985.169.701	68,16%	3.730.524.299

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		DIPA REVISI 14	SEPTEMBER (0,15%)	SEPTEMBER	sd. SEPTEMBER	%	
EBA.994	Layanan Perkantoran	64.155.148.000	96.232.722	4.532.642.602	48.091.332.629	74,96%	16.063.815.371
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	644.400.000	2.889.600	41.800.000	644.400.000	100,00%	0
EBB.951	Layanan Sarana Internal	644.400.000	2.889.600	41.800.000	644.400.000	100,00%	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.400.336.000	5.400.000	434.438.841	2.332.137.518	68,59%	1.068.198.482
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.400.336.000	5.400.000	434.438.841	2.332.137.518	68,59%	1.068.198.482
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15.135.887.000	23.234.940	1.780.323.279	8.877.282.409	58,65%	6.258.604.591
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.778.583.000	8.885.940	776.913.762	3.662.856.914	63,39%	2.115.726.086
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	1.500.000	122.231.122	628.306.132	62,83%	371.693.868
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	2.943.000	24.919.200	1.223.212.005	62,35%	738.787.995
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.395.304.000	9.906.000	856.259.195	3.362.907.358	52,58%	3.032.396.642